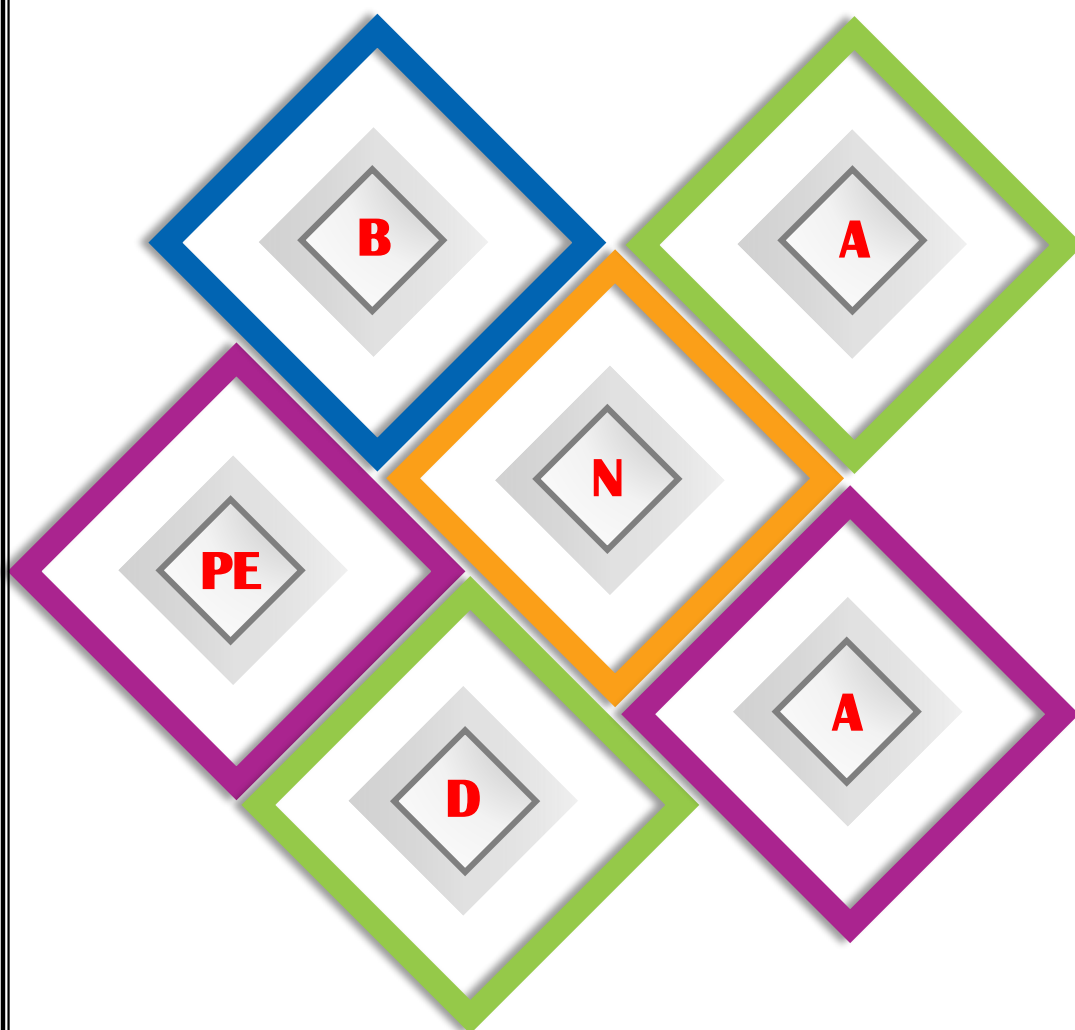




BAPENDA
SUMATERA SELATAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2024

**BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN JL. POM IX KAMPUS PALEMBANG**
TELP. 0711 – 310633 FAX 0711 – 319819 KODE POS 30137



A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun anggaran 2024 merupakan periode awal pelaporan kinerja jangka menengah 2024 – 2026 yang tertuang di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024 – 2026, yang memuat mengenai capaian kinerja, hambatan dan solusi dalam mencapai kinerja serta rekomendasi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dokumen LKjIP yang disusun secara berjenjang antar unit eselon yang mendukung kinerja Eselon II dan/atau tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai selama pelaksanaan tahun 2024.

Tujuan dan sasaran strategis pendapatan daerah merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu kinerja outcome/impact dari beberapa program nomenklatur, kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dari sasaran pendapatan dalam Dokumen Perencanaan Kinerja dan memperhatikan permasalahan (*strategic issue*) dan capaian pendapatan daerah serta menjabarkan tujuan dan sasaran strategis dalam Dokumen Perencanaan Kinerja. Dengan berlandaskan pada isu strategis dimaksud dan capaian/kesinambungan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja Badan Pendapatan Daerah serta dinamika perkembangan perekonomian baik dalam skala regional maupun nasional

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Perangkat Pemerintah Daerah mengemban tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang keuangan sub pendapatan daerah.

Sebagai perangkat daerah di bidang pemungutan Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang ada. Dalam melaksanakan kewenangan untuk melakukan

pengelolaan dan pemungutan Pendapatan Daerah, khususnya pemungutan pajak-pajak daerah provinsi telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Seiring tuntutan agar setiap organisasi publik selalu terbuka dan transparan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka organisasi publik harus membuat suatu Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah (Strategik Plan), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan menyusun dokumen perencanaan kinerja diharapkan organisasi mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik dan lebih fokus. Dokumen Perencanaan Kinerja ini antara lain berisikan ringkasan dari rencana strategis dan uraian lebih lanjut dari setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik dan strategi pencapaiannya.

Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang harus dijalankan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang tertuang di dalam Dokumen Perencanaan untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah demi mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

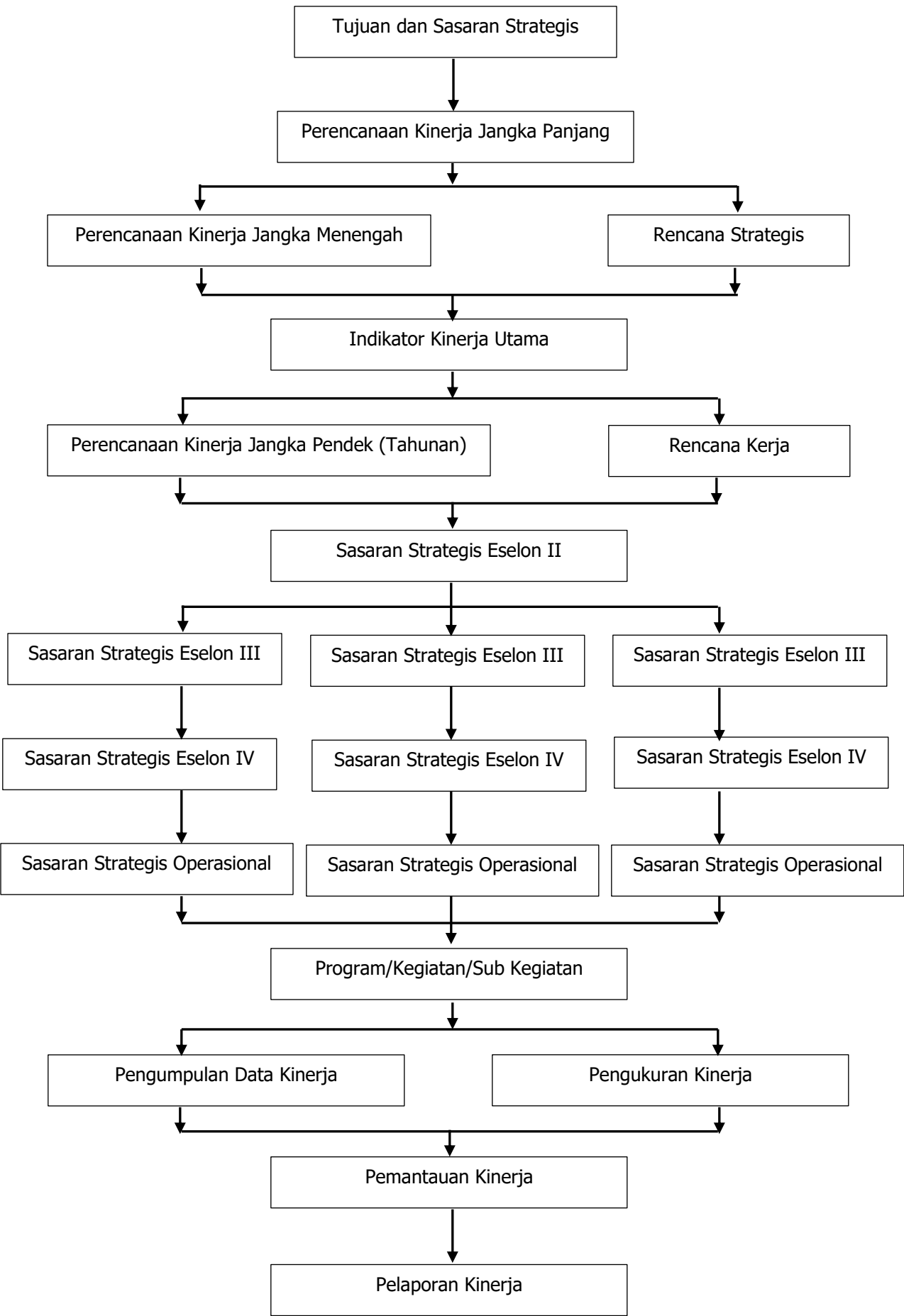
Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menggambarkan kondisi realisasi kinerja dari tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah dalam kurun waktu jangka pendek. Dokumen ini menyediakan dasar bagi *core business* organisasi secara *sustainable* untuk meningkatkan kinerja dari organisasi dan menyediakan kerangka untuk rencana kinerja tahunan selanjutnya.

Penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak terlepas dari pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dari sebuah sistem penganggaran dari Perangkat Daerah. Kaitan dengan anggaran berbasis kinerja tetap harus dipertimbangkan dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran strategis serta strategi pencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem penganggaran. Anggaran Perangkat Daerah dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian

yang diperlukan sehingga tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya juga harus disesuaikan dengan perubahan anggaran tersebut.

Dalam upaya menggali dan memanfaatkan segenap potensi yang ada di bidang Pendapatan Daerah yang dalam pelaksanaannya telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kesemuanya itu bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan serta mempunyai kontribusi positif bagi pertumbuhan perekonomian Sumatera Selatan.

Sehingga secara sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan rangkaian proses yang terstruktur dan terarah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu penyelenggara pemerinatahan daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan sub urusan pendapatan. Adapun bagan alir proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini tergambar pada bagan alir berikut ini :



B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Struktur Organisasi

Secara rinci tugas, pokok, fungsi dan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang keuangan sub pendapatan daerah.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi:

- Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijakan teknis serta program kerja;
- Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan Pendapatan Daerah;
- Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, tata usaha, umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
- Pengkoordinasian yang meliputi segala usaha yang berhubungan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur serta perundang-undangan yang berlaku;
- Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

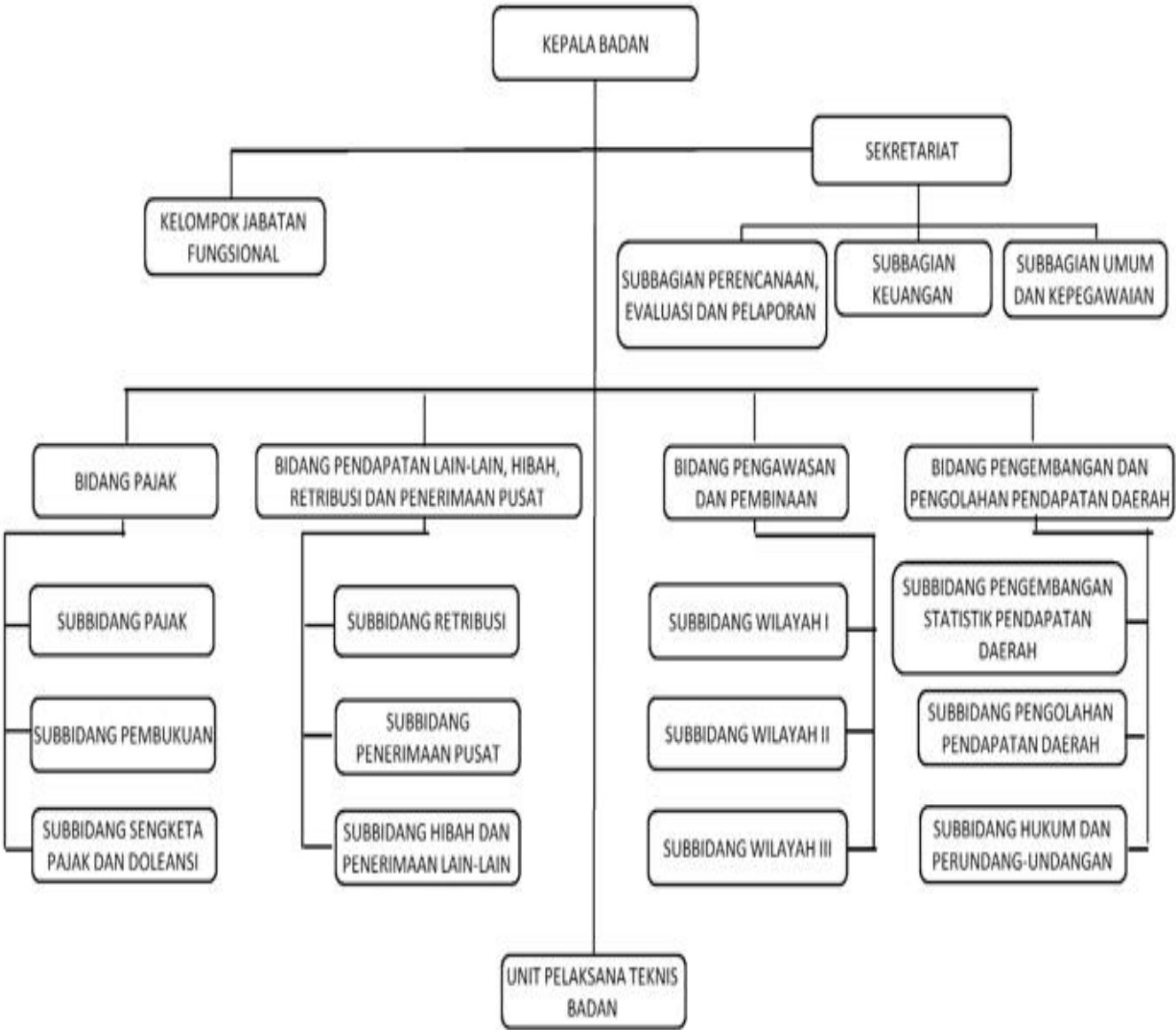
3. Struktur Organisasi

Dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan

berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 dimana struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah disusun sebagai berikut:

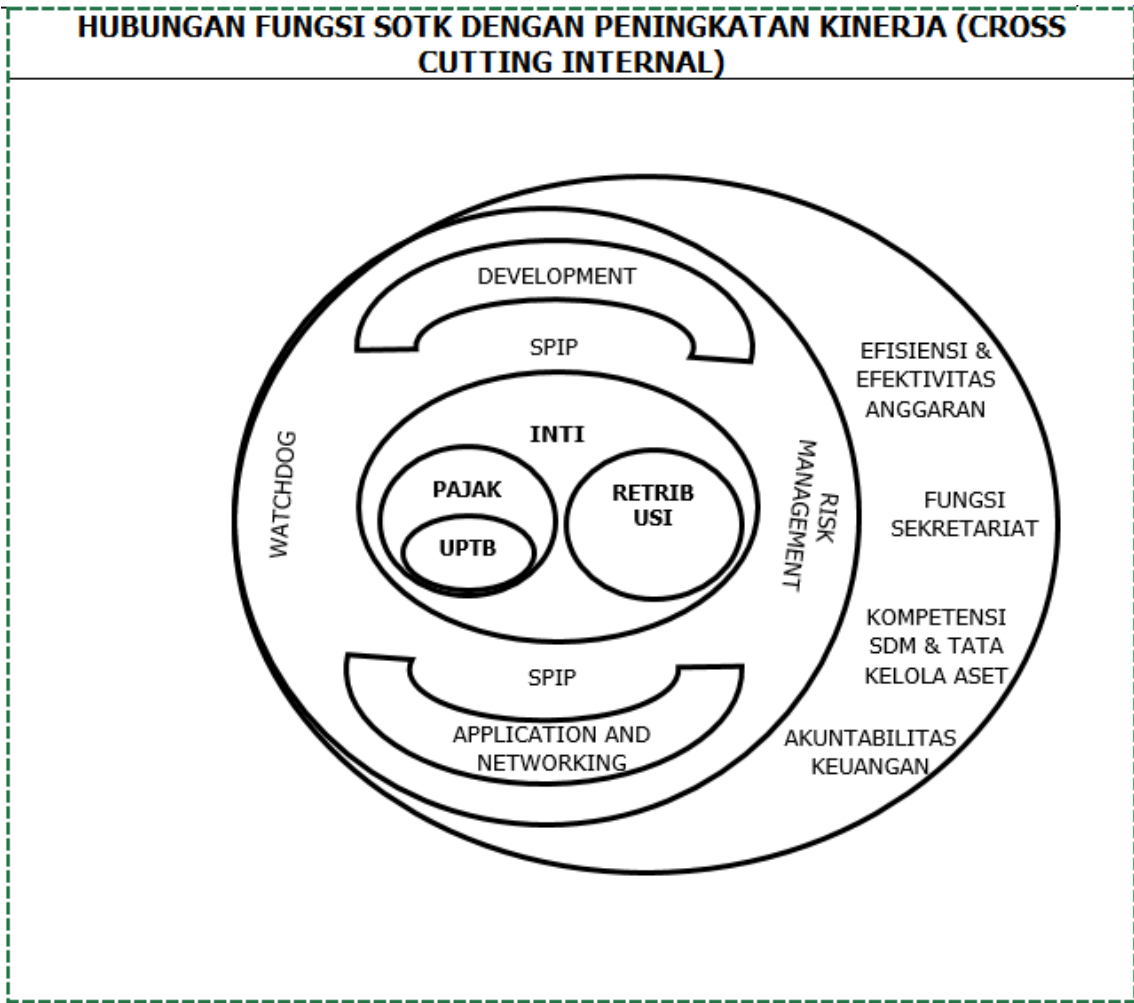
- Kepala Badan
- Sekretariat, membawahi:
 - Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - Subbagian Keuangan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
- Bidang Pajak, membawahi:
 - Subbidang Pajak
 - Subbidang Pembukuan
 - Subbidang Sengketa Pajak dan Doleansi
- Bidang Pendapatan Lain-lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat membawahi:
 - Subbidang Retribusi
 - Subbidang Penerimaan Pusat
 - Subbidang Hibah dan Penerimaan Lain-lain
- Bidang Pengawasan dan Pembinaan, membawahi:
 - Subbidang Wilayah I
 - Subbidang Wilayah II
 - Subbidang Wilayah III
- Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah, membawahi:
 - Subbidang Pengembangan Statistik Pendapatan Daerah
 - Subbidang Pengolahan Pendapatan Daerah
 - Subbidang Hukum dan Perundang-undangan
- Unit Pelaksana Teknis Badan
- Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN



Tata Kerja

Yang dimaksud tata kerja dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini adalah terciptanya hubungan kerja yang kolaboratif antar unit kerja (*internal cross cutting*) untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Hubungan tata kerja yang kolaboratif tersebut digambarkan pada gambar berikut :



Hubungan tata kerja (*internal cross cutting*) sebagai berikut :

1. Bidang Pajak – Bidang P2PATDA Kolaborasi

Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah (P2PATDA) dengan Bidang Pajak, dimana Bidang P2PATDA menggali potensi melalui analisa pengembangan terhadap sumber – sumber dan inovasi dalam pajak daerah, sementara Bidang Pajak membuat kebijakan di sektor pajak antara lain insentif pajak.

Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah (P2PATDA) dengan Bidang Pendapatan Lain Lain, dimana Bidang P2PATDA menggali potensi melalui analisa pengembangan terhadap sumber – sumber dan inovasi dalam retribusi daerah, sementara Bidang Retribusi membuat kebijakan di sektor retribusi antara lain kemudahan dan transparansi dalam pengelolaan retribusi.

2. Bidang Pajak – Bidang Wasbin Kolaborasi

Bidang Pengawasan dan Pembinaan (Wasbin) melakukan pengawasan, pengendalian intern, pemeriksaan terhadap pemungutan pajak daerah sehingga mengurangi risiko atas kesalahan dan berakibat menimbulkan kerugian daerah dalam pengelolaan pajak daerah.

3. Bidang Pajak – UPTB Puslia Kolaborasi

UPTB Pusat Informasi dan Aplikasi (Puslia) menjalankan kebijakan di sektor pajak daerah (Bidang Pajak) dalam penggunaan Sistem Informasi Manajemen di Bidang Pajak, antara lain Sistem Pembayaran Pajak melalui e Dempo, SOS, e signal, SIAPO, e PAP, e PAB, Sistem Pembayaran Pajak melalui e commerce (Tokopedia, Indomaret).

4. Bidang Wasbin – UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kolaborasi

Bidang Pengawasan dan Pembinaan (Wasbin) melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara intensif atau secara berkala kepada UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan dan penetapan pajak daerah.

5. Dan lain lain Bentuk Kolaborasi Antar Unit Kerja

Sekretariat sebagai koordinator, melakukan internal cross cutting terhadap semua Bidang/UPTB untuk pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), kebutuhan anggaran serta kebutuhan sumber daya lainnya dalam meningkatkan kinerja tujuan dan sasaran sasaran strategis Perangkat Daerah.

Hubungan tata kerja (*eksternal cross cutting*) sebagai berikut :

Kelompok sasaran layanan yang menjadi mitra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan antara lain kelompok sasaran wajib pajak kendaraan, perusahaan swasta, BUMN dan BUMD. Dukungan stakeholder yang menjadi mitra Bapenda sangat diperlukan sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah, antara lain :

A. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negera Republik Indonesia menjadi mitra Bapenda dalam hal register nomor kendaraan bermotor.

B. Jasa Raharja

Penggunaan sebagian dana Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dari wajib pajak dapat digunakan sebagai bentuk *corporate social responsibility* untuk kegiatan memberikan pelayanan di samsat.

C. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Penggunaan data terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan sangat memudahkan bagi petugas samsat untuk melihat data tunggakan pajak kendaraan, pajak progresif dan lain sebagainya.

D. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan sebagai mitra Bapenda dapat berkontribusi terhadap penyediaan data kendaraan sebagaimana diatur dalam Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 49431) untuk jenis angkutan barang umum dengan rekomendasi TNKB Umum serta penggunaan kendaraan dengan nomor kendaraan di luar Provinsi Sumatera Selatan lebih dari 90 hari beroperasi di Sumatera Selatan dapat dilakukan mutasi masuk ke Provinsi Sumatera Selatan.

E. OPD Pemangku Retribusi

Beberapa OPD yang secara kewenangannya sebagaimana amanat Undang – undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain : Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Bappeda, Pertanian TPH, Ketahanan Pangan dan Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Energi Sumber Daya Mineral, Perkebunan, Perdagangan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesehatan, Pendidikan, PU Bina Marga dan Tata Ruang, Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata, BPSDM, Badan Penelitian dan Pengembangan serta BPKAD.

Sebagai OPD yang mengelola pendapatan daerah, Bapenda mendorong OPD pemangku retribusi untuk berinovasi menggali sumber – sumber retribusi yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

F. BUMN/BUMD/BUMS

Keberadaan BUMN/BUMD/BUMS sebagai pihak yang bermitra dengan Bapenda memberikan kontribusi dalam penerimaan pendapatan daerah dari sisi penerimaan pajak air permukaan serta penyertaan modal bagi BUMD Provinsi Sumatera Selatan.

G. Perbankan

Pihak perbankan dalam hal ini Bank Sumsel Babel sebagai mitra Bapenda dalam hal akuntabilitas penerimaan pajak dan retribusi daerah.

C. **Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama** (*Strategic Issued*)

Aspek strategis keberadaan organisasi Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melihat perkembangan dinamika yang ada saat ini, maka perencanaan kemampuan keuangan daerah dalam pembangunan daerah memerlukan pendanaan dan pembiayaan yang bersumber pada kemampuan fiskal daerah melalui sumber – sumber pendapatan daerah. Kemandirian otonomi daerah dalam hal mengatur, mengurus dan mengelola kemampuan keuangan daerah yang tercermin pada pengelolaan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana amanat Undang – undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta kebijakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dimana Pendapatan Daerah merupakan semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas, dan akuntable. PAD memegang peranan yang sangat penting dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD, maka akan semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Selain itu, semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat.

Sementara mobilisasi pendapatan (*revenue mobilization*) daerah merupakan salah satu strategi yang mencerminkan kemandirian otonomi daerah dalam mendanai pembangunan dengan mengutamakan sumber-sumber penerimaan daerah antara lain Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai kewenangan untuk memungut Pajak Provinsi yang meliputi : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Sementara permasalahan-permasalahan (*Strategic Issued*) yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan Internal

1.a Tata kelola organisasi belum optimal;

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi UPTB Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan adanya dua peraturan ini semestinya pengelolaan organisasi terutama terkait pemerataan pegawai/sumber daya manusia pada seluruh unit kerja/UPTB bisa dioptimalkan, namun kondisi pada saat ini belum bisa optimal dikarenakan belum meratanya distribusi pegawai/SDM pada seluruh unit kerja/UPTB Bapenda.

1.b Belum optimalnya upaya intensifikasi pendapatan daerah diluar pajak

Apabila dilihat dari pencapaian penerimaan pendapatan daerah pada komponen PAD tahun 2024, kontribusi terbesar adalah sektor pajak dengan rata-rata kontribusi 89,31% sedangkan non pajak hanya berkontribusi 10,69 %. Dari komposisi pembentuk PAD ini dapat diketahui bahwa PAD Prov.Sumsel sangat bergantung pada sektor pajak, sementara kontribusi dari retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (pengelolaan BUMD) masih jauh dari kondisi yang diharapkan. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya pengelolaan

pendapatan sektor non pajak terutama sektor retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (BUMD), sehingga dibutuhkan upaya, inovasi dan kebijakan yang tepat untuk dapat mengoptimalkan potensi sumber PAD dari retribusi dan pengelolaan BUMD.

1.c Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi

Kemajuan teknologi selayaknya dapat kita manfaatkan untuk mempermudah seluruh aktivitas, begitu juga dengan pengelolaan pendapatan daerah. Kebutuhan akan sistem/aplikasi yang mumpuni mutlak diperlukan untuk menunjang pengelolaan pendapatan daerah. Pengelolaan pendapatan daerah dilakukan Bapenda bersama dengan mitra kerja pengelolaan pendapatan daerah yakni institusi Polri, Jasa Raharja dan Bank Sumselbabel dalam pengelolaan SAMSAT. Untuk pengelolaan Non SAMSAT dilakukan bersama institusi Sat POL PP, Perangkat Daerah Pengelola Retribusi dan BUMD. Pembangunan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendapatan daerah mutlak harus dilakukan untuk dapat mengakomodir seluruh kebutuhan institusi mitra pengelolaan pendapatan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pendapatan daerah. Dengan adanya aplikasi/sistem yang mumpuni dengan segala kemudahannya maka akan terwujud pengelolaan pendapatan daerah yang efektif dan efisien yang pada ujungnya akan mampu mendorong pencapaian pendapatan daerah. Saat ini Aplikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah yang dikembangkan masih tentang pada pengelolaan Samsat, Untuk pengelolaan Non Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah yang dikembangkan.

1.d Perlu adanya revisi Peraturan Daerah terkait belum terakomodirnya upaya-upaya optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah; Retribusi Daerah serta peraturan-peraturan daerah lainnya terkait dengan optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah sehingga diperlukannya kegiatan pemetaan potensi Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah yang akan diakomodir dengan aturan yang berlaku.

- 1.e Kurangnya kualitas dan kinerja Sumber Daya Manusia
- Sumber Daya Manusia yang berkualitas menjadi aspek penting dalam pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Sumber daya manusia yang berkompetensi dapat memberikan gambaran analisis serta dapat menggali potensi sumber – sumber pendapatan daerah.
- 1.f Pengawasan internal belum berbasis risiko
- Manajemen wajib menganalisis risiko-risiko yang menghambat pencapaian tujuan organisasi. Manajemen agar memfokuskan pengambilan kebijakan pada kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko tinggi. Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan dalam kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap upaya penerimaan Pendapatan Daerah, keuangan, SDM ataupun standarisasi mutu pelayanan. Peran pengawasan dan pembinaan dalam konteks Satuan Pengawas Internal Organisasi sangat diperlukan.
- 1.g Belum optimalnya penerapan dan evaluasi SOP kepada wajib pajak dengan program penjaminan mutu pelayanan
- Pelayanan terhadap wajib pajak harus berdasarkan pada standar yang telah ditetapkan. Standarisasi pelayanan di Bapenda Provinsi Sumatera Selatan belum dilakukan dengan baik sehingga perlu dilakukan upaya perumusan, penyusunan, pengaplikasian dan pengevaluasian standar-standar pelayanan yang merupakan bagian dari pengawasan dan pembinaan organisasi.
- 1.h Belum optimalnya sarana prasarana penunjang pelayanan wajib pajak.
- Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Bapenda Provinsi Sumatera Selatan dan UPTB masih belum sesuai standar yang berlaku.
- 1.i Peta proses bisnis internal belum dilaksanakan secara optimal
- Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pencapaian standar Bapenda Provinsi Sumatera Selatan.

Peta proses bisnis mengumpulkan seluruh informasi dengan melibatkan seluruh elemen organisasi untuk memastikan akurasi dan kelengkapan proses bisnis disusun. Peta Proses Bisnis menjadi standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan, selain itu peta proses bisnis dapat digunakan untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses menjadi lebih terarah.

- 1.j Jangkauan pemberian pelayanan kepada wajib pajak masih belum optimal.

Luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan dengan dinamika keberadaan wajib pajak yang tersebar di seluruh pelosok wilayah Sumatera Selatan, termasuk wilayah *captive area* menjadikan tantangan tersendiri dalam mengejar target pendapatan daerah dari sisi pajak daerah. Pembentukan unit layanan saat ini sudah 29 unit layanan yang tersebar dalam wilayah 17 kabupaten/kota se Sumatera Selatan dirasakan belum juga optimal dikarenakan berada di pusat kota, sementara jangkauan layanan wajib pajak menyentuh wilayah perairan pedalaman Sumatera Selatan.

- 1.k Belum optimalnya digitalisasi pembayaran pajak daerah

Peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan elektronifikasi pemerintah daerah antara lain digitalisasi pembayaran pajak daerah belum memadai. 7 (tujuh) kanalisasi dalam pembayaran non tunai yang diharapkan oleh Pemerintah Pusat segera terpenuhi pada pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Permasalahan Eksternal

- 2.a Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dalam mematuhi kewajiban terhadap pembayaran pajak sangat menentukan pencapaian target Pendapatan Daerah. Upaya sosialisasi dan penyuluhan pajak yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir belum banyak meningkatkan kesadaran wajib pajak.

- 2.b Masih rendahnya kontribusi instansi pengelola retribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah;

Dari 13 (tiga belas) Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah pada tahun 2024, sudah 10 (delapan) Perangkat Daerah yang capaian realisasinya melebihi target ($>100\%$) dan 3 Perangkat Daerah lainnya belum mencapai target ($<100\%$). Upaya intensifikasi koordinasi dengan Perangkat Daerah pengelola Retribusi Daerah telah dilakukan secara optimal hal ini ditunjukkan dengan capaian realisasi yaitu sebesar Rp. 8.283.459.488,00 (110,67%) dari target sebesar Rp. 7.484.658.673,00.

2.c Iklim ekonomi yang tidak stabil

Adanya pengaruh resesi pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid-19* sehingga menyebabkan iklim ekonomi masyarakat tidak stabil. Kondisi ini menyebabkan penurunan kemampuan daya beli masyarakat terhadap pembelian kendaraan baru yang berdampak terhadap penerimaan pajak serta terjadinya tunggakan Pajak Daerah sehingga penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah tidak optimal.

2.d Belum optimalnya penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Sumbangan pihak ketiga sebagai salah satu unsur penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan penerimaan hibah sehingga tidak dapat ditargetkan. Realisasi penerimaan merupakan hasil pendekatan persuasif kepada BUMN, BUMD ataupun BUMS yang terdapat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

2.e Pengaruh kebijakan nasional dibidang keuangan pusat dan daerah.

Amanat Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pendapatan daerah. Dengan diberlakukannya undang-undang dimaksud, adanya opsen sebagai tambahan pungutan pajak menurut persentase tertentu, Bea Balik Nama (BBN) Mutasi pajak yang di gratiskan, namun ada juga tambahan opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta beberapa potensi retribusi yang hilang di beberapa OPD terkait.

- 2.f Operasional alat angkutan berat atau kendaraan barang banyak yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Selatan.
- Perlu adanya pengaturan operasional angkutan barang dari sisi hulunya, sehingga kendaraan angkutan barang yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Selatan ikut berkontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun

2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
19. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi UPTB di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

E. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bentuk format pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan terhadap pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKjIP ini dimaksudkan untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah untuk melaksanakan *good government* karena LKjIP merupakan dasar untuk mengatur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis, dan dapat di pertanggungjawabkan;
2. Memberikan masukan bagi pihak-pihak berkepentingan (*stakeholders*) dengan instansi pemerintah;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah.

Uraian maksud diatas menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisikan program perencanaan strategis dan sekaligus merupakan pengukuran terhadap pelaksanaan dari semua program kegiatan

serta sub kegiatan sehingga dapat mengetahui sampai sejauh mana pencapaian kualitas kinerja pada tahun 2024.

Sementara tujuan disusunnya LKjIP ini adalah sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selain itu penyusunan LKjIP juga mengacu dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyajian penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :

Bab I Pendahuluan, pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II Perencanaan Kinerja, pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

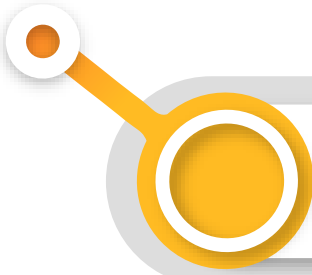
B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain – lain yang dianggap perlu



BAB II PERENCANAAN KINERJA



A. Telaaha Visi dan Misi

Perencanaan Kinerja berpedoman pada RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 - 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025. Dalam rangka mencapai visi tersebut, maka dilaksanakan dengan upaya 4 (empat) misi yaitu, (1) menjadikan Sumatera Selatan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi regional, (2) meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam guna penyediaan sumber energi dan pangan yang berkelanjutan, (3) mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas, dan (4) meningkatkan kapasitas manajemen pemerintahan.

Arah Pembangunan tahap keempat dalam RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 ini difokuskan untuk memantapkan perwujudan masyarakat Sumatera Selatan yang mandiri, maju, sejahtera, lestari, unggul dan terdepan. Fokus pembangunan ini dilaksanakan melalui akselerasi pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Sumatera Selatan yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sesuai fokus pembangunan maka arah pembangunan melingkupi beberapa poin sebagai berikut:

1. Memantapkan pertumbuhan ekonomi dan menegaskan arah pembangunan ekonomi
2. Memantapkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
3. Pembangunan yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan
4. Pembangunan pemerintahan yang adil, jujur, bersih, dan bertanggung jawab

Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang berkaitan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah adalah: Misi ke 3 (tiga) “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif”. Selanjutnya misi ke 3 (tiga) telah dijabarkan dalam beberapa program kerja sebagai berikut :

1. Membangun hubungan administrasi pemerintah yang lebih harmonis dengan Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan sebagai bagian dari proses reformasi birokrasi.
2. Mendorong pengutamaan kepentingan publik oleh pelayanan publik dengan pelayanan birokrasi yang berbasis teknologi informasi.
3. Revitalisasi infrastruktur pelayanan publik, baik secara manual maupun online.
4. Membangun jaringan interkoneksi layanan publik yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, yang bisa di akses oleh publik secara online 24 jam/hari, 7 hari/minggu.
5. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah di semua bidang.
6. Menciptakan pelayanan publik secara terpadu, cepat dan mudah.
7. Melibatkan unsur LSM/Ormas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh lembaga pemerintahan.
8. Mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintahan dalam rangka pencegahan terhadap tindak korupsi dan tindakan penyelewengan guna menciptakan pemerintahan yang baik (*good government*).
9. Menempatkan posisi semua *stakeholder* (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bupati dan Walikota) di Sumatera Selatan dalam satu kepentingan pembangunan Sumatera Selatan Maju.
10. Memfasilitasi forum kepala daerah se-Sumatera Selatan dengan menjadwalkan pertemuan rutin dalam jangka waktu tertentu.
11. Melakukan kunjungan ke semua daerah secara berkala untuk penyerapan aspirasi dan mendorong keunggulan potensi masyarakat.
12. Melibatkan institusi pendidikan tinggi di daerah sebagai *think tank* pembangunan daerah.
13. Menjadikan lembaga pers dan media massa sebagai mitra dalam pembangunan daerah.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Berdasarkan Visi dan Misi diatas maka tujuan dan sasaran strategis pembangunan bidang Pendapatan Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja jangka menengah atau Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan dalam matriks tahapan sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

1. Unit Eselon II Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Unit Eselon II			TARGET AKHIR
				2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	91,97	92,03	92,21	92,21
2.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi	%	4,00	5,00	6,00	6,00
3.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	%	0,95	0,96	0,98	0,98
		Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	Rasio	1,00	1,12	1,18	1,18

2. Bidang Pajak

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Unit Eselon III Bidang Pajak			TARGET AKHIR
				2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Target Terhadap GDP	%	1,5	1,61	1,73	1,73
2.	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	%	14,26	14,53	14,81	14,81
3.	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	%	5,3	5,19	5,02	5,02
4.	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	%	100	100	100	100

3. Bidang Pendapatan Lain – Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Unit Eselon III Bidang PDLL			TARGET AKHIR
				2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	%	94,97	95,12	95,43	95,43
2.	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	%	89,14	89,45	89,78	89,78
3.	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	%	83,48	83,71	83,93	83,93
4.	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	%	84,15	84,42	84,83	84,83

4. Bidang Pengawasan dan Pembinaan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Unit Eselon III Bidang Wasbin			TARGET AKHIR
				2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	%	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2.	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	%	92,46	92,64	92,91	92,91
3.	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	%	17,28	17,03	16,85	16,85
4.	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan dalam Pelaksanaan Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	%	13,02	12,88	12,74	12,74

5. Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Unit Eselon III Bidang P2PATDA			TARGET AKHIR
				2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Penggalian Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	%	81,63	81,89	82,19	82,19
2.	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	%	83,48	83,69	83,81	83,61
3.	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama	%	93,28	93,41	93,62	93,62
4.	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	%	100	100	100	100

6. Sekretariat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Unit Eselon III Sekretariat			TARGET AKHIR
				2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	%	94,62	94,83	94,96	94,96
		Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	%	5,13	5,02	4,92	4,92
		Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	%	80,61	80,78	80,92	80,92

7. UPTB Pusat Informasi dan Aplikasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Unit Eselon III UPTB Puslia			TARGET AKHIR
				2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	%	62,04	62,34	62,67	62,67
2.	Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	Persentase Meningkatnya Kerjasama	%	91,12	91,32	91,54	91,54
3.	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	%	78,82	78,93	79,21	79,21
4.	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	%	41,23	41,46	41,78	41,78
5.	Meningkatnya Kecepatan Internet	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs	MBPs	100	100	100	100

8. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Unit Eselon III UPTB PPD			TARGET AKHIR
				2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	%	100	100	100	100
2.	Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggakan Pajak	%	9,13	8,87	8,62	8,62
3.	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	%	9,81	9,72	9,60	9,60

c. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan serta sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja diperoleh melalui hasil analisa *cascading* atau penjenjangan pohon kinerja yang dimulai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Mendasari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD), selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2024 – 2026. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dokumen RPD dengan menjawab isu strategis, tantangan dan peluang sektor pendapatan dan permasalahan yang ada. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi RPJMD, dapat dicapai melalui salah tujuan Badan Pendapatan Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan. Tujuan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 - 2026 adalah "Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi".

Indikator pada Tujuan yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Tujuan Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 - 2026 disusun sebagai indikator kinerja outcomes dan bukan merupakan indikator kinerja output.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound and continuously improve* (SMART-C), maka sasaran harus mempunyai

indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien.

Sasaran strategis pendapatan daerah merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu kinerja outcome/impact dari beberapa program nomenklatur, kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dari sasaran strategis pendapatan dalam RPD Tahun 2024 – 2026 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pendapatan tahun 2019 - 2023 serta menjabarkan tujuan dan sasaran strategis dalam RPD. Dengan berlandaskan pada isu strategis dimaksud dan capaian /kesinambungan terhadap Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 – 2026.

Berdasarkan dokumen perencanaan kinerja Bapenda yang telah disusun baik untuk jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, maka ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024 akan menjelaskan rumusan hasil indikator kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		JENIS INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah		IKU	91,97 %
2.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi (Nilai absolut)		IKU	4,00
3.	Meningkatnya Kontribusi Terhadap PDRB PAD	1.	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	IKU	0,95
		2.	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	IKU	1,00

2. Indikator Kinerja Sasaran Intermediate Outcomes Level 1 Eselon III

a. Bidang Pajak

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap GDP	Indikator Kinerja Outcomes	1,5 %
2.	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	14,26 %
3.	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	Indikator Kinerja Outcomes	5,3 %
4.	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	Indikator Kinerja Outcomes	100 %

b. Bidang Pendapatan Lain lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	Indikator Kinerja Outcomes	94,97 %
2.	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	Indikator Kinerja Outcomes	89,14 %
3.	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	Indikator Kinerja Outcomes	83,48 %
4.	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	Indikator Kinerja Outcomes	84,15 %

c. Bidang Pengawasan dan Pembinaan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	Indikator Kinerja Outcomes	Level 3
2.	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	Indikator Kinerja Outcomes	92,46 %
3.	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	Indikator Kinerja Outcomes	17,28 %

4.	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan dalam Pelaksanaan Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	Indikator Kinerja Outcomes	13,02 %

d. Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya Penggalan Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	81,63 %
2.	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	83,48 %
3.	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama	Indikator Kinerja Outcomes	93,28 %
4.	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	Indikator Kinerja Outcomes	100 %

e. Sekretariat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		JENIS INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawabana Keuangan	Indikator Kinerja Outcomes	94,62 %
		1.2	Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	Indikator Kinerja Outcomes	5,13 %
		1.3	Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	80,61 %

f. UPTB Pusat Informasi dan Aplikasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Indikator Kinerja Outcomes	62,04 %
2.	Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	Persentase Meningkatnya Kerjasama	Indikator Kinerja Outcomes	91,12 %
3.	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	Indikator Kinerja Outcomes	78,82 %
4.	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Indikator Kinerja Outcomes	41,23 %
5.	Meningkatnya Kecepatan Internet	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs	Indikator Kinerja Outcomes	100 MBPs

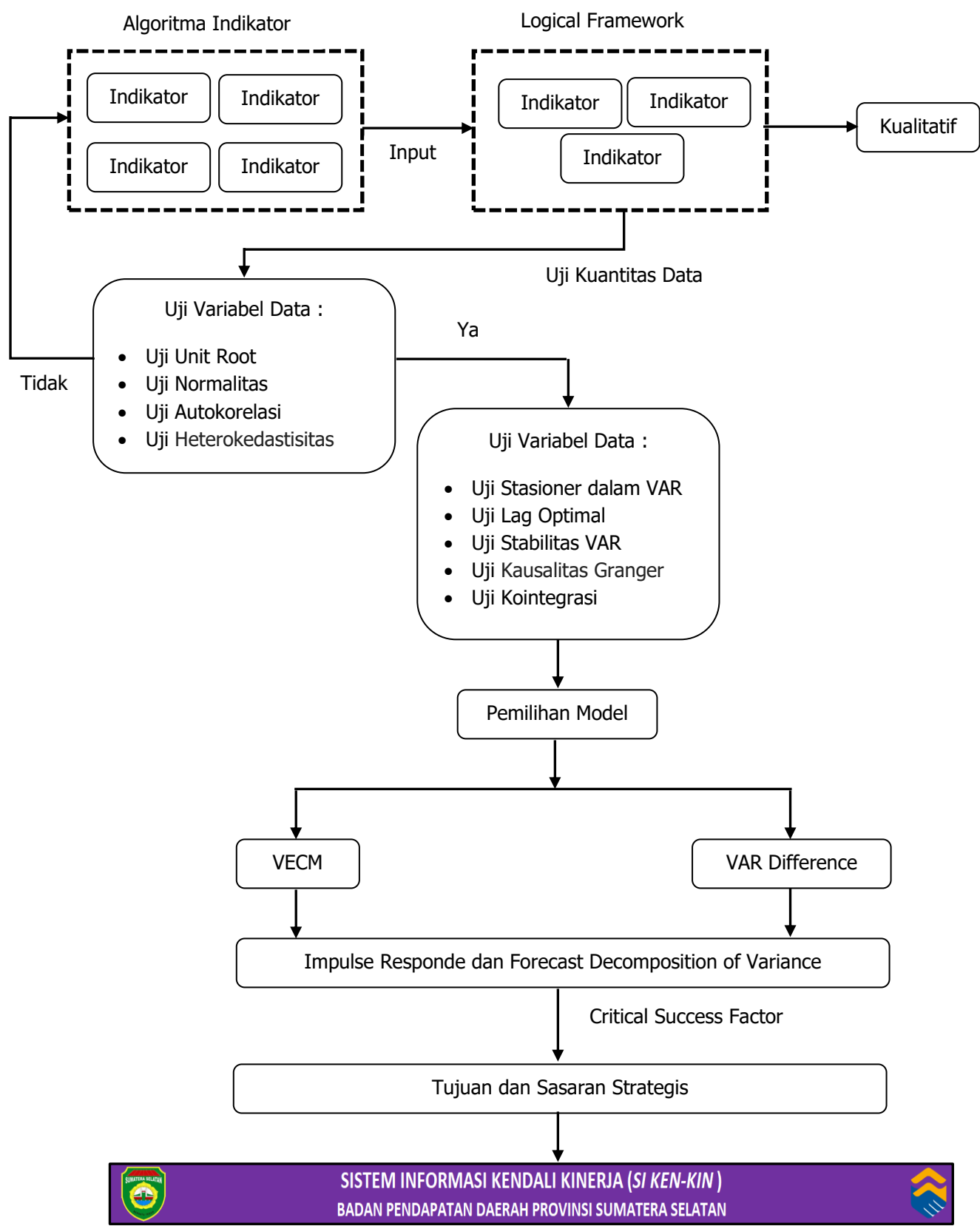
g. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	Indikator Kinerja Outcomes	100 %
2.	Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggakan Pajak	Indikator Kinerja Outcomes	9,13 %
3.	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	9,81 %

D. Teknik Analisa Data Indikator

Metodologi yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi kinerja, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menggunakan alat dan teknik analisis dengan software evIEWS versi 13 dan Sistem Informasi Kendali Kinerja (SI KEN-KIN) dengan metodologi sebagai berikut :

1. Melakukan analisis data indikator dengan melakukan pembuktian secara kuantitatif



Pada tahapan ini, semua indikator yang telah disusun berdasarkan penjenjangan atau cascading, mulai dari Indikator Tujuan, Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO) Level 1, IKSSO Level 2 dan seterusnya sampai dengan indikator kinerja output sub kegiatan.

2. Membuat Indikator Index Level Data

INDEX	INDIKATOR	LEVEL	PEMILIK		
IKSS1	Persentase Pencapaian Penerimaan PAD	Sasaran Strategis 1	Kepala Daerah	Badan	Pendapatan
IKSS2	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Non DAU dan DAK	Sasaran Strategis 2	Kepala Daerah	Badan	Pendapatan
IKSS3	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi (Nilai absolut)	Sasaran Strategis 3	Kepala Daerah	Badan	Pendapatan
IKSS4	Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	Sasaran Strategis 4	Kepala Daerah	Badan	Pendapatan
IKSS5	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	Sasaran Strategis 5	Kepala Daerah	Badan	Pendapatan
IKSS6	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Sasaran Strategis 6	Kepala Daerah	Badan	Pendapatan
IKSSO1	Persentase Realisasi Penerimaan Target Terhadap GDP	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala Bidang Pajak		
IKSSO2	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala Bidang PDLL		
IKSSO3	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala	Bidang	Pengawasan dan Pembinaan
IKSSO4	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala Bidang P2PATDA		
IKSSO5	Persentase Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Sekretaris Badan		
IKSSO6	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala UPTB Puslia		
IKSSO7	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala UPTB PPD		
IKSSO8	Persentase Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Pajak		
IKSSO9	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Doleansi		
IKSSO10	Persentase meningkatnya ikhtisar pembukuan pajak	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Pembukuan		
IKSSO11	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Retribusi		
IKSSO12	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala	Subbid	Penerimaan Pusat

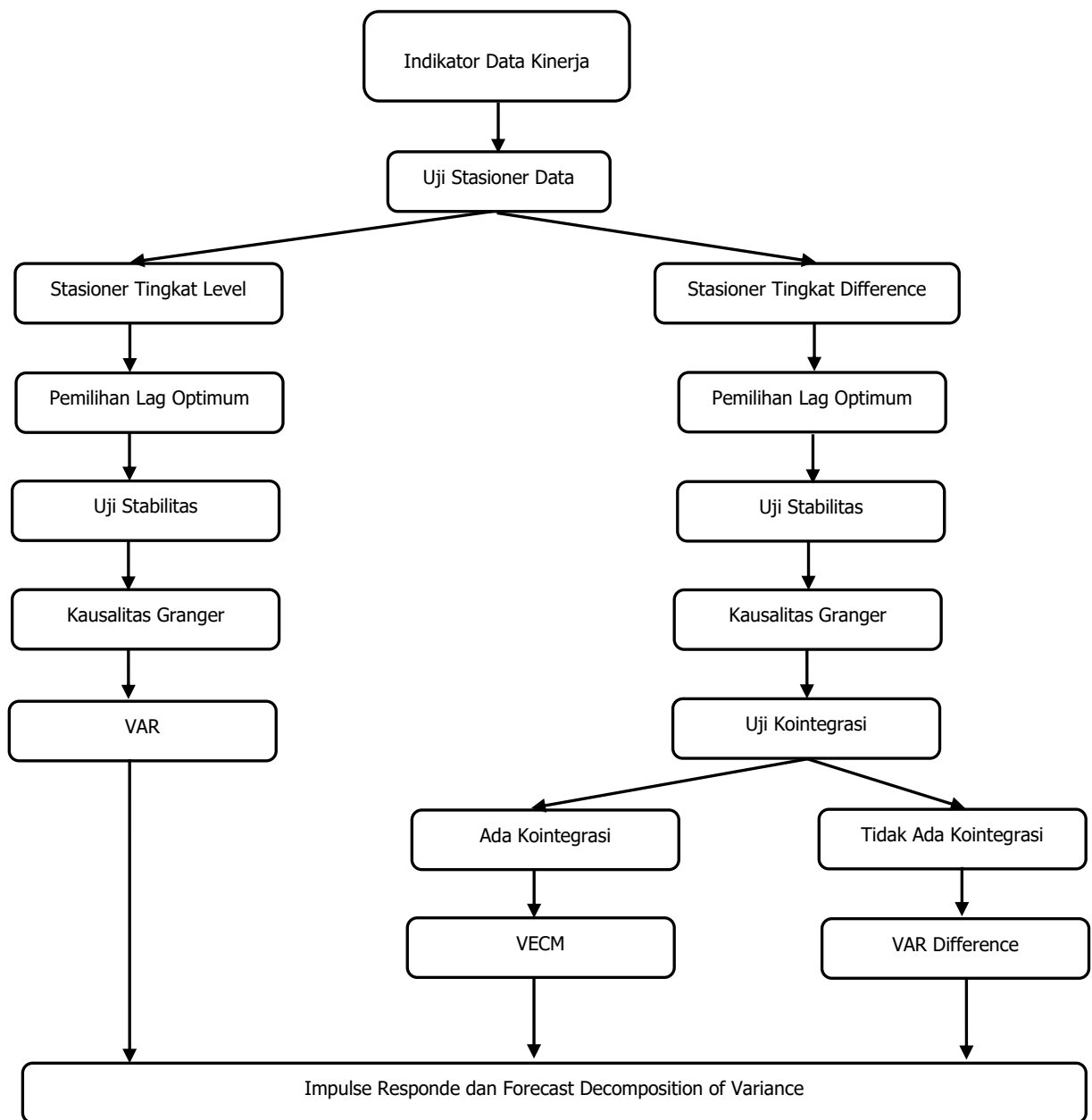
IKSSO13	Persentase Hibah	Meningkatnya	Penerimaan	Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Subbid Hibah
IKSSO14	Persentase Pemeriksaan	Meningkatnya	Intensitas	Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Subbid Wilayah I
IKSSO15	Persentase Penyelesaian	Berkurangnya	Tindak Lanjut	Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Subbid Wilayah II
IKSSO16	Persentase Refresif	Berkurangnya	Tindakan	Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Subbid Wilayah III
IKSSO17	Persentase Objek Penelitian	Meningkatnya	Penelitian	Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Subbid Statistik
IKSSO18	Persentase	Meningkatnya	Kerjasama	Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Subbid Pengolahan Pendapatan
IKSSO19	Persentase yang Diharmonisasi	Meningkatnya	Peraturan	Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Subbid Hukum
IKSSO20	Persentase Pertanggungjawaban Keuangan	Meningkatnya	Akuntabilitas	Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Subbag Keuangan
IKSSO21	Persentase Penggunaan Anggaran	Efisiensi dan	Efektifitas	Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Subbag Perencanaan
IKSSO22	Persentase Sumber Daya Peningkatan Pendapatan Daerah	Meningkatnya	Kompetensi	Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
IKSSO23	Persentase	Meningkatnya	Kerjasama	Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Subbag TU UPTB Puslia
IKSSO24	Persentase Digitalisasi	Meningkatnya	Penggunaan	Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Seksi Jaringan UPTB Puslia
IKSSO25	Persentase Keamanan Data Informasi	Meningkatnya	Sistem	Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Seksi Keamanan Data dan Informasi UPTB Puslia
IKSSO26	Persentase Pajak	Berkurangnya	Tunggakan	Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Seksi Penagihan UPTB PPD
IKSSO27	Persentase Perhitungan Penetapan Pajak Daerah	Berkurangnya	Kesalahan	Sasaran Outcomes	Strategis Level 2	Kepala Seksi Penetapan UPTB PPD

3. Persamaan Data

Untuk melakukan running data, persamaan data pada masing indikator index yang telah ditetapkan harus dilakukan standarisasi dengan computasi data ke logaritma natural (ln) sehingga data mempunyai level pembacaan yang sama pada software evIEWS versi 13.

4. Tahapan Pemilihan Model

Pemilihan model yang cocok pada kinerja Badan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggunakan metodologi tahapan sebagai berikut :



Metodologi yang digunakan dalam menguji kuantitatif indikator kinerja ini bertujuan untuk melihat hubungan kausalitas (sebab-akibat) dan/atau (jika-maka) antar indikator dalam mendukung tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Teknik analisis yang digunakan dengan *vector error correction model* (VECM) yaitu pengembangan dari vector autoregression model dimana terdapat kointegrasi antar variable.

- a. Uji Stasioneritas dalam VAR menggunakan uji akar – akar (unit root test) dengan metode Augmented Dickey Fuller Test (ADF Test). Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka data tidak mengandung akar unit yang artinya data stasioner.
- b. Uji lag optimal dilihat dari nilai Akaike Information Criteria (AIC) yang paling minimum

- c. Uji stabilitas VAR, stabilitas VAR perlu diuji dahulu sebelum melakukan analisis yang lebih jauh. Model VAR dinyatakan stabil jika rootnya memiliki nilai modulus kurang dari 1 (satu).
- d. Uji kausalitas granger dilakukan untuk mengetahui apakah suatu variable endogen dapat diperlakukan sebagai variable eksogen. Hal ini bermula dari ketidaktahuan keterpengaruhannya antar variable. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka ada hubungan kausalitas.
- e. Uji kointegrasi untuk mengetahui apakah akan terjadi keseimbangan dalam jangka panjang yaitu terdapat kesamaan pergerakan dan stabilitas hubungan diantara variable-variabel di dalam metodologi ini atau tidak. Uji kointegrasi dilakukan dengan menggunakan metode Johansen's Cointegration Test. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05 berarti terdapat persamaan kointegrasi yang berarti memiliki keseimbangan jangka panjang.

Model analisis yang digunakan dalam metodologi ini dengan pendekatan hubungan variabel dinamis dengan model faktor koreksi kesalahan (VECM) model, uji stasioner, kausalitas Granger dan kointegrasi yang terdiri dari (1) model pertama akan menjelaskan bagaimana hubungan antara Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes Level 1; (2) model kedua akan menjelaskan bagaimana hubungan antara Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes Level 1 dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes Level 2; (3) model ketiga akan menjelaskan bagaimana hubungan antara Indikator Kinerja Sasaran Strategis Level 1 dan Level 2 secara bersama-sama mempengaruhi Indikator Kinerja Sasaran Strategis.

Uji akar unit pada metodologi ini menggunakan rumusan yang dikembangkan oleh Levin dkk (2002) dan Im dkk (2005). Persamaan uji akar unit Levin dkk (2002) dan Im dkk dengan mempertimbangkan kriteria Augmented Dickey Fuller (ADF test) sebagai berikut :

$$\Delta \ln Y_t = \rho_t Y_{t-1} + \sum_{j=1}^{\rho_t} \delta_{t,j} \Delta \ln Y_{t-j} + \varepsilon_t \quad (1)$$

Dimana : Y merupakan vektor dari variabel endogen utama dalam metodologi ini yaitu tujuan Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO) Level 1 dan IKSSO Level 2. Uji unit akar oleh Levin dkk. (2002) dengan asumsi bahwa akurasi

parameter p , identik dalam deret waktu (yaitu, p , p untuk semua t), sedangkan urutan lag p , dapat bervariasi secara bebas. Prosedur ini menguji hipotesis nol $p = 0$ untuk semua t terhadap hipotesis alternatif $p < 0$ untuk semua t . Penolakan hipotesis nol menunjukkan kemungkinan dilanjutkannya proses integrasi data dan sebaliknya.

Uji unit akar oleh Im et al. (2005) yang juga berdasarkan persamaan (1), berbeda dengan uji unit akar Levin dkk. (2002), dengan asumsi ρ menjadi heterogen antar bagian. Uji unit akar oleh Im et al. (2005) pengujian hipotesis nol diterima jika $p_t = 0$ terhadap hipotesis alternatif $p < 0$, ($t=1, \dots, t$); $p = 0$, ($t=t, \dots, t$) untuk semua t . Penerimaan hipotesis alternatif memungkinkan rangkaian individu untuk diintegrasikan. Uji unit root oleh Levin dkk. (2002) dan Im dkk. (2005) dapat diestimasi pada data pada level dan first differential dalam bentuk logaritma natural ($\ln$).

Secara empiris metodologi ini untuk melihat dampak secara kausalitas terhadap Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO) Level 1 dan IKSSO Level 2 terhadap tujuan Perangkat Daerah dalam jangka pendek dan panjang, metodologi ini juga menggunakan uji kointegrasi, untuk melihat kemungkinan maksimal uji kointegrasi Johansen (Verbeek, 2012) untuk mengetahui hubungan jangka pendek dan panjang antar variabel-variabel data yang diteliti. Dalam pengecekan Granger analisis kausalitas juga perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang baik dari hasil pengujian dengan memilih panjang lag optimal yang tepat. Kerangka kointegrasi Johansen mengambil titik awalnya pada model koreksi kesalahan vektor (VECM), sedangkan persamaannya dapat ditampilkan sebagai berikut :

$$x_t = A_1 x_{t-1} + \dots + A_p x_{t-p} + B y_t + \varepsilon_t \quad (2)$$

Dimana: x , adalah vektor variabel data endogen, dan A mewakili matriks autoregresif. y , adalah vektor deterministik dan B mewakili matriks parameter. E adalah vektor inovasi dan p adalah panjang lag.

Untuk mengungkap arah kausalitas antara Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO) Level 1 dan IKSSO Level 2 terhadap tujuan Perangkat Daerah dalam konteks variabel data. Maka model persamaan kausalitas VECM Granger dapat dilihat sebagai berikut :

$$\Delta \ln IKSS1_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSS1_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSS1_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO1_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO1_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO2_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO2_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO3_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSSO3_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO4_t} \pi_{6t,l} \Delta \ln IKSSO4_{t-1} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (3)$$

$$\Delta \ln IKSSO1_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO1_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO1_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO8_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO8_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO9_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO9_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO10_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSSO10_{t-1} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (4)$$

$$\Delta \ln IKSSO2_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO2_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO2_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO11_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO11_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO12_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO12_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO13_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSSO13_{t-1} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (5)$$

$$\Delta \ln IKSSO3_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO3_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO3_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO14_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO14_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO15_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO15_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO16_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSSO16_{t-1} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (6)$$

$$\Delta \ln IKSSO4_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO4_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO4_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO17_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO17_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO19_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO19_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO20_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSSO20_{t-1} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (7)$$

$$\Delta \ln IKSSO5_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO5_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO5_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO20_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO20_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO21_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO21_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO22_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSSO22_{t-1} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (8)$$

$$\Delta \ln IKSSO6_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO6_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO6_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO23_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO23_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO24_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO24_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO25_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSSO25_{t-1} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (9)$$

$$\Delta \ln IKSSO7_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO7_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO7_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO26_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO26_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO27_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO27_{t-1} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (10)$$

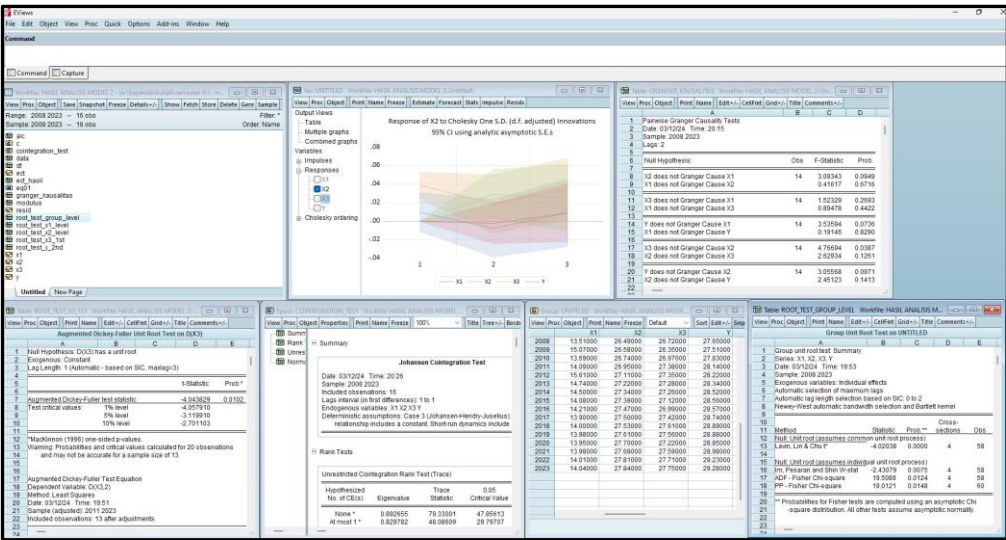
Dimana t adalah periode waktu ($t = 1, \dots, t$); l lag dari setiap variabel data; lnIKSS adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis; lnIKSSO adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes Level 1 dan IKSSO Level 2; EC adalah koreksi kesalahan dan $\varepsilon_1 \varepsilon_2 \varepsilon_3$ mengasumsikan tingkat kesalahan pada model (istilah kesalahan).

Menurut Lopez & Weber (2017) akan diperoleh beberapa kemungkinan mengenai nilai koefisien masing-masing variabel data tersebut, yaitu (i) misalnya pada persamaan pertama hanya terjadi kausalitas antara IKSS dan IKSSO Level 1 dan IKSSO Level 2 terhadap tujuan Perangkat Daerah, artinya hanya γ , 0 (penolakan hipotesis nol), sedangkan semua hipotesis β_{1t} dan $\theta_{1t} = 0$ berarti antara IKSS, IKSSO Level 1 dan IKSSO Level 2 dan Y

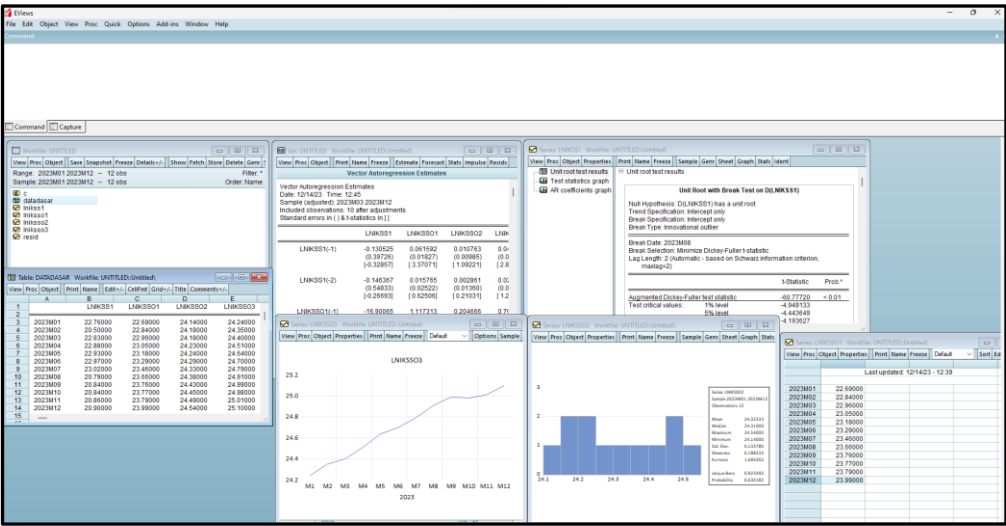
tidak ada hubungan sebab akibat satu sama lain (penerimaan hipotesis nol), hal ini menunjukkan paling sedikit ada satu hubungan atau yang lainnya; (ii) penerimaan hipotesis nol terjadi, jika semua probabilitas berada pada $\gamma_{1t} \beta_{1t} \delta_{1t} = 0$, yang berarti tidak ada satu pun variabel yang memiliki hubungan sebab akibat yang baik dalam arah yang sama (berarah) atau dua arah (dua arah); (iii) penolakan hipotesis nol terjadi, jika terdapat kemungkinan lain, misalnya jika $\gamma_{1t} \beta_{1t} \delta_{1t} \neq 0$, yang berarti semua variabel mempunyai kemungkinan adanya hubungan sebab akibat dan/atau jika maka baik searah (direksional) maupun dua arah (dua arah).

5. Running Data

Untuk melakukan pengujian terhadap variabel data kinerja yang telah disusun, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan menggunakan software eviews versi 13 sebagai berikut :



Gambar 1 Tampilan Awal views versi 13



Gambar 2 Tampilan Running Data

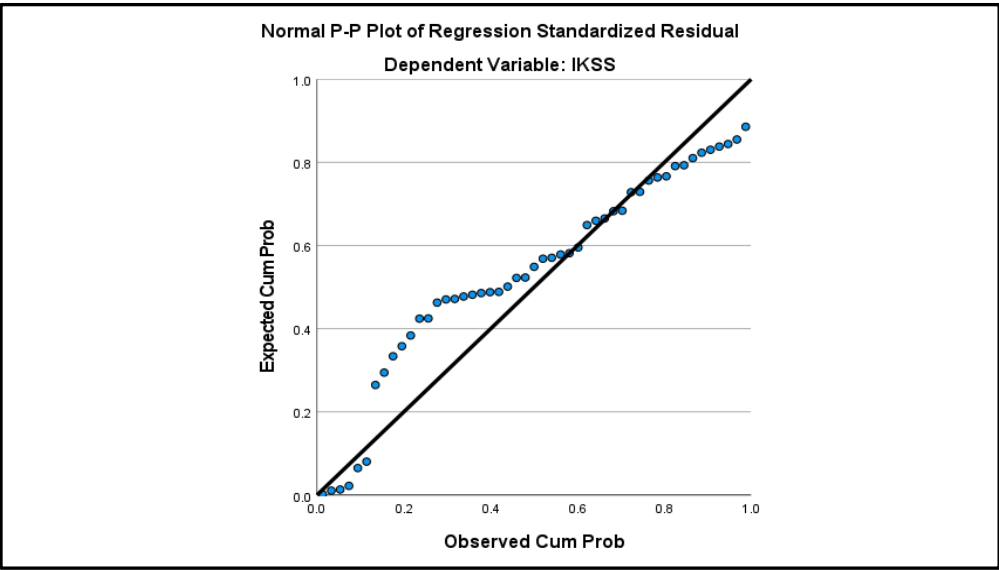
Sebelum mengestimasi kausalitas VECM Granger, beberapa kriteria ekonometrik harus dipenuhi, seperti pengujian stasioner data dengan uji unit root menggunakan kriteria uji Augmented Dickey-Fuller (ADF-Test), pengujian ini dikembangkan oleh Levin et al. (2002) dan Im dkk. (2005). Hasil pengujian unit root dapat dilihat pada Tabel berikut :

Variabel	ADF Test	t-Statistik			Prob*
		1%	5%	10%	
$\Delta (lnIKSS1)$	-6.850925	-3.577723	-2.925169	-2.600658	0.0029
$\Delta (lnIKSS2)$	-7.304150	-3.577723	-2.925169	-2.600658	0.0005
$\Delta (lnIKSS3)$	-7.351302	-3.577723	-2.925169	-2.600658	0.0016
$\Delta (lnIKSS4)$	-7.269643	-3.581152	-2.926622	-2.601424	0.0022
$\Delta (lnIKSS5)$	-7.599555	-3.577723	-2.925169	-2.600658	0.0002
$\Delta (lnIKSS6)$	-5.079018	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0034
$\Delta (lnIKSSO1)$	-3.319360	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0401
$\Delta (lnIKSSO2)$	-4.298721	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0100

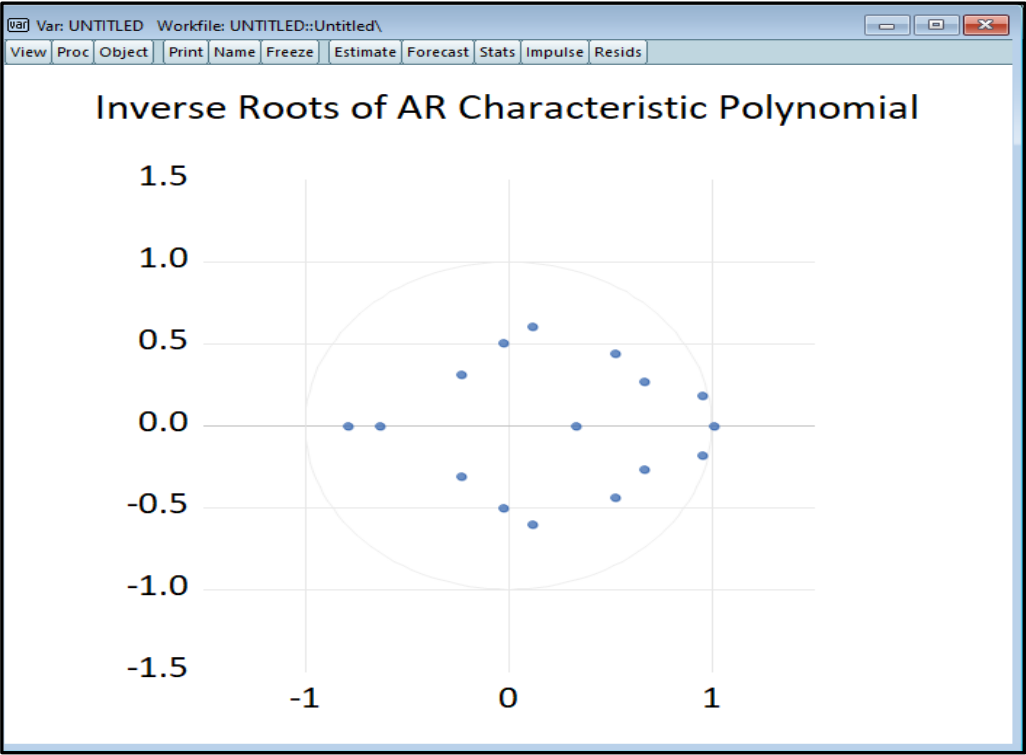
$\Delta (lnIKSSO3)$	-5.701658	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0029
$\Delta (lnIKSSO4)$	-6.556084	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0012
$\Delta (lnIKSSO5)$	-5.986154	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0021
$\Delta (lnIKSSO6)$	-6.120437	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0009
$\Delta (lnIKSSO7)$	-5.033496	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0036
$\Delta (lnIKSSO8)$	-3.719095	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0262
$\Delta (lnIKSSO9)$	-4.650565	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0092
$\Delta (lnIKSSO10)$	-5.877345	-4.803492	-3.403313	-2.841819	0.0034
$\Delta (lnIKSSO11)$	-4.923968	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0042
$\Delta (lnIKSSO12)$	-6.636032	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0001
$\Delta (lnIKSSO13)$	-4.175967	-4.803492	-3.403313	-2.841819	0.0201
$\Delta (lnIKSSO14)$	-3.833980	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0223
$\Delta (lnIKSSO15)$	-5.436816	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0021
$\Delta (lnIKSSO16)$	-3.964601	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0001
$\Delta (lnIKSSO17)$	-4.209333	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0159
$\Delta (lnIKSSO18)$	-3.933559	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0225
$\Delta (lnIKSSO19)$	-7.432736	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0002
$\Delta (lnIKSSO20)$	-5.901626	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0012
$\Delta (lnIKSSO21)$	-6.013486	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0014
$\Delta (lnIKSSO22)$	-5.100250	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0042
$\Delta (lnIKSSO23)$	-3.710393	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0237
$\Delta (lnIKSSO24)$	-3.235105	-4.803492	-3.403313	-2.841819	0.0414
$\Delta (lnIKSSO25)$	-3.464311	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0375
$\Delta (lnIKSSO26)$	-3.509086	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0001
$\Delta (lnIKSSO27)$	-4.621210	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0095

Null Hypothesis : $\Delta(lnIKSS)$; $\Delta(lnIKSSO \text{ Level } 1)$; $\Delta(lnIKSSO \text{ Level } 2)$ has a unit root
Lag Length: 0 (Automatic – base on SIC, max lag = 2)
*MacKinnon (1996) one-sided p-values

Tabel diatas menunjukan hasil running test dari pengujian unit root test pada tingkat perbedaan pertama (*first difference*), dimana hasilnya menunjukan nilai probabilitas < 0,05 (*stasioner) hal ini ditunjukan dengan nilai dari hasil uji ADF yang lebih tinggi dari t-nilai statistik pada tingkatan 1%, 5% dan 10%. Selanjutnya 33 (tiga puluh tiga) variabel tersebut lnIKSS; lnIKSSO Level 1; lnIKSSO Level 2; dapat digunakan untuk mengestimasi kausalitas Granger dengan model koreksi kesalahan vektor (VECM).



Dari gambar diatas menunjukan bahwa semua variabel data indikator mendekati dengan *desire line* tujuan Perangkat Daerah yang berarti dari pengujian Heterokedastisitas untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model.



Dari gambar diatas menunjukan bahwa semua variabel data indikator berada dalam lingkaran pengamatan yang artinya variabel data yang diamati berada pada normalitas data dan tidak ada penyimpangan data.

Langkah berikutnya adalah pemilihan lag optimum yang tepat pada model kausalitas. Tabel berikut ini menunjukan hasil pengujian lag optimum. Hasil running test menunjukan bahwa penentuan panjang pada

lag data yang akan digunakan dalam mengestimasi kausalitas Granger adalah lag dua untuk 33 (tiga puluh tiga) variabel data yang diuji.

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-419.1810	NA	162.6512	19.28095	19.48370*	19.35614*
1	-403.6441	26.83645	252.2089	19.71110	20.92759	20.16223
2	-360.2234	65.13107*	114.2664*	18.87379*	21.10403	19.70087
3	-341.1326	24.29740	168.5682	19.14239	22.38637	20.34541
4	-313.5341	28.85291	191.8342	19.02428	23.28200	20.60325

*indicate lag order selected by the criterion
AIC : Akaike Information Criterion

Tabel diatas menunjukan bahwa nilai parameter Akaike Information Criterion (AIC) minimum berada pada lag kedua dengan nilai |18.87379|, hal ini mengisyaratkan lag optimum berada pada lag kedua.

Optimum Lag	$\Delta (lnIKSS)$	$\Delta (lnIKSS01)$	$\Delta (lnIKSS02)$	$\Delta (lnIKSS03)$	$\Delta (lnIKSS04)$	Joint
$\Delta Lag one$	2.561499 [0.7672]***	4.752189 [0.4469]**	1.749800 [0.8826]	14.90229 [0.0108]***	2.404408 [0.7908]	26.20479 [0.3967]
$\Delta Lag two$	4.661034 [0.4586]	1.807226 [0.8751]	3.341873 [0.6474]**	2.993611 [0.7010]	114.9873 [0.0000]***	157.2580 [0.0000]
df	5	5	5	5	5	25

Note: Chi-squared test statistic for lag exclusion
Significant level ***1%, **5% and *10%
Number in [] are p-values

Uji kointegrasi Johansen untuk mengetahui hubungan jangka pendek dan panjang antar variabel data yang diteliti. Dalam pengecekan kausalitas, analisis kausalitas Granger juga perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang baik dari hasil pengujian dengan memilih panjang lag optimal yang tepat. Kerangka kerja kointegrasi Johansen mengambil titik awalnya pada model koreksi kesalahan vektor (VECM). Berdasarkan hasil uji kointegrasi Johansen pada Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil nilai Trace Statistic lebih tinggi dari nilai kritis, begitu pula nilai Max-Eigen Statistic lebih tinggi dari nilai kritis. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka pendek dan panjang terdapat kointegrasi pada model persamaan hasil uji kointegrasi Johansen disajikan pada Tabel diatas.

Trace Test				
Null Hypothesized (H ₀)	Eigenvalue	Trace Statistic	Critical Value 0.05	Prob**
None*	0.754118	128.4782	69.81889	0.0000
At most 1*	0.456632	65.34761	47.85613	0.0005
At most 2*	0.287481	37.89900	29.79707	0.0047
At most 3*	0.270480	22.64630	15.49471	0.0035
At most 4*	0.171288	8.454713	3.841465	0.0036

Maximum Eigenvalue Test				
Null Hypothesized (H ₀)	Eigenvalue	Max-Eigen Statistic	Critical Value 0.05	Prob**
None*	0.754118	63.13059	33.87687	0.0000
At most 1	0.456632	27.44861	27.58434	0.0520
At most 2	0.287481	15.25269	21.13162	0.2716
At most 3	0.270480	14.19159	14.26460	0.0513
At most 4*	0.171288	8.454713	3.841465	0.0036

Dari persamaan (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) dan (10) yang telah diformulasikan diawal, maka hasil pengujian test terhadap model vektor koreksi kesalahan (VECM) yang dihasilkan dengan persamaan baru :

$$\begin{aligned}
 &D(lnIKSS,2) \\
 &= 0.357687854138 \cdot D(lnIKSS(-1), 2) + 0.255696325482 \cdot D(lnIKSS01(-1), 2) \\
 &+ 0.363554788223 \cdot D(lnIKSS02(-1), 2) + 0.222569874236 \cdot D(lnIKSS03(-1), 2) \\
 &+ 0.555889632566 \cdot D(lnIKSS04(-1), 2) + 0.666889566336 \cdot D(lnIKSS05(-1), 2) \\
 &+ 0.110225577956 \cdot D(lnIKSS06(-1), 2) + 0.330000561142 \\
 &\cdot D(lnIKSS07(-1), 2)
 \end{aligned}
 \tag{11}$$

$$\begin{aligned}
 D(lnIKSS01,2) = &1.6134766894 \cdot D(lnIKSS08(-1), 2) + 0.618968722732 \cdot D(lnIKSS09(-2), 2) \\
 &+ 0.185263624107 \\
 &\cdot D(lnIKSS010(-1), 2)
 \end{aligned}
 \tag{12}$$

$$\begin{aligned}
 D(lnIKSS02,2) = &0.61326312845 \cdot D(lnIKSS011(-1), 2) + 0.340396781481 \cdot D(lnIKSS012(-2), 2) \\
 &+ 0.116692533601 \\
 &\cdot D(lnIKSS013(-1), 2)
 \end{aligned}
 \tag{13}$$

$$\begin{aligned}
 D(lnIKSS03,2) = &1.07193559441 \cdot D(lnIKSS014(-1), 2) + 0.5599794065846 \\
 &\cdot D(lnIKSS015(-2), 2) + 0.500636698415 \\
 &\cdot D(lnIKSS016(-1), 2)
 \end{aligned}
 \tag{14}$$

$$\begin{aligned}
 D(lnIKSS04,2) = &0.420313895269 \cdot D(lnIKSS017(-1), 2) + 0.200233652213 \\
 &\cdot D(lnIKSS018(-1), 2) + 0.339965221000 \\
 &\cdot D(lnIKSS019(-1), 2)
 \end{aligned}
 \tag{15}$$

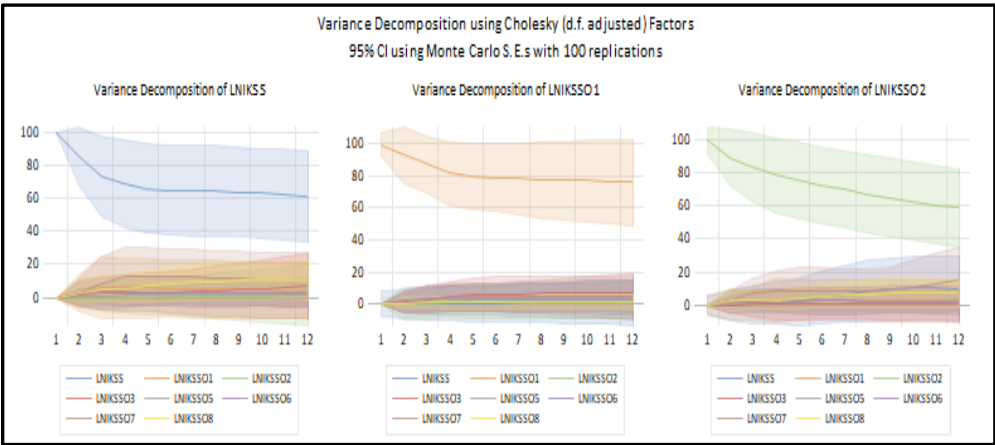
$$\begin{aligned}
 D(lnIKSS05,2) = &0.604814176085 \cdot D(lnIKSS020(-1), 2) + 0.66800500123622 \\
 &\cdot D(lnIKSS021(-1), 2) + 0.558999622300 \\
 &\cdot D(lnIKSS022(-1), 2)
 \end{aligned}
 \tag{16}$$

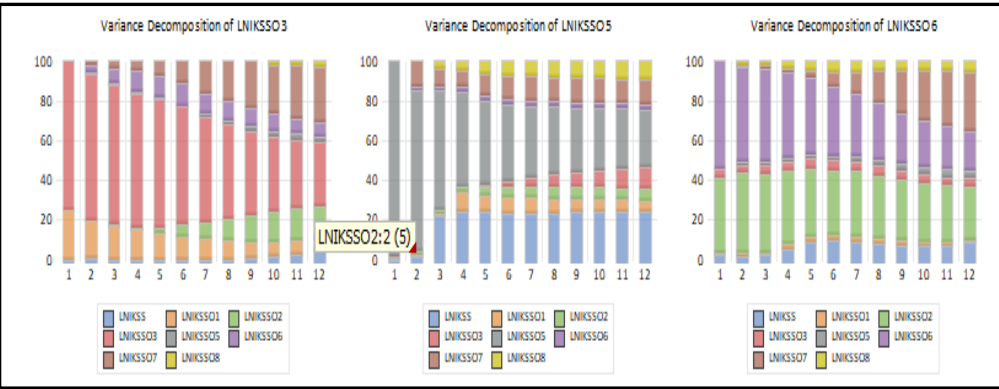
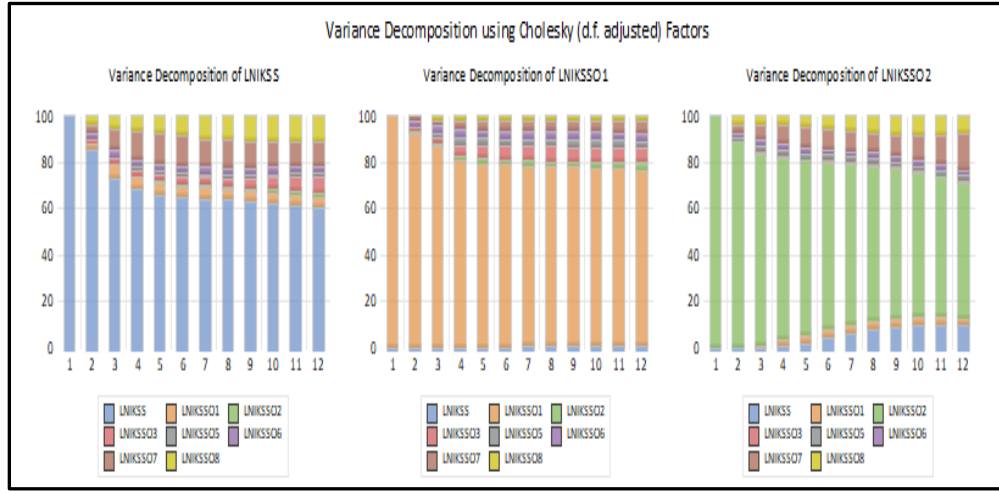
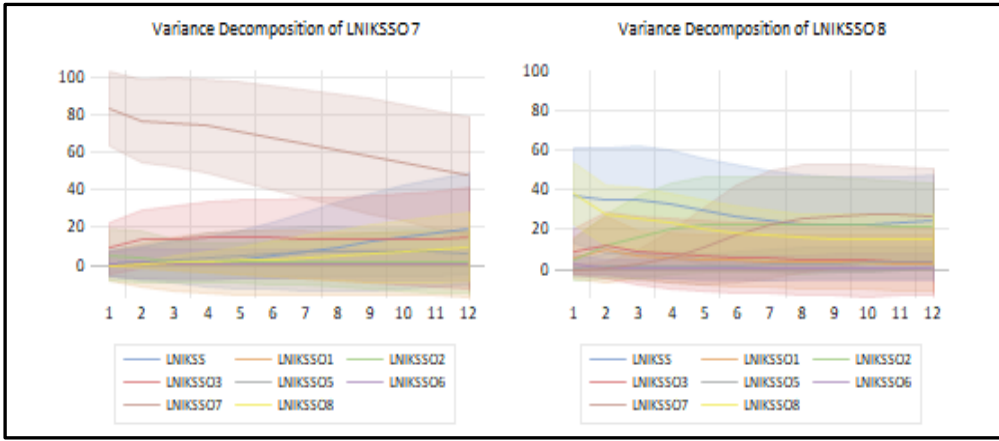
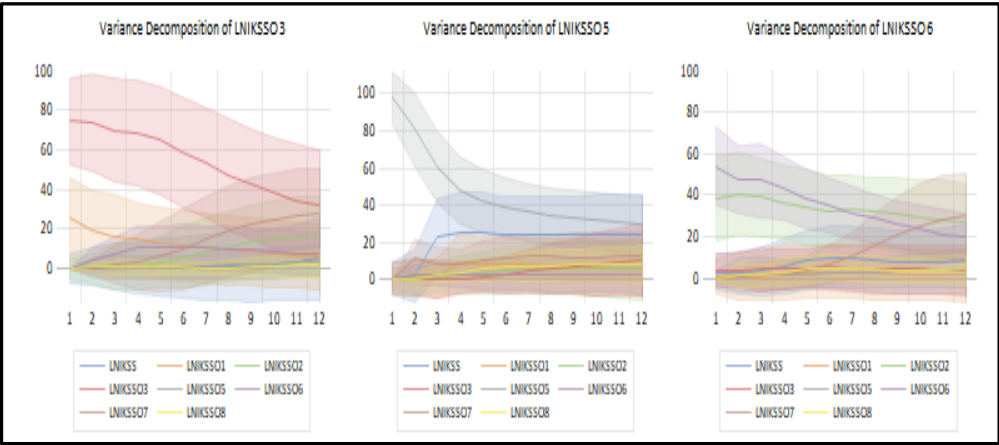
$$\begin{aligned}
 D(\ln IKSS06,2) &= 0.460615311019 \cdot D(\ln IKSS023(-1),2) + 0.004125563678 \\
 &\quad \cdot D(\ln IKSS024(-1),2) + 0.445012300622 \\
 &\quad \cdot D(\ln IKSS025(-1),2)
 \end{aligned}
 \tag{17}$$

$$\begin{aligned}
 D(\ln IKSS07,2) \\
 &= 0.00731308357823 \cdot D(\ln IKSS027(-1),2) + 0.008852003166 \\
 &\quad \cdot D(\ln IKSS027(-1),2)
 \end{aligned}
 \tag{18}$$

Model koreksi kesalahan vektor merupakan salah satu bentuk model vektor autoregresif (VAR) yang memperkirakan karena adanya bentuk data yang tidak stasioner namun terkointegrasi. VECM sering juga disebut sebagai desain VAR untuk rangkaian non stasioner yang mempunyai hubungan kointegrasi. Spesifikasi VECM memulihkan hubungan jangka pendek dan panjang variabel endogen agar dapat bersatu dalam hubungan kointegrasi, namun tetap membiarkan adanya dinamika jangka pendek. Hasil estimasi model VEC dapat dilihat pada Tabel berikut.

Dependent Variabel	C	$\Delta (\ln IKSS1_{t-1})$	$\Delta (\ln IKSS2_{t-1})$	$\Delta (\ln IKSS3_{t-1})$	$\Delta (\ln IKSS4_{t-1})$	$\Delta (\ln IKSS5_{t-1})$	ECT_{t-1}	Summary
$\Delta (\ln IKSS01)$	0.031 (0.249) [0.128]	0.357 (0.148) [-2.408]	0.087 (0.197) [0.445]	0.017 (0.201) [0.086]	0.097 (0.111) [0.878]	0.053 (0.078) [-0.685]	3.289	R ² : 0.8557 Adj. R ² : 0.538 F-stat : 5.661 AIC : 4.086 SC : 4.568
$\Delta (\ln IKSS02)$	0.027 (0.331) [-0.083]	1.059 (0.351) [3.010]	0.221 (0.467) [0.473]	0.479 (0.477) [1.003]	0.192 (0.263) [0.729]	1.613 (0.185) [-8.678]	2.131	R ² : 0.8663 Adj. R ² : 0.342 F-stat : 3.081 AIC : 4.654 SC : 5.136
$\Delta (\ln IKSS03)$	0.012 (0.338) [-0.038]	0.145 (0.114) [1.280]	0.029 (0.151) [-0.192]	0.613 (0.154) [-3.960]	0.080 (0.085) [-0.937]	0.185 (0.060) [-3.075]	0.561	R ² : 0.9063 Adj. R ² : 0.312 F-stat : 2.816 AIC : 4.698 SC : 5.179
$\Delta (\ln IKSS04)$	0.026 (0.186) [-0.141]	0.305 (0.208) [1.464]	0.433 (0.277) [-1.563]	0.137 (0.283) [-0.486]	1.071 (0.156) [-6.848]	0.089 (0.110) [0.810]	0.156	R ² : 0.8264 Adj. R ² : 0.491 F-stat : 4.862 AIC : 3.510 SC : 3.992
$\Delta (\ln IKSS05)$	0.045 (0.131) [0.345]	0.013 (0.149) [-0.089]	0.386 (0.199) [-1.944]	0.026 (0.203) [-0.131]	0.028 (0.112) [0.252]	0.046 (0.079) [-0.591]	8.656	R ² : 0.9380 Adj. R ² : 0.911 F-stat : 42.177 AIC : 2.810 SC : 3.291





6. Hasil

Setelah melakukan rangkaian beberapa uji variabel data Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) terhadap Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO) Level 1 dan IKSSO Level 2 menunjukkan hasil sebagai berikut :

a. Persentase Kontribusi Peningkatan Kinerja

(1). IKSSO Level 1 Terhadap IKSS

	$\Delta (lnIKSS1)$	$\Delta (lnIKSS2)$	$\Delta (lnIKSS3)$	$\Delta (lnIKSS4)$	$\Delta (lnIKSS5)$	$\Delta (lnIKSS6)$
$\Delta (lnIKSSO1)$	84.17	89.33	81.01	88.76	80.52	86.42
$\Delta (lnIKSSO2)$	89.37	87.48	83.51	86.18	83.15	82.26
$\Delta (lnIKSSO3)$	87.45	82.53	80.14	86.24	89.83	84.63
$\Delta (lnIKSSO4)$	87.46	88.22	81.27	82.16	81.64	83.16
$\Delta (lnIKSSO5)$	86.19	81.08	84.26	88.28	83.58	84.35
$\Delta (lnIKSSO6)$	82.45	83.19	88.65	81.12	89.76	82.36
$\Delta (lnIKSSO7)$	86.00	82.82	88.62	85.18	82.45	89.41

(2). IKSSO Level 2 Terhadap IKSSO Level 1

	$\Delta (lnIKSSO1)$	$\Delta (lnIKSSO2)$	$\Delta (lnIKSSO3)$	$\Delta (lnIKSSO4)$	$\Delta (lnIKSSO5)$	$\Delta (lnIKSSO6)$	$\Delta (lnIKSSO7)$
$\Delta (lnIKSSO8)$	86.69	85.71	83.73	87.12	88.58	85.33	81.05
$\Delta (lnIKSSO9)$	81.32	87.74	89.10	84.28	84.25	84.51	82.65
$\Delta (lnIKSSO10)$	87.37	84.64	86.10	86.63	85.71	83.62	89.34
$\Delta (lnIKSSO11)$	82.13	85.20	80.24	87.18	84.15	86.26	83.34
$\Delta (lnIKSSO12)$	86.18	85.18	87.13	84.15	82.31	88.21	84.81
$\Delta (lnIKSSO13)$	85.73	88.92	86.84	85.75	86.72	89.60	86.51
$\Delta (lnIKSSO14)$	85.61	82.82	88.28	87.46	87.71	83.32	84.45
$\Delta (lnIKSSO15)$	88.36	84.36	81.83	82.63	87.21	86.65	87.38
$\Delta (lnIKSSO16)$	83.34	82.27	82.24	87.20	87.67	84.38	81.34
$\Delta (lnIKSSO17)$	80.17	83.66	86.71	81.32	80.63	89.63	84.48
$\Delta (lnIKSSO18)$	82.41	81.52	85.18	88.32	80.11	83.13	85.54
$\Delta (lnIKSSO19)$	89.52	88.43	86.19	82.32	87.77	85.51	86.69
$\Delta (lnIKSSO20)$	88.65	88.12	85.23	81.42	81.52	88.53	87.72
$\Delta (lnIKSSO21)$	84.82	82.32	89.14	83.61	88.76	81.25	85.23
$\Delta (lnIKSSO22)$	86.16	89.26	80.41	87.65	85.31	86.92	87.72
$\Delta (lnIKSSO23)$	87.23	82.00	82.13	84.48	85.16	83.26	84.23

$\Delta (lnIKSS024)$	84.62	81.63	84.62	85.56	84.41	84.19	89.65
$\Delta (lnIKSS025)$	84.16	87.16	85.67	85.62	83.36	84.77	88.78
$\Delta (lnIKSS026)$	88.28	86.57	84.47	87.32	81.73	85.95	81.29
$\Delta (lnIKSS027)$	81.29	84.14	85.56	86.68	84.49	89.64	82.66

b. Persentase *Cross Cutting*

(1) IKSSO Level 1 Terhadap IKSS

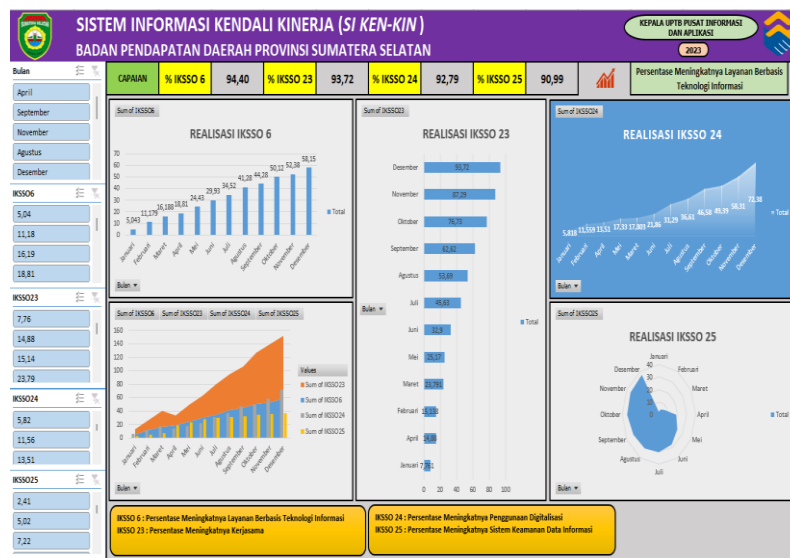
	$\Delta (lnIKSS1)$	$\Delta (lnIKSS2)$	$\Delta (lnIKSS3)$	$\Delta (lnIKSS4)$	$\Delta (lnIKSS5)$	$\Delta (lnIKSS6)$
$\Delta (lnIKSS01)$	11.63	19.27	21.73	12.44	18.25	18.27
$\Delta (lnIKSS02)$	14.28	14.17	16.37	14.74	13.25	15.43
$\Delta (lnIKSS03)$	16.18	16.18	13.34	14.74	17.27	16.82
$\Delta (lnIKSS04)$	13.24	12.27	14.21	14.13	15.14	14.16
$\Delta (lnIKSS05)$	15.62	14.29	17.16	17.32	15.12	13.14
$\Delta (lnIKSS06)$	13.26	14.38	14.72	13.42	12.38	16.51
$\Delta (lnIKSS07)$	12.32	13.18	15.62	14.41	18.25	16.38

(2) IKSSO Level 2 Terhadap IKSSO Level 1

	$\Delta (lnIKSS01)$	$\Delta (lnIKSS02)$	$\Delta (lnIKSS03)$	$\Delta (lnIKSS04)$	$\Delta (lnIKSS05)$	$\Delta (lnIKSS06)$	$\Delta (lnIKSS07)$
$\Delta (lnIKSS08)$	13.71	10.18	12.15	12.52	11.26	17.18	18.35
$\Delta (lnIKSS09)$	18.26	12.13	13.24	15.87	12.62	13.48	17.81
$\Delta (lnIKSS010)$	12.34	11.72	12.42	13.24	10.32	15.26	19.16
$\Delta (lnIKSS011)$	13.24	14.71	12.32	13.29	16.38	15.16	12.31
$\Delta (lnIKSS012)$	14.26	14.26	12.18	12.62	18.45	17.40	16.40
$\Delta (lnIKSS013)$	14.51	15.42	16.14	14.12	12.47	16.13	15.23
$\Delta (lnIKSS014)$	14.14	17.28	16.14	10.14	12.62	14.66	15.42
$\Delta (lnIKSS015)$	19.24	15.54	13.72	11.38	12.61	13.25	12.62
$\Delta (lnIKSS016)$	16.17	13.15	17.67	12.21	17.23	14.32	18.26
$\Delta (lnIKSS017)$	10.87	16.64	15.25	14.24	12.23	19.23	14.51
$\Delta (lnIKSS018)$	10.52	11.43	14.65	12.74	14.32	12.45	13.15
$\Delta (lnIKSS019)$	11.24	12.87	13.32	16.61	13.28	16.82	15.65
$\Delta (lnIKSS020)$	12.65	11.28	14.64	18.54	18.58	11.41	10.27
$\Delta (lnIKSS021)$	15.18	16.94	10.82	16.14	11.28	18.45	14.74
$\Delta (lnIKSS022)$	13.35	19.67	11.35	12.42	14.65	11.01	18.62

$\Delta (lnIKSS023)$	12.17	12.16	12.23	18.26	14.53	16.74	15.80
$\Delta (lnIKSS024)$	14.65	13.37	15.36	16.15	16.65	14.21	10.34
$\Delta (lnIKSS025)$	15.15	14.45	14.20	16.24	12.21	15.28	11.22
$\Delta (lnIKSS026)$	11.78	11.42	17.24	11.18	13.59	12.72	18.61
$\Delta (lnIKSS027)$	18.72	16.64	16.62	13.13	14.55	16.33	17.41

7.	UPTB Puslia
----	-------------





3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahapan setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk menyatakan bahwa kinerja hari demi hari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemampuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja sulit bagi kita untuk menilai kinerja dari kebijakan/program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan tahun 2024 dan Penetapan Kinerja tahun 2024.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator sebagai berikut :

PERBANDINGAN PENGUKURAN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (TAHUN 2023)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	Tahun I												Tahun II												Tahun III												Tahun IV											
			Januari		%	Februari		%	Maret		%	April		%	Mei		%	Juni		%	Juli		%	Agustus		%	September		%	Oktober		%	November		%	Desember		%												
			[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]	[24]	[25]	[26]	[27]	[28]	[29]	[30]	[31]	[32]	[33]	[34]	[35]	[36]	[37]	[38]	[39]												
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah	Realisasi 2023	209.986.720.331,37	4,010	Realisasi 2023	381.222.774.067,92	7,280	Realisasi 2023	613.726.773.636,81	11,720	Realisasi 2023	1.056.898.248.490,77	20,183	Realisasi 2023	1.285.893.741.759,86	24,556	Realisasi 2023	1.707.176.326.564,31	32,601	Realisasi 2023	2.225.597.406.684,14	42,501	Realisasi 2023	2.697.465.321.124,53	51,512	Realisasi 2023	3.764.051.236.264,00	71,880	Realisasi 2023	4.169.571.725.602,18	79,624	Realisasi 2023	4.357.669.555.884,04	83,216	Realisasi 2023	4.725.277.230.878,11	90,236												
			Realisasi 2024	231.980.341.912,21	4,430	Realisasi 2024	456.629.476.630,80	8,720	Realisasi 2024	718.981.962.630,84	13,730	Realisasi 2024	1.122.198.358.279,00	21,430	Realisasi 2024	1.332.185.078.610,96	25,440	Realisasi 2024	1.813.426.465.106,04	34,630	Realisasi 2024	2.284.194.698.467,39	43,620	Realisasi 2024	2.769.101.688.559,27	52,880	Realisasi 2024	3.929.003.398.120,31	75,030	Realisasi 2024	4.199.210.748.970,65	80,190	Realisasi 2024	4.406.579.181.018,58	84,150	Realisasi 2024	4.816.079.468.547,58	91,970												
			% Capaian	110,474	110,474	% Capaian	119,780	119,780	% Capaian	117,150	117,150	% Capaian	106,178	106,178	% Capaian	103,600	103,600	% Capaian	106,224	106,224	% Capaian	102,633	102,633	% Capaian	102,656	102,656	% Capaian	104,382	104,382	% Capaian	100,711	100,711	% Capaian	101,122	101,122	% Capaian	101,923	101,923												
			% Capaian	110,474	110,474	% Capaian	119,780	119,780	% Capaian	117,150	117,150	% Capaian	106,178	106,178	% Capaian	103,600	103,600	% Capaian	106,224	106,224	% Capaian	102,633	102,633	% Capaian	102,656	102,656	% Capaian	104,382	104,382	% Capaian	100,711	100,711	% Capaian	101,122	101,122	% Capaian	101,923	101,923												
2	Meningkatnya Kredibilitas Penemuan Pendapatan Dari Pencapaian Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi (Nilai absolut)	Real Dev ¹ 2023	0,1720	Real Dev ¹ 2023	0,3500	Real Dev ¹ 2023	0,5100	Real Dev ¹ 2023	0,5800	Real Dev ¹ 2023	0,770	Real Dev ¹ 2023	0,830	Real Dev ¹ 2023	1,091	Real Dev ¹ 2023	1,150	Real Dev ¹ 2023	1,270	Real Dev ¹ 2023	1,542	Real Dev ¹ 2023	1,756	Real Dev ¹ 2023	1,921	Real Dev ¹ 2023	2,312	Real Dev ¹ 2023	2,996	Real Dev ¹ 2023	3,770	Real Dev ¹ 2023	4,816	Real Dev ¹ 2023	5,998														
			Real Dev ¹ 2024	0,1630	Real Dev ¹ 2024	0,2100	Real Dev ¹ 2024	0,3800	Real Dev ¹ 2024	0,5100	Real Dev ¹ 2024	1,020	Real Dev ¹ 2024	1,230	Real Dev ¹ 2024	1,688	Real Dev ¹ 2024	1,817	Real Dev ¹ 2024	1,912	Real Dev ¹ 2024	2,312	Real Dev ¹ 2024	2,996	Real Dev ¹ 2024	3,770	Real Dev ¹ 2024	4,816	Real Dev ¹ 2024	5,998	Real Dev ¹ 2024	7,280	Real Dev ¹ 2024	8,720																
			% Capaian	94,767	% Capaian	63,000	% Capaian	74,510	% Capaian	87,531	% Capaian	152,887	% Capaian	158,000	% Capaian	146,183	% Capaian	152,887	% Capaian	158,000	% Capaian	146,183	% Capaian	152,887	% Capaian	158,000	% Capaian	146,183	% Capaian	152,887	% Capaian	158,000	% Capaian	146,183	% Capaian	152,887	% Capaian	158,000												
			% Capaian	94,767	% Capaian	63,000	% Capaian	74,510	% Capaian	87,531	% Capaian	152,887	% Capaian	158,000	% Capaian	146,183	% Capaian	152,887	% Capaian	158,000	% Capaian	146,183	% Capaian	152,887	% Capaian	158,000	% Capaian	146,183	% Capaian	152,887	% Capaian	158,000	% Capaian	146,183	% Capaian	152,887	% Capaian	158,000												
3	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PORB	3.1 Rasio PAD Terhadap PORB Non Migas	Realisasi PAD	209.986.720.331,37		Realisasi PAD	381.222.774.067,92		Realisasi PAD	613.726.773.636,81		Realisasi PAD	1.056.898.248.490,77		Realisasi PAD	1.285.893.741.759,86		Realisasi PAD	1.707.176.326.564,31		Realisasi PAD	2.225.597.406.684,14		Realisasi PAD	2.697.465.321.124,53		Realisasi PAD	3.764.051.236.264,00		Realisasi PAD	4.169.571.725.602,18		Realisasi PAD	4.357.669.555.884,04		Realisasi PAD	4.725.277.230.878,11													
			PORB Non Migas	3.442.405.251.300,00		PORB Non Migas	288.805.131.869.636,00		PORB Non Migas	328.156.135.634.658,00		PORB Non Migas	520.639.531.276.241,00		PORB Non Migas	441.887.883.766.275,00		PORB Non Migas	457.688.023.207.590,00		PORB Non Migas	427.999.501.285.412,00		PORB Non Migas	457.197.512.055.005,00		PORB Non Migas	550.299.888.342.690,00		PORB Non Migas	593.111.198.520.936,00		PORB Non Migas	536.658.812.300.990,00		PORB Non Migas	517.555.008.858.501,00													
			% Realisasi 2023	0,061	% Realisasi 2023	0,132	% Realisasi 2023	0,187	% Realisasi 2023	0,203	% Realisasi 2023	0,291	% Realisasi 2023	0,373	% Realisasi 2023	0,520	% Realisasi 2023	0,590	% Realisasi 2023	0,684	% Realisasi 2023	0,703	% Realisasi 2023	0,812	% Realisasi 2023	0,913	% Realisasi 2023	1,013	% Realisasi 2023	1,113	% Realisasi 2023	1,213	% Realisasi 2023	1,313	% Realisasi 2023	1,413	% Realisasi 2023	1,513												
			% Realisasi 2024	0,072	% Realisasi 2024	0,152	% Realisasi 2024	0,194	% Realisasi 2024	0,220	% Realisasi 2024	0,152	% Realisasi 2024	0,194	% Realisasi 2024	0,294	% Realisasi 2024	0,423	% Realisasi 2024	0,599	% Realisasi 2024	0,662	% Realisasi 2024	0,775	% Realisasi 2024	0,876	% Realisasi 2024	0,977	% Realisasi 2024	1,078	% Realisasi 2024	1,178	% Realisasi 2024	1,278	% Realisasi 2024	1,378	% Realisasi 2024	1,478												
3	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PORB	3.2 Rasio PAD Terhadap PORB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	Realisasi PAD	209.986.720.331,37		Realisasi PAD	381.222.774.067,92		Realisasi PAD	613.726.773.636,81		Realisasi PAD	1.056.898.248.490,77		Realisasi PAD	1.285.893.741.759,86		Realisasi PAD	1.707.176.326.564,31		Realisasi PAD	2.225.597.406.684,14		Realisasi PAD	2.697.465.321.124,53		Realisasi PAD	3.764.051.236.264,00		Realisasi PAD	4.169.571.725.602,18		Realisasi PAD	4.357.669.555.884,04		Realisasi PAD	4.725.277.230.878,11													
			PORB GE	3.683.977.549.673,00		PORB GE	2.703.707.617.502,00		PORB GE	2.993.789.139.691,00		PORB GE	4.161.016.726.341,00		PORB GE	4.388.715.842.183,00		PORB GE	4.589.183.672.559,00		PORB GE	4.636.661.263.925,00		PORB GE	5.258.217.000.242,00		PORB GE	6.980.509.154.307,00		PORB GE	5.999.383.777.844,00		PORB GE	5.379.838.957.881,00		PORB GE	5.021.548.998.170,00													
			% Realisasi 2023	0,057	% Realisasi 2023	0,141	% Realisasi 2023	0,205	% Realisasi 2023	0,254	% Realisasi 2023	0,293	% Realisasi 2023	0,372	% Realisasi 2023	0,480	% Realisasi 2023	0,513	% Realisasi 2023	0,572	% Realisasi 2023	0,695	% Realisasi 2023	0,801	% Realisasi 2023	0,941	% Realisasi 2023	1,081	% Realisasi 2023	1,221	% Realisasi 2023	1,361	% Realisasi 2023	1,501	% Realisasi 2023	1,641	% Realisasi 2023	1,781												
			% Realisasi 2024	0,062	% Realisasi 2024	0,128	% Realisasi 2024	0,215	% Realisasi 2024	0,170	% Realisasi 2024	0,320	% Realisasi 2024	0,470	% Realisasi 2024	0,562	% Realisasi 2024	0,621	% Realisasi 2024	0,698	% Realisasi 2024	0,795	% Realisasi 2024	0,881	% Realisasi 2024	0,965	% Realisasi 2024	1,049	% Realisasi 2024	1,133	% Realisasi 2024	1,217	% Realisasi 2024	1,301	% Realisasi 2024	1,385	% Realisasi 2024	1,469												
3	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PORB	3.1 Rasio PAD Terhadap PORB Non Migas	% Capaian	108,772	% Capaian	90,780	% Capaian	104,878	% Capaian	66,929	% Capaian	109,215	% Capaian	126,344	% Capaian	104,583	% Capaian	121,053	% Capaian	122,028	% Capaian	114,388	% Capaian	108,765	% Capaian	108,425	% Capaian	100,711	% Capaian	101,122	% Capaian	101,923	% Capaian	101,923	% Capaian	101,923	% Capaian	101,923												
			% Capaian	108,772	% Capaian	90,780	% Capaian	104,878	% Capaian	66,929	% Capaian	109,215	% Capaian	126,344	% Capaian	104,583	% Capaian	121,053	% Capaian	122,028	% Capaian	114,388	% Capaian	108,765	% Capaian	108,425	% Capaian	100,711	% Capaian	101,122	% Capaian	101,923	% Capaian	101,923	% Capaian	101,923	% Capaian	101,923												
			% Capaian	108,772	% Capaian	90,780	% Capaian	104,878	% Capaian	66,929	% Capaian	109,215	% Capaian	126,344	% Capaian	104,583	% Capaian	121,053	% Capaian	122,028	% Capaian	114,388	% Capaian	108,765	% Capaian	108,425	% Capaian	100,711	% Capaian	101,122	% Capaian	101,923	% Capaian	101,923	% Capaian	101,923	% Capaian	101,923												
			% Capaian	108,772	% Capaian	90,780	% Capaian	104,878	% Capaian	66,929	% Capaian	109,215	% Capaian	126,344	% Capaian	104,583	% Capaian	121,053	% Capaian	122,028	% Capaian	114,388	% Capaian	108,765	% Capaian	108,425	% Capaian	100,711	% Capaian	101,122	% Capaian	101,923	% Capaian	101,923	% Capaian	101,923	% Capaian	101,923												

PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA ESELON II BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2023 (dalam %)																												TARGET AKHIR TAHUN 2023	PENANGGUNGJAWAB								
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember				
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	1.1 Persentase Pencapaian Penerimaan PAD	5.000	5.630	112.600	10.000	12.620	126.200	15.000	18.330	122.200	22.000	23.710	107.773	28.000	32.620	116.500	40.000	52.010	130.025	50.000	46.810	93.620	60.000	56.120	93.533	75.000	71.880	95.840	85.000	81.890	96.341	90.000	89.260	99.178	100.000	97.910	97.910	100.000	Kepala Badan
		1.2 Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Non DAU dan DAK	3.750	4.010	106.933	7.500	7.280	97.067	11.250	11.720	104.178	14.520	15.710	108.196	17.050	18.208	106.792	21.650	21.930	101.293	24.520	21.630	88.214	27.050	24.510	90.610	30.650	26.540	86.591	35.000	33.780	96.514	40.000	39.920	99.800	45.000	43.830	97.400	> 45	Kepala Badan
2	Meningkatnya Kemandirian Daerah Dalam Pembangunan Yang Bersumber Pada Pendanaan PAD	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi (Nilai absolut)	0.160	0.172	107.500	0.320	0.350	109.375	0.480	0.510	106.250	0.640	0.580	90.625	0.810	0.770	95.062	0.940	0.830	88.298	1.240	1.091	87.984	1.330	1.150	86.466	1.460	1.270	86.988	1.620	1.542	95.185	1.830	1.756	95.956	2.000	1.921	96.050	2.000	Kepala Badan
		3.1 Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0.070	0.061	87.143	0.140	0.132	94.286	0.210	0.187	89.048	0.280	0.203	72.500	0.360	0.291	80.833	0.420	0.373	88.810	0.580	0.520	89.655	0.660	0.590	89.394	0.720	0.684	95.000	0.780	0.703	90.128	0.860	0.812	94.419	0.920	0.913	99.239	0.920	Kepala Badan
3	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	3.2 Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	0.070	0.057	81.429	0.150	0.141	94.000	0.210	0.205	97.619	0.270	0.254	94.074	0.330	0.293	88.788	0.400	0.372	93.000	0.510	0.480	94.118	0.580	0.513	88.448	0.620	0.572	92.258	0.740	0.695	93.919	0.880	0.810	92.045	0.950	0.941	99.053	0.950	Kepala Badan
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendapatan Daerah	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	81.260	81.430	100.209	81.520	81.600	100.098	81.710	81.880	100.208	81.800	81.820	100.024	81.830	81.850	100.024	81.910	81.940	100.037	82.150	81.920	99.720	82.260	82.050	99.745	82.340	82.170	99.794	82.640	82.120	99.371	82.880	82.260	99.252	83.730	82.340	98.340	A (83,73)	Kepala Badan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA ESELON II BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2024 (dalam %)																												TARGET AKHIR TAHUN 2024	PENANGGUNGJAWAB										
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember						
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah	5.120	4.430	86.523	9.180	8.720	94.989	14.560	13.730	94.299	23.720	21.430	90.346	27.380	25.440	92.915	38.560	34.630	89.808	47.530	43.620	91.774	56.030	52.880	94.378	75.000	75.030	100.040	82.820	80.190	96.824	86.340	84.150	97.464	91.970	95.990	104.371	91.970	Kepala Badan		
2	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi (Nilai absolut)	0.180	0.163	90.556	0.270	0.210	77.778	0.430	0.380	88.372	0.780	0.510	65.385	1.210	1.020	84.298	1.570	1.230	78.344	1.741	1.688	95.807	1.923	1.817	94.488	2.030	1.912	94.187	2.463	2.312	93.869	3.150	2.946	93.524	4.000	3.770	94.250	4.000	Kepala Badan		
		3.1 Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0.080	0.072	90.000	0.170	0.152	89.412	0.240	0.194	80.833	0.080	0.072	90.000	0.170	0.152	89.412	0.240	0.194	80.833	0.325	0.294	90.462	0.462	0.423	91.558	0.628	0.599	95.446	0.712	0.662	92.978	0.882	0.775	87.868	0.950	0.925	97.368	0.950	Kepala Badan		
3	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	3.2 Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	0.070	0.062	88.571	0.140	0.128	91.429	0.230	0.215	93.478	0.210	0.170	80.952	0.410	0.320	78.046	0.630	0.470	74.603	0.516	0.502	97.306	0.645	0.621	96.279	0.762	0.698	91.601	0.824	0.795	96.481	0.942	0.881	93.524	1.000	0.945	94.500	1.000	Kepala Badan		

PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024
BIDANG PAJAK BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA BIDANG PAJAK BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2023 (dalam %)																														TARGET AKHIR TAHUN 2023	PENANGGUNGJAWAB						
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober					November			Desember		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Target Terhadap GDP	0.120	0.104	86.667	0.210	0.181	86.190	0.330	0.312	94.545	0.450	0.421	93.556	0.570	0.415	72.807	0.630	0.576	91.429	0.780	0.665	85.256	0.850	0.792	93.176	0.880	0.802	91.136	0.930	0.884	95.054	1.120	1.020	91.071	1.200	1.130	94.167	1.200	Kepala Bidang Pajak
2	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase meningkatnya Pendaftaran Objek Pajak Baru	1.090	0.982	90.092	2.180	2.090	95.872	3.270	3.180	97.248	4.360	3.923	89.977	5.450	4.811	88.275	6.550	5.180	79.084	7.360	7.110	96.603	8.450	8.090	95.740	9.550	9.130	95.602	10.360	9.480	91.506	11.750	11.110	94.553	13.110	12.430	94.813	13.110	Kepala Subbid Pajak
3	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	0.500	0.417	83.400	1.100	1.043	94.818	1.600	1.412	88.250	2.100	1.819	86.619	2.600	2.125	81.731	3.100	2.733	88.161	3.910	3.230	82.609	4.160	3.950	94.952	4.410	4.120	93.424	5.300	5.260	99.245	5.450	5.400	99.083	6.000	5.830	97.167	6.000	Kepala Subbid Sengketa Pajak dan Doleansi
4	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	8.270	8.190	99.033	16.600	16.478	99.265	24.900	24.772	99.486	33.170	32.870	99.096	41.440	40.130	96.839	49.710	47.710	95.977	63.170	61.210	96.897	71.440	68.820	96.333	76.710	71.440	93.130	80.170	79.280	98.890	91.440	87.180	95.341	100.000	93.640	93.640	100.000	Kepala Subbid Pembukuan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA BIDANG PAJAK BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2024 (dalam %)																														TARGET AKHIR TAHUN 2024	PENANGGUNGJAWAB						
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober					November			Desember		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Target Terhadap GDP	0.110	0.090	81.818	0.240	0.212	88.333	0.380	0.294	77.368	0.480	0.370	77.083	0.630	0.580	92.063	0.740	0.610	82.432	0.925	0.871	94.162	1.023	0.926	90.518	1.225	1.000	81.633	1.346	1.288	95.684	1.450	1.389	95.793	1.500	1.398	93.200	1.500	Kepala Bidang Pajak
2	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase meningkatnya Pendaftaran Objek Pajak Baru	1.120	1.082	96.607	2.120	2.070	97.642	3.180	3.080	96.855	4.520	4.120	91.150	5.820	5.230	89.863	6.840	6.140	89.766	7.522	7.016	93.273	8.250	7.911	95.891	9.623	8.547	88.818	10.233	9.261	90.501	12.250	11.118	90.759	14.260	13.260	92.987	14.260	Kepala Subbid Pajak
3	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	0.580	0.433	74.655	1.180	1.013	85.847	1.520	1.372	90.263	2.580	2.230	86.434	2.680	2.140	79.851	3.240	2.890	89.198	3.441	3.251	94.478	3.624	3.421	94.396	4.236	3.921	92.573	4.723	4.233	89.625	4.924	4.288	87.084	5.300	4.872	91.925	5.300	Kepala Subbid Sengketa Pajak dan Doleansi
4	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	8.070	7.790	96.530	15.400	14.440	93.766	22.900	20.200	88.210	30.070	27.130	90.223	43.140	39.260	91.006	50.280	47.170	93.815	59.884	54.727	91.236	65.362	61.610	94.260	72.554	69.325	95.550	83.621	79.621	95.217	88.792	82.366	92.763	100.000	93.360	93.360	100.000	Kepala Subbid Pembukuan

PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024
 BIDANG PENDAPATAN LAIN - LAIN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA BIDANG PENDAPATAN LAIN - LAIN BULAN / TARGET / REALISASI (dalam %) TAHUN 2023																												TARGET AKHIR TAHUN 2023	PENANGGUNGJAWAB								
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember				
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target			Realisasi	Capaian						
1	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	8.160	8.016	98.235	16.490	14.407	87.368	24.820	22.182	89.371	32.960	31.320	95.024	41.110	39.880	97.008	49.260	45.510	92.387	62.960	57.860	91.900	70.110	64.520	92.027	75.260	71.710	95.283	82.910	78.340	94.988	90.130	87.160	96.705	100.000	93.610	93.610	100.000	Kepala Bidang Pendapatan Lain - Lain
2	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	7.130	6.213	87.139	14.380	13.138	91.363	21.630	20.163	93.218	28.740	26.620	92.624	35.860	33.460	93.307	42.980	40.120	93.346	58.740	52.360	89.139	65.860	60.460	91.801	68.980	64.540	93.563	72.740	71.060	97.690	81.860	78.690	96.128	87.000	84.510	97.138	87.000	Kepala Subbid Retribusi
3	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	6.530	6.103	93.461	12.190	12.003	98.466	18.790	18.180	96.754	27.200	25.610	94.154	34.000	32.330	95.088	40.800	37.720	92.451	57.120	54.610	95.606	64.040	60.330	94.207	70.180	67.250	95.825	75.120	69.210	92.133	78.040	76.340	97.822	82.000	77.530	94.549	82.000	Kepala Subbid Penerimaan Pusat
4	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	6.420	6.309	98.271	12.130	12.091	99.678	18.090	17.929	99.110	25.700	22.180	86.304	32.580	30.120	92.449	38.860	35.630	91.688	45.170	41.280	91.388	52.580	48.560	92.355	58.860	53.360	90.656	62.170	58.140	93.518	69.580	67.930	97.629	79.000	73.160	92.608	79.000	Kepala Subbid Hibah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA BIDANG PENDAPATAN LAIN - LAIN BULAN / TARGET / REALISASI (dalam %) TAHUN 2024																												TARGET AKHIR TAHUN 2024	PENANGGUNGJAWAB										
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember						
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian					
1	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	7.460	7.220	96.783	15.140	14.030	92.668	23.120	21.100	91.263	32.460	29.220	90.018	42.740	38.920	91.062	50.120	46.510	92.797	58.584	54.721	93.406	64.231	60.921	94.847	77.321	72.135	93.293	86.132	80.921	93.950	91.114	87.772	96.332	94.970	89.724	94.476	94.970	Kepala Bidang Pendapatan Lain - Lain		
2	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	6.890	6.020	87.373	14.780	13.230	89.513	21.100	19.530	92.559	26.890	26.020	96.765	34.580	33.230	96.096	42.600	39.530	92.793	57.778	53.611	92.788	68.664	61.774	89.966	69.225	64.552	93.250	73.642	68.911	93.576	80.810	76.633	94.831	89.140	86.334	96.852	89.140	Kepala Subbid Retribusi		
3	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	6.720	6.130	91.220	12.680	12.140	95.741	17.410	16.780	96.381	6.720	6.130	91.220	12.680	12.140	95.741	17.410	16.780	96.381	32.254	28.622	88.739	41.366	38.774	93.734	64.611	58.936	91.217	78.781	71.263	90.457	80.180	74.551	92.980	83.480	79.633	95.392	83.480	Kepala Subbid Penerimaan Pusat		
4	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	6.880	5.710	82.994	11.830	11.110	93.914	17.090	15.620	91.398	6.880	5.710	82.994	11.830	11.110	93.914	17.090	15.620	91.398	28.514	22.361	78.421	38.699	34.599	89.405	47.306	43.655	92.282	61.205	57.236	93.515	73.306	68.911	94.005	84.150	80.019	95.091	84.150	Kepala Subbid Hibah		

PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024
BIDANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA BIDANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2023 (dalam %)																												TARGET AKHIR TAHUN 2023	PENANGGUNGJAWAB								
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember				
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	Level 3	Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan			
2	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	8.080	7.080	87.624	16.430	15.413	93.810	24.760	23.175	93.599	32.840	30.770	93.697	40.930	38.810	94.820	49.020	47.070	96.022	62.840	57.890	92.123	68.930	62.130	90.135	75.020	70.070	93.402	81.840	78.280	95.650	90.130	86.160	95.595	100.000	93.270	93.270	100.000	Kepala Subbid Wilayah I
3	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	1.510	1.116	73.907	3.110	2.222	71.447	4.610	4.160	90.239	6.100	5.152	84.459	7.400	5.890	79.595	9.100	7.990	87.802	11.180	10.560	94.454	13.410	11.260	83.967	14.190	12.320	86.822	15.180	15.060	99.209	16.410	15.260	92.992	18.000	17.150	95.278	18.000	Kepala Subbid Wilayah II
4	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penerbitan Keamanan	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	1.180	1.104	93.559	2.390	2.273	95.105	3.580	3.120	87.151	5.190	4.110	79.191	6.210	5.020	80.837	7.230	6.190	85.615	8.190	7.850	95.849	8.420	8.020	95.249	9.230	8.870	96.100	10.290	9.830	95.530	11.480	11.220	97.735	13.240	12.480	94.260	13.240	Kepala Subbid Wilayah III

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA BIDANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2024 (dalam %)																												TARGET AKHIR TAHUN 2024	PENANGGUNGJAWAB										
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember						
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	Level 3	Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan		
2	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	7.810	6.680	85.531	15.730	14.320	91.036	23.160	21.480	92.746	33.140	31.230	94.237	41.410	39.620	95.677	49.560	45.260	91.324	58.712	53.601	91.295	64.712	60.301	93.184	77.105	70.164	90.998	86.201	81.603	94.666	89.102	82.306	92.373	92.460	84.511	91.403	92.460	Kepala Subbid Wilayah I		
3	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	1.740	1.130	64.943	3.450	2.820	81.739	4.230	3.550	83.924	5.610	4.490	80.036	6.480	5.210	80.401	7.230	6.120	84.647	8.625	8.147	94.458	9.630	8.603	89.334	11.241	9.633	85.695	13.254	11.844	89.362	15.056	13.624	90.489	17.280	15.203	87.980	17.280	Kepala Subbid Wilayah II		
4	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penerbitan Keamanan	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	1.320	1.020	77.273	2.540	2.140	84.252	3.320	3.030	91.265	4.890	3.750	76.687	5.260	4.510	85.741	5.170	4.220	81.625	6.302	5.824	92.415	7.855	7.236	92.120	8.632	8.102	93.860	9.206	8.723	94.753	11.255	10.014	88.971	13.020	11.988	92.074	13.020	Kepala Subbid Wilayah III		

PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024
 BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN PENDAPATAN DAERAH BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2023 (dalam %)																												TARGET AKHIR TAHUN 2023	PENANGGUNGJAWAB								
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember				
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Potensi Sumber Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	6.210	5.209	83.881	12.810	11.080	86.495	19.410	16.150	83.205	25.600	23.470	91.680	31.800	29.750	93.553	37.730	35.780	94.832	45.160	41.250	91.342	55.280	51.210	92.637	62.730	57.740	92.045	66.120	60.820	91.984	72.280	68.720	95.075	80.000	75.740	94.675	80.000	Kepala Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah
2	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	6.920	6.092	88.035	13.370	11.360	84.966	20.280	18.128	89.389	27.180	25.333	93.205	33.380	30.670	91.881	39.580	36.170	91.385	47.180	44.660	94.659	53.380	49.620	92.956	69.580	66.360	95.372	73.180	68.160	93.140	77.380	69.320	89.584	83.000	80.520	97.012	83.000	Kepala Subbid Pengembangan Statistik
3	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama	7.620	7.503	98.465	14.940	14.705	98.427	21.180	20.880	98.584	31.790	28.710	90.311	39.610	35.620	89.927	46.820	42.340	90.431	53.790	50.230	93.382	69.610	63.520	91.251	76.820	72.260	94.064	80.790	72.190	89.355	86.610	80.360	92.784	93.000	88.160	94.796	93.000	Kepala Subbid Pengolahan Pendapatan Daerah
4	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	7.830	6.803	86.884	16.160	14.105	87.283	23.980	21.198	88.399	31.840	28.890	90.735	40.050	37.820	94.432	48.260	44.440	92.085	53.840	49.780	92.459	60.050	54.610	90.941	72.660	69.130	95.142	82.840	77.470	93.518	90.050	87.310	96.957	100.000	93.130	93.130	100.000	Kepala Subbid Hukum dan Peraturan Perundang Undanan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN PENDAPATAN DAERAH BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2024 (dalam %)																												TARGET AKHIR TAHUN 2024	PENANGGUNGJAWAB										
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember						
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya Potensi Sumber Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	6.520	5.340	81.902	12.560	11.180	89.013	18.610	16.650	89.468	24.260	21.560	88.871	20.430	27.830	136.221	35.250	31.240	88.624	46.233	42.633	92.213	53.644	48.756	90.888	61.911	54.336	87.765	72.944	67.507	92.546	75.624	70.104	92.701	81.630	78.152	95.739	81.630	Kepala Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah		
2	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	6.320	5.850	92.563	12.580	11.730	93.243	19.210	18.100	94.222	28.420	24.520	86.277	32.620	29.159	89.362	36.280	33.180	91.455	46.253	42.562	92.020	57.824	53.699	92.866	64.577	59.632	92.343	75.604	70.702	93.516	80.256	76.639	95.493	83.480	73.132	87.604	83.480	Kepala Subbid Pengembangan Statistik		
3	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama	7.120	6.430	90.309	13.640	12.540	91.935	20.130	19.190	95.330	28.720	24.130	84.018	38.510	35.140	91.246	42.580	38.520	90.465	56.301	50.264	89.277	69.273	64.536	93.162	76.306	72.562	95.093	81.026	75.164	92.765	86.903	80.502	92.634	93.280	85.611	91.779	93.280	Kepala Subbid Pengolahan Pendapatan Daerah		
4	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	6.530	5.540	84.839	15.460	14.090	91.138	22.330	21.020	94.133	27.830	23.620	84.872	38.910	34.520	88.718	44.520	42.120	94.609	56.311	52.154	92.618	64.514	60.609	93.947	76.162	70.712	92.844	84.506	80.263	94.979	92.923	86.601	93.197	100.000	91.204	91.204	100.000	Kepala Subbid Hukum dan Peraturan Perundang Undanan		

PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA SEKRETARIAT BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2023 (dalam %)																												TARGET AKHIR TAHUN 2023	PENANGGUNGJAWAB								
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember				
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	9.120	8.772	96.184	17.450	16.120	92.378	25.780	24.040	93.251	34.900	30.120	86.304	43.200	39.920	92.407	49.490	44.240	89.392	54.910	50.360	91.714	63.280	60.360	95.386	74.690	71.400	95.595	80.910	79.310	98.022	93.280	88.150	94.500	100.000	92.820	92.820	100.000	Kepala Subbag Keuangan
		Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	4.530	4.530	100.000	4.530	4.530	100.000	4.530	4.530	100.000	4.530	4.530	100.000	4.530	4.530	100.000	4.530	4.530	100.000	4.530	4.530	100.000	4.530	4.530	100.000	4.530	4.530	100.000	4.530	4.530	100.000	4.530	4.530	100.000	4.530	4.530	100.000	4.530	Kepala Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
		Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	6.120	5.870	95.915	12.030	11.480	95.428	18.610	17.720	95.218	24.730	20.210	81.723	30.850	27.270	88.395	36.970	30.160	81.580	44.730	41.410	92.578	60.850	57.030	93.722	66.970	61.260	91.474	70.730	64.510	91.206	74.850	68.260	91.196	80.000	74.820	93.525	80.000	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA SEKRETARIAT BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2024 (dalam %)																												TARGET AKHIR TAHUN 2024	PENANGGUNGJAWAB										
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember						
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian					
1	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	8.480	7.780	91.745	16.610	15.820	95.244	24.210	24.540	101.363	32.610	27.850	85.403	44.330	40.180	90.638	50.210	46.130	91.874	63.201	58.544	92.631	72.361	68.577	94.771	86.301	77.641	89.965	88.364	84.123	95.301	91.024	86.132	94.626	94.620	89.712	94.813	94.620	Kepala Subbag Keuangan		
		Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	5.130	5.130	100.000	5.130	5.130	100.000	5.130	5.130	100.000	5.130	5.130	100.000	5.130	5.130	100.000	5.130	5.130	100.000	5.130	5.130	100.000	5.130	5.130	100.000	5.130	5.130	100.000	5.130	5.130	100.000	5.130	5.130	100.000	5.130	4.723	92.066	5.130	Kepala Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan		
		Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	5.240	4.810	91.794	11.030	10.320	93.563	17.610	16.560	94.037	25.140	22.630	90.016	31.560	28.910	91.603	37.030	33.260	89.819	46.147	40.403	87.552	52.631	48.701	92.532	64.514	59.301	91.920	72.563	65.211	89.868	78.184	73.261	93.703	80.610	73.306	90.939	80.610	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian		

PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024
UPTB PUSAT INFORMASI DAN APLIKASI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA UPTB PUSAT INFORMASI DAN APLIKASI BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2023 (dalam %)																														TARGET AKHIR TAHUN 2023	PENANGGUNGJAWAB								
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober					November			Desember				
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian					
1	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	6.430	5.043	78.429	12.790	11.179	87.404	18.190	16.188	88.994	23.310	18.810	80.695	28.440	24.430	85.900	33.570	29.930	89.157	39.310	34.520	87.815	43.460	41.280	94.984	47.150	44.280	93.913	52.310	50.120	95.813	57.460	52.380	91.159	61.600	58.150	94.399	61.600	Kepala UPTB Puslia		
2	Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	Persentase Meningkatnya Kerjasama	8.150	7.761	95.227	16.123	15.138	93.891	24.540	23.791	96.948	19.310	14.880	77.059	28.530	25.170	88.223	37.760	32.900	87.129	49.310	45.630	92.537	58.530	53.690	91.731	67.760	62.620	92.414	77.310	76.730	99.250	89.530	87.290	97.498	100.000	93.720	93.720	100.000	Kepala Subbag Tata Usaha		
3	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	6.430	5.818	90.482	12.710	11.559	90.944	18.920	17.803	94.096	16.520	13.510	81.780	20.660	17.330	83.882	24.800	21.860	88.145	36.520	31.290	85.679	40.660	36.610	90.039	49.180	46.580	94.713	56.520	49.390	87.385	61.660	58.310	94.567	78.000	72.380	92.795	78.000	Kepala Seksi Pengelolaan Pengembangan Sistem dan Aplikasi Pendapatan Serta Infrastruktur Jaringan		
4	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	3.140	2.414	76.879	6.530	5.022	76.907	8.773	7.219	82.287	21.290	18.820	88.398	26.420	23.430	88.683	31.550	27.870	88.336	32.390	30.300	93.547	33.470	31.260	93.397	34.510	32.320	93.654	36.390	34.510	94.834	38.470	35.350	91.890	40.530	36.880	90.994	40.530	Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi		
5	Meningkatnya Kecepatan Internet	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100.000	100 MBPs	Kepala Seksi Pengelolaan Pengembangan Sistem dan Aplikasi Pendapatan Serta Infrastruktur Jaringan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA UPTB PUSAT INFORMASI DAN APLIKASI BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2024 (dalam %)																														TARGET AKHIR TAHUN 2024	PENANGGUNGJAWAB								
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober					November			Desember				
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	5.630	4.870	86.501	11.790	10.120	85.835	17.210	15.260	88.669	21.230	18.190	85.681	27.070	24.460	90.358	33.740	26.760	79.312	38.711	36.601	94.549	40.401	36.601	90.594	45.126	43.316	95.989	51.502	47.778	92.769	53.601	49.901	93.097	62.040	57.261	92.297	62.040	Kepala UPTB Puslia		
2	Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	Persentase Meningkatnya Kerjasama	8.320	7.910	95.072	15.460	15.210	98.383	23.040	21.510	93.359	18.530	15.250	82.299	27.280	24.630	90.286	35.610	30.060	84.414	46.601	40.402	86.698	53.301	48.201	90.432	62.201	53.633	86.225	78.112	64.551	82.639	83.334	76.601	91.920	91.120	82.362	90.388	91.120	Kepala Subbag Tata Usaha		
3	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	5.430	4.160	76.611	11.710	10.840	92.570	17.920	15.450	86.217	15.680	12.480	79.592	19.850	17.150	86.398	23.360	19.420	83.134	34.111	30.306	88.845	41.416	36.601	88.374	52.601	48.023	91.297	63.314	53.532	84.550	71.712	62.254	86.811	78.820	71.203	90.336	78.820	Kepala Seksi Pengelolaan Pengembangan Sistem dan Aplikasi Pendapatan Serta Infrastruktur Jaringan		
4	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	3.620	2.810	77.624	5.710	4.120	72.154	7.270	6.010	82.669	20.130	17.510	86.985	27.730	24.020	86.621	30.180	27.510	91.153	32.601	29.601	90.798	34.611	31.314	90.474	36.255	32.162	88.711	38.162	35.260	92.396	40.102	37.555	93.649	41.230	38.205	92.663	41.230	Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi		
5	Meningkatnya Kecepatan Internet	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100.000	100 MBPs	Kepala Seksi Pengelolaan Pengembangan Sistem dan Aplikasi Pendapatan Serta Infrastruktur Jaringan

PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024
UPTB PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA UPTB PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2023 (dalam %)																												TARGET AKHIR TAHUN 2023	PENANGGUNGJAWAB								
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember				
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	5.420	5.010	92.435	10.780	9.992	92.690	15.180	14.883	98.043	20.600	21.330	103.544	26.020	27.880	107.148	38.140	42.140	110.488	50.620	47.410	93.659	66.100	63.320	95.794	73.140	69.710	95.310	82.620	81.940	99.177	90.100	88.910	98.679	100.000	93.630	93.630	100.000	Kepala UPTB PPD
2	Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggakan Pajak	0.870	0.775	89.080	1.740	1.669	95.920	2.610	2.580	98.851	3.480	3.170	91.092	4.350	4.130	94.943	5.220	4.320	82.759	6.480	6.170	95.216	7.350	7.020	95.510	8.220	7.820	95.134	8.520	7.400	86.854	9.350	8.720	93.262	10.530	10.020	95.157	10.530	Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan
3	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	0.770	0.669	86.883	1.540	1.443	93.701	2.310	2.180	94.372	3.080	2.738	88.896	3.850	3.170	82.338	4.620	4.090	88.528	4.920	4.120	83.740	5.180	4.850	93.629	5.620	5.130	91.281	7.170	6.620	92.329	8.180	8.040	98.289	9.330	9.030	96.785	9.330	Kepala Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA UPTB PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2024 (dalam %)																												TARGET AKHIR TAHUN 2024	PENANGGUNGJAWAB										
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember						
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	4.580	4.140	90.393	9.170	8.220	89.640	14.000	12.230	87.357	19.240	14.280	74.220	24.510	20.780	84.782	36.710	35.620	97.031	52.633	48.515	92.175	63.545	58.667	92.324	72.664	68.682	94.520	83.336	78.782	94.535	91.912	88.887	96.709	100.000	92.362	92.362	100.000	Kepala UPTB PPD		
2	Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggakan Pajak	0.670	0.420	62.687	1.440	1.012	70.278	2.310	1.840	79.654	3.410	3.120	91.496	3.920	3.620	92.347	4.280	3.170	74.065	5.011	4.633	92.451	6.322	6.024	95.285	7.244	6.912	95.417	8.190	7.634	93.211	9.116	8.622	94.581	10.530	9.874	93.770	10.530	Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan		
3	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	0.620	0.490	79.032	1.240	1.040	83.871	2.510	2.080	82.869	2.810	2.620	93.238	3.740	3.360	89.840	4.150	3.450	83.133	5.206	4.811	92.420	6.322	5.911	93.499	7.266	6.851	94.294	8.001	7.664	95.788	8.263	7.921	95.858	9.330	8.601	92.186	9.330	Kepala Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan		

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN YANG LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR
 BIDANG PAJAK BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA BIDANG PAJAK BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2021 (dalam %)																												TARGET AKHIR TAHUN 2021	PENANGGUNGJAWAB								
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember				
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Target Terhadap GDP	0.118	0.110	93.220	0.183	0.174	95.982	0.274	0.263	95.985	0.388	0.341	87.887	0.402	0.387	96.269	0.496	0.462	93.145	0.482	0.425	88.174	0.503	0.473	94.036	0.510	0.483	94.706	0.662	0.647	97.734	0.813	0.796	97.909	0.926	0.886	95.680	0.926	Kepala Bidang Pajak
2	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase meningkatnya Pendaftaran Objek Pajak Baru	1.025	1.003	97.854	2.145	2.123	98.974	3.154	3.021	95.763	3.235	3.147	97.280	4.015	3.786	94.296	5.201	5.042	96.943	5.162	5.042	97.675	6.588	6.421	97.465	7.455	7.256	97.331	8.032	7.453	92.791	9.879	9.124	92.358	11.635	11.126	95.625	11.635	Kepala Subbid Pajak
3	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	0.456	0.402	88.158	1.003	0.936	93.320	1.526	1.463	95.872	1.613	1.589	98.512	1.780	1.695	95.225	2.135	1.936	90.679	2.613	2.332	89.246	3.214	3.025	94.119	4.206	4.003	95.174	5.204	4.996	96.003	5.362	5.226	97.464	6.889	6.403	92.945	6.889	Kepala Subbid Sengketa Pajak dan Doleansi
4	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	7.988	7.632	95.543	15.884	15.014	94.523	23.454	22.631	96.491	33.261	32.142	96.636	39.632	37.625	94.936	43.695	42.102	96.354	58.362	55.236	94.644	68.478	62.346	91.045	71.663	68.965	96.235	78.256	73.632	94.091	84.211	80.206	95.244	94.152	90.258	95.864	94.152	Kepala Subbid Pembukuan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA BIDANG PAJAK BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2022 (dalam %)																											TARGET AKHIR TAHUN 2022	PENANGGUNGJAWAB									
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September					Oktober			November			Desember		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Target Terhadap GDP	0.120	0.102	85.000	0.210	0.162	77.143	0.330	0.303	91.818	0.410	0.401	97.805	0.415	0.410	98.795	0.512	0.498	97.266	0.517	0.501	96.905	0.520	0.514	98.846	0.523	0.518	99.044	0.674	0.634	94.065	0.881	0.843	95.687	1.000	0.921	92.100	1.000	Kepala Bidang Pajak
2	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase meningkatnya Pendaftaran Objek pajak Baru	1.090	0.920	84.404	2.180	2.001	91.789	3.270	3.020	92.355	3.650	3.626	99.342	4.135	4.127	99.807	5.170	4.952	95.783	5.350	5.310	99.252	6.620	6.312	95.347	7.860	7.610	96.819	8.130	7.940	97.663	10.240	9.770	95.410	12.640	12.310	97.389	12.640	Kepala Subbid Pajak
3	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	0.500	0.358	71.600	1.100	1.000	90.909	1.600	1.366	85.375	1.625	1.620	99.692	1.972	1.925	97.617	2.475	2.456	99.232	2.825	2.412	85.381	3.340	3.050	91.317	4.820	4.540	93.996	5.620	5.240	93.238	6.130	5.810	94.780	7.120	6.860	96.348	7.120	Kepala Subbid Sengketa Pajak dan Doleansi
4	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	8.270	8.070	97.582	16.600	16.260	97.952	24.900	23.190	93.133	35.000	30.170	86.200	41.260	39.440	95.589	45.000	43.820	97.378	60.000	59.230	98.717	70.000	69.144	98.777	75.000	73.280	97.707	80.000	78.920	98.650	88.000	86.720	98.545	97.000	93.430	96.320	97.000	Kepala Subbid Pembukuan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA BIDANG PAJAK BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2023 (dalam %)																												TARGET AKHIR TAHUN 2023	PENANGGUNGJAWAB								
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember				
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Target Terhadap GDP	0.120	0.104	86.667	0.210	0.181	86.190	0.330	0.312	94.545	0.450	0.421	93.556	0.570	0.415	72.807	0.630	0.576	91.429	0.780	0.665	85.256	0.850	0.792	93.176	0.880	0.802	91.136	0.930	0.884	95.054	1.120	1.020	91.071	1.200	1.130	94.167	1.200	Kepala Bidang Pajak
2	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase meningkatnya Pendaftaran Objek Pajak Baru	1.090	0.982	90.092	2.180	2.090	95.872	3.270	3.180	97.248	4.360	3.923	89.977	5.450	4.811	88.275	6.550	5.180	79.084	7.360	7.110	96.603	8.450	8.090	95.740	9.550	9.130	95.602	10.360	9.480	91.506	11.750	11.110	94.553	13.110	12.430	94.813	13.110	Kepala Subbid Pajak
3	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	0.500	0.417	83.400	1.100	1.043	94.818	1.600	1.412	88.250	2.100	1.819	86.619	2.600	2.125	81.731	3.100	2.733	88.161	3.910	3.230	82.609	4.160	3.950	94.952	4.410	4.120	93.424	5.300	5.260	99.245	5.450	5.400	99.083	6.000	5.830	97.167	6.000	Kepala Subbid Sengketa Pajak dan Doleansi
4	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	8.270	8.190	99.033	16.600	16.478	99.265	24.900	24.772	99.486	33.170	32.870	99.096	41.440	40.130	96.839	49.710	47.710	95.977	63.170	61.210	96.897	71.440	68.820	96.333	76.710	71.440	93.130	80.170	79.280	98.890	91.440	87.180	95.341	100.000	93.640	93.640	100.000	Kepala Subbid Pembukuan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA BIDANG PAJAK BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2024 (dalam %)																											TARGET AKHIR TAHUN 2024	PENANGGUNGJAWAB									
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September					Oktober			November			Desember		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Target Terhadap GDP	0.110	0.090	81.818	0.240	0.212	88.333	0.380	0.294	77.368	0.480	0.370	77.083	0.630	0.580	92.063	0.740	0.610	82.432	0.925	0.871	94.162	1.023	0.926	90.518	1.225	1.000	81.633	1.346	1.288	95.691	1.450	1.389	95.793	1.500	1.398	93.200	1.500	Kepala Bidang Pajak
2	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase meningkatnya Pendaftaran Objek Pajak Baru	1.120	1.082	96.607	2.120	2.070	97.642	3.180	3.080	96.855	4.520	4.120	91.150	5.820	5.230	89.863	6.840	6.140	89.766	7.522	7.016	93.273	8.250	7.911	95.891	9.623	8.547	88.818	10.233	9.261	90.501	12.250	11.118	90.759	14.260	13.260	92.987	14.260	Kepala Subbid Pajak
3	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	0.580	0.433	74.655	1.180	1.013	85.847	1.520	1.372	90.263	2.580	2.230	86.434	2.680	2.140	79.851	3.240	2.890	89.198	3.441	3.251	94.478	3.624	3.421	94.398	4.236	3.921	92.564	4.723	4.233	89.625	4.924	4.288	87.084	5.300	4.872	91.925	5.300	Kepala Subbid Sengketa Pajak dan Doleansi
4	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	8.070	7.790	96.530	15.400	14.440	93.766	22.900	20.200	88.210	30.070	27.130	90.223	43.140	39.260	91.006	50.280	47.170	93.815	59.864	54.727	91.236	65.362	61.610	94.260	72.554	69.325	95.550	83.621	79.621	95.217	88.792	82.366	92.763	100.000	93.360	93.360	100.000	Kepala Subbid Pembukuan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	HASIL ANALISA PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 TERHADAP TAHUN 2023 (dalam %)												TARGET AKHIR TAHUN 2024	PENANGGUNGJAWAB
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Jun	Jul	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
			(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %		
1	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah Terhadap GDP	Persentase Realisasi Penerimaan Target Terhadap GDP	86.53	117.127	94.231	87.886	139.759	105.903	130.977	116.919	124.688	145.701	136.176	123.717	1.500	Kepala Bidang Pajak
2	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase meningkatnya Pendaftaran Objek Pajak Baru	110.183	99.043	96.855	105.022	108.709	118.533	96.678	97.787	93.614	97.690	100.072	106.677	14.260	Kepala Subbid Pajak
3	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	103.837	97.124	97.167	122.595	100.706	105.745	100.650	86.608	95.170	80.475	79.407	83.568	5.300	Kepala Subbid Sengketa Pajak dan Doleansi
4	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	95.116	87.632	81.544	82.537	97.832	98.868	89.409	89.523	97.039	100.430	94.478	99.701	100.000	Kepala Subbid Pembukuan

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN YANG LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR
 BIDANG PENDAPATAN LAIN - LAIN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA BIDANG PENDAPATAN LAIN - LAIN BULAN / TARGET / REALISASI (dalam %) TAHUN 2021																												TARGET AKHIR TAHUN 2021	PENANGGUNGJAWAB								
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember				
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi		Capaian	Target	Realisasi	Capaian				
1	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	7.963	7.140	89.665	15.774	15.023	95.239	22.516	21.632	96.074	33.817	30.211	89.337	37.556	34.119	90.848	42.886	40.227	93.800	57.883	53.611	92.620	68.231	63.455	93.000	71.244	69.472	97.513	77.558	72.463	93.431	83.428	79.632	95.450	90.203	86.324	95.700	90.203	Kepala Bidang Pendapatan Lain - Lain
2	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	6.836	5.727	83.777	13.996	13.025	93.062	18.633	16.373	87.871	22.631	20.506	90.610	33.289	30.886	92.781	36.611	32.678	89.257	48.516	42.326	87.242	57.231	53.621	93.692	60.178	54.639	90.796	68.654	62.318	90.771	77.541	73.699	95.045	83.625	80.886	96.725	83.625	Kepala Subbid Retribusi
3	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	5.881	5.178	88.046	9.698	9.023	93.040	15.639	13.475	86.163	22.611	20.588	91.053	33.214	30.663	92.320	37.881	32.644	86.175	47.588	42.301	88.890	57.411	53.699	93.535	60.214	56.669	94.113	67.822	64.523	95.136	72.478	68.911	95.079	76.928	74.363	96.666	76.928	Kepala Subbid Penerimaan Pusat
4	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	5.148	4.831	93.834	9.621	8.273	85.989	16.407	14.603	89.005	21.806	18.603	85.311	27.711	24.566	88.651	31.256	27.773	88.857	38.223	36.546	95.613	41.802	37.803	90.433	46.336	41.250	89.024	57.634	52.633	91.323	65.280	61.883	94.796	71.025	67.402	94.899	71.025	Kepala Subbid Hibah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA BIDANG PENDAPATAN LAIN - LAIN BULAN / TARGET / REALISASI (dalam %) TAHUN 2022																											TARGET AKHIR TAHUN 2022	PENANGGUNGJAWAB									
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September					Oktober			November			Desember		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian						
1	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	8.150	8.015	98.344	16.480	14.408	87.427	24.810	22.181	89.403	35.000	30.190	86.257	40.000	38.810	97.025	45.000	44.126	98.058	60.000	58.421	97.368	70.000	68.110	97.300	75.000	73.250	97.667	80.000	77.810	97.363	90.000	86.710	96.344	94.520	91.720	97.038	94.520	Kepala Bidang Pendapatan Lain - Lain
2	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	7.120	6.212	87.247	14.370	13.137	91.420	21.620	20.162	93.256	25.000	24.760	99.040	35.000	31.160	89.029	40.000	39.080	97.700	50.000	47.160	94.320	60.000	57.450	95.750	65.000	62.260	95.785	72.180	69.760	96.647	80.080	77.450	96.716	86.010	83.470	97.047	86.010	Kepala Subbid Retribusi
3	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	6.520	6.102	93.589	12.180	12.002	98.539	18.780	18.190	96.858	25.000	24.030	96.120	35.000	30.111	86.031	40.000	36.180	90.450	50.000	44.030	88.060	60.000	54.210	90.350	65.000	62.330	95.892	70.900	67.780	96.704	80.180	76.210	95.049	80.710	76.130	94.325	80.710	Kepala Subbid Penerimaan Pusat
4	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	6.410	6.308	98.409	12.120	12.090	99.752	18.080	17.928	99.159	25.000	20.070	80.280	30.000	28.782	95.940	35.000	33.160	94.743	40.000	37.810	94.525	45.000	42.210	93.800	50.000	44.760	89.520	60.000	54.810	91.350	71.200	67.870	95.323	78.000	72.760	93.282	78.000	Kepala Subbid Hibah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA BIDANG PENDAPATAN LAIN - LAIN BULAN / TARGET / REALISASI (dalam %) TAHUN 2023																											TARGET AKHIR TAHUN 2023	PENANGGUNGJAWAB									
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September					Oktober			November			Desember		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian						
1	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	8.160	8.016	98.235	16.490	14.407	87.368	24.820	22.182	89.371	32.960	31.320	95.024	41.110	39.880	97.008	49.260	45.510	92.387	62.960	57.860	91.900	70.110	64.520	92.027	75.260	71.710	95.263	82.910	78.340	94.488	90.130	87.160	96.705	100.000	93.610	93.610	100.000	Kepala Bidang Pendapatan Lain - Lain
2	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	7.130	6.213	87.139	14.380	13.138	91.363	21.630	20.163	93.218	28.740	26.620	92.624	35.860	33.460	93.307	42.980	40.120	93.346	58.740	52.360	89.139	65.860	60.460	91.801	68.980	64.540	93.563	72.740	71.060	97.690	81.860	78.690	96.128	87.000	84.510	97.138	87.000	Kepala Subbid Retribusi
3	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	6.530	6.103	93.461	12.190	12.003	98.466	18.790	18.180	96.754	27.200	25.610	94.154	34.000	32.330	95.088	40.800	37.720	92.451	57.120	54.610	95.606	64.040	60.330	94.207	70.180	67.250	95.825	75.120	69.210	92.133	78.040	76.340	97.822	82.000	77.530	94.549	82.000	Kepala Subbid Penerimaan Pusat
4	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	6.420	6.309	98.271	12.130	12.091	99.678	18.090	17.929	99.110	25.700	22.180	86.304	32.580	30.120	92.449	38.860	35.630	91.688	45.170	41.280	91.388	52.580	48.560	92.355	58.860	53.360	90.656	62.170	58.140	93.518	69.580	67.930	97.629	79.000	73.160	92.608	79.000	Kepala Subbid Hibah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA BIDANG PENDAPATAN LAIN - LAIN BULAN / TARGET / REALISASI (dalam %) TAHUN 2024																												TARGET AKHIR TAHUN 2024	PENANGGUNGJAWAB								
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember				
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	7.460	7.220	96.783	15.140	14.030	92.668	23.120	21.100	91.263	32.460	29.220	90.018	42.740	38.920	91.062	50.120	46.510	92.797	58.584	54.721	93.406	64.231	60.921	94.847	77.321	72.135	93.293	86.132	80.921	93.950	91.114	87.772	96.332	94.970	89.724	94.476	94.970	Kepala Bidang Pendapatan Lain - Lain
2	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	6.890	6.020	87.373	14.780	13.230	89.513	21.100	19.530	92.559	26.890	26.020	96.765	34.580	33.230	96.096	42.600	39.530	92.793	57.778	53.611	92.788	68.664	61.774	89.966	69.225	64.552	93.250	73.642	68.911	93.576	80.810	76.633	94.831	89.140	86.334	96.852	89.140	Kepala Subbid Retribusi
3	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	6.720	6.130	91.220	12.680	12.140	95.741	17.410	16.780	96.381	6.720	6.130	91.220	12.680	12.140	95.741	17.410	16.780	96.381	32.254	28.622	88.739	41.366	38.774	93.734	64.611	58.936	91.217	78.781	71.263	90.457	80.180	74.551	92.980	83.480	79.633	95.392	83.480	Kepala Subbid Penerimaan Pusat
4	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	6.880	5.710	82.994	11.830	11.110	93.914	17.090	15.620	91.398	6.880	5.710	82.994	11.830	11.110	93.914	17.090	15.620	91.398	28.514	22.361	78.421	38.699	34.599	89.405	47.306	43.655	92.282	61.205	57.236	93.515	73.306	68.911	94.005	84.150	80.019	95.091	84.150	Kepala Subbid Hibah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	HASIL ANALISA PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 TERHADAP TAHUN 2023 (dalam %)												TARGET AKHIR TAHUN 2024	PENANGGUNGJAWAB
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
			(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %		
1	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	90.070	97.383	95.122	93.295	97.593	102.197	94.575	94.422	100.593	103.295	100.702	95.849	94.970	Kepala Bidang Pendapatan Lain - Lain
2	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	96.894	100.700	96.861	97.746	99.313	98.529	102.389	102.173	100.019	96.976	97.386	102.158	89.140	Kepala Subbid Retribusi
3	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	100.442	101.141	92.299	23.936	37.550	44.486	52.412	64.270	87.637	102.966	97.657	102.712	83.480	Kepala Subbid Penerimaan Pusat
4	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	90.506	91.887	87.121	25.744	36.886	43.839	54.169	71.250	81.812	98.445	101.444	109.375	84.150	Kepala Subbid Hibah

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN YANG LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR
 BIDANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA BIDANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2021 (dalam %)																														TARGET AKHIR TAHUN 2021	PENANGGUNGJAWAB						
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober					November			Desember		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	2.000	1.881	94.070	2.000	1.881	94.070	2.000	1.881	94.070	2.000	1.881	94.070	2.000	1.881	94.070	2.000	1.881	94.070	2.000	1.881	94.070	2.000	1.881	94.070	2.000	1.881	94.070	2.000	1.881	94.070	2.000	1.881	94.070	Level 2	Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan			
2	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	7.942	7.232	92.215	15.426	13.635	88.390	22.758	20.945	92.034	27.928	25.648	91.836	38.963	35.215	90.379	47.856	44.163	92.282	58.962	55.214	93.643	67.822	63.566	93.725	73.133	68.446	93.591	77.822	74.962	96.325	86.952	82.447	94.819	94.251	90.902	96.447	94.251	Kepala Subbid Wilayah I
3	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	1.313	1.214	92.460	2.853	2.655	93.074	4.216	3.982	94.450	4.236	4.048	95.562	6.352	6.039	95.074	7.253	6.863	94.626	8.995	8.015	89.105	10.882	9.021	82.895	12.366	11.875	96.031	14.263	12.566	88.103	15.633	13.866	88.697	20.213	19.233	95.152	20.213	Kepala Subbid Wilayah II
4	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	1.210	1.142	94.357	2.236	2.184	97.674	3.478	3.218	92.524	3.892	3.669	94.270	4.812	4.316	89.692	4.887	4.526	92.613	6.582	6.024	91.522	8.142	7.825	96.107	9.632	9.026	93.708	11.284	10.284	91.138	12.882	12.185	94.589	16.562	14.578	88.021	14.290	Kepala Subbid Wilayah III

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA BIDANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2022 (dalam %)																																				TARGET AKHIR TAHUN 2022	PENANGGUNGJAWAB
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember				
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian					
1	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	Level 3	Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan			
2	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	8.090	7.090	87.639	16.420	15.412	93.861	24.750	23.175	93.636	30.000	28.784	95.947	40.000	36.793	91.983	50.000	45.102	90.204	60.000	56.710	94.517	70.000	64.640	92.343	75.000	72.810	97.080	80.280	77.810	96.923	89.890	85.460	95.072	97.730	92.920	95.078	97.730	Kepala Subbid Wilayah I
3	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	1.500	1.115	74.333	3.100	2.221	71.645	4.600	4.160	90.435	5.000	4.782	95.640	7.000	5.371	76.729	8.000	7.023	87.788	10.000	8.210	82.100	12.000	10.120	84.333	14.000	12.850	91.786	15.650	14.430	92.204	17.070	15.720	92.091	18.730	17.730	94.661	18.730	Kepala Subbid Wilayah II
4	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	1.190	1.105	92.857	2.380	2.272	95.462	3.570	3.120	87.395	4.000	3.880	97.000	5.000	4.555	91.100	6.000	5.678	94.633	7.000	5.840	83.429	9.000	7.450	82.778	10.000	8.190	81.900	12.120	11.020	90.924	13.030	12.140	93.170	14.290	13.590	95.101	14.290	Kepala Subbid Wilayah III

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA BIDANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2023 (dalam %)																											TARGET AKHIR TAHUN 2023	PENANGGUNGJAWAB									
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September					Oktober			November			Desember		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	Level 3	Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan			
2	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	8.080	7.080	87.624	16.430	15.413	93.810	24.760	23.175	93.599	32.840	30.770	93.697	40.930	38.810	94.820	49.020	47.070	96.022	62.840	57.890	92.123	68.930	62.130	90.135	75.020	70.070	93.402	81.840	78.280	95.650	90.130	86.160	95.595	100.000	93.270	93.270	100.000	Kepala Subbid Wilayah I
3	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	1.510	1.116	73.907	3.110	2.222	71.447	4.610	4.160	90.239	6.100	5.152	84.459	7.400	5.890	79.595	9.100	7.990	87.802	11.180	10.560	94.454	13.410	11.260	83.967	14.190	12.320	86.822	15.180	15.060	99.209	16.410	15.260	92.992	18.000	17.150	95.278	18.000	Kepala Subbid Wilayah II
4	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	1.180	1.104	93.559	2.390	2.273	95.105	3.580	3.120	87.151	5.190	4.110	79.191	6.210	5.020	80.837	7.230	6.190	85.615	8.190	7.850	95.849	8.420	8.020	95.249	9.230	8.870	96.100	10.290	9.830	95.530	11.480	11.220	97.735	13.240	12.480	94.260	13.240	Kepala Subbid Wilayah III

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA BIDANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2024 (dalam %)																														TARGET AKHIR TAHUN 2024	PENANGGUNGJAWAB						
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober					November			Desember		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	Level 3	Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan			
2	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	7.810	6.680	85.531	15.730	14.320	91.036	23.160	21.480	92.746	33.140	31.230	94.237	41.410	39.620	95.677	49.560	45.260	91.324	58.712	53.601	91.295	64.712	60.301	93.184	77.105	70.164	90.998	86.201	81.603	94.666	89.102	82.306	92.373	92.460	84.511	91.403	92.460	Kepala Subbid Wilayah I
3	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	1.740	1.130	64.943	3.450	2.820	81.739	4.230	3.550	83.924	5.610	4.490	80.036	6.480	5.210	80.401	7.230	6.120	84.647	8.625	8.147	94.458	9.630	8.603	89.335	11.241	9.633	85.695	13.254	11.844	89.362	15.056	13.624	90.489	17.280	15.203	87.980	17.280	Kepala Subbid Wilayah II
4	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	1.320	1.020	77.273	2.540	2.140	84.252	3.320	3.030	91.265	4.890	3.750	76.687	5.260	4.510	85.741	5.170	4.220	81.625	6.302	5.824	92.415	7.855	7.236	92.120	8.632	8.102	93.860	9.206	8.723	94.753	11.255	10.014	88.974	13.020	11.988	92.074	13.020	Kepala Subbid Wilayah III

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	HASIL ANALISA PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 TERHADAP TAHUN 2023 (dalam %)												TARGET AKHIR TAHUN 2024	PENANGGUNGJAWAB
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
			(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %		
1	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	Level I	Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan
2	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	94,330	92,909	92,686	101,495	102,087	96,135	92,591	97,056	100,134	104,245	95,527	90,609	92,460	Kepala Subbid Wilayah I
3	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	101,254	126,913	85,337	87,151	88,455	76,596	77,150	76,403	78,190	78,645	89,279	88,647	17,280	Kepala Subbid Wilayah II
4	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Kemanan	Persentase Berkurangnya Tindakan Represif	92,391	94,149	97,115	91,241	89,841	68,174	74,191	90,224	91,342	88,739	89,251	96,058	13,020	Kepala Subbid Wilayah III

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN YANG LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR																																								
BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN																																								
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN PENDAPATAN DAERAH BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2021 (dalam %)																											TARGET AKHIR TAHUN 2021	PENANGGUNGJAWAB									
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September					Oktober			November			Desember		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Potensi Sumber Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	5.833	5.362	91.925	11.205	9.863	88.023	17.856	16.444	92.091	23.667	21.010	88.774	27.963	25.614	91.599	33.261	30.542	91.825	37.266	34.516	92.621	42.592	40.256	94.515	47.992	44.638	93.011	57.888	55.619	96.080	67.284	63.288	94.060	72.362	65.888	91.053	72.362	Kepala Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah
2	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	6.206	5.806	93.555	11.921	10.244	85.932	17.725	15.633	88.197	21.894	18.915	86.433	27.633	25.136	90.963	33.562	30.147	89.825	38.622	35.611	92.204	43.114	39.996	92.768	47.516	44.258	93.143	57.713	53.632	92.929	67.742	65.213	96.267	78.118	73.336	93.878	78.118	Kepala Subbid Pengembangan Statistik
3	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama	5.236	4.877	93.146	12.126	10.881	89.733	18.554	16.277	87.728	27.633	25.488	92.238	33.601	30.177	89.810	43.669	39.664	90.829	47.772	43.665	91.403	57.228	53.611	93.680	67.822	61.326	90.422	71.225	68.541	96.232	79.266	76.774	96.856	83.611	80.766	96.597	83.611	Kepala Subbid Pengolahan Pendapatan Daerah
4	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	6.334	6.012	94.916	13.883	12.823	92.365	20.114	17.446	86.736	27.621	24.632	89.179	37.822	34.411	90.983	42.562	38.166	89.672	57.236	52.699	92.073	57.730	54.511	94.424	70.215	67.716	96.441	76.633	71.742	93.618	86.644	82.283	94.967	89.977	83.633	92.949	89.977	Kepala Subbid Hukum dan Peraturan Perundang Undanan
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN PENDAPATAN DAERAH BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2022 (dalam %)																											TARGET AKHIR TAHUN 2022	PENANGGUNGJAWAB									
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September					Oktober			November			Desember		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Potensi Sumber Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	6.200	5.208	84.000	12.800	11.080	86.563	19.400	16.140	83.196	25.000	21.696	86.794	30.000	28.093	93.643	35.000	34.073	97.351	40.000	36.960	92.400	45.000	41.560	92.356	50.000	45.730	91.460	60.000	56.960	94.933	70.000	66.710	95.300	79.000	74.510	94.316	79.000	Kepala Bidang Pengembangan dan Pengolah Pendapatan Daerah
2	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	6.910	6.091	88.148	13.360	11.360	85.030	20.270	18.127	89.428	25.000	23.178	92.712	30.000	29.738	99.127	35.000	34.708	99.166	40.000	36.440	91.100	45.000	41.830	92.956	50.000	46.920	93.840	60.730	55.440	91.289	71.020	67.090	94.466	82.330	79.340	96.368	82.330	Kepala Subbid Pengembangan Statistik
3	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama	7.610	7.502	98.581	14.950	14.705	98.361	21.170	20.870	98.583	30.000	26.279	87.597	35.000	34.601	98.860	45.000	40.282	89.516	50.000	46.270	92.540	60.000	54.690	91.150	70.000	66.560	95.086	75.410	71.470	94.775	82.820	77.190	93.202	92.000	86.750	94.293	92.000	Kepala Subbid Pengolahan Pendapatan Daerah
4	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	7.820	6.802	86.982	16.150	14.105	87.337	23.970	21.197	88.431	30.000	26.384	87.947	40.000	35.605	89.013	45.000	42.326	94.058	60.000	53.840	89.733	70.000	67.410	96.300	75.000	72.830	97.107	81.290	76.840	94.526	90.170	86.410	95.830	98.000	92.830	94.724	98.000	Kepala Subbid Hukum dan Peraturan Perundang Undanan
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN PENDAPATAN DAERAH BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2023 (dalam %)																											TARGET AKHIR TAHUN 2023	PENANGGUNGJAWAB									
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September					Oktober			November			Desember		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Potensi Sumber Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	6.210	5.209	83.881	12.810	11.080	86.495	19.410	16.150	83.205	25.600	23.470	91.680	31.800	29.750	93.553	37.730	35.780	94.832	45.160	41.250	91.342	55.280	51.210	92.637	62.730	57.740	92.045	66.120	60.820	91.984	72.280	68.720	95.075	80.000	75.740	94.675	80.000	Kepala Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah
2	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	6.920	6.092	88.035	13.370	11.360	84.966	20.280	18.128	89.389	27.180	25.333	93.205	33.380	30.670	91.881	39.580	36.170	91.385	47.180	44.660	94.659	53.380	49.620	92.956	69.580	66.360	95.372	73.180	68.160	93.140	77.380	69.320	89.584	83.000	80.520	97.012	83.000	Kepala Subbid Pengembangan Statistik
3	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama	7.620	7.503	98.465	14.940	14.705	98.427	21.180	20.880	98.584	31.790	28.710	90.311	39.610	35.620	89.927	46.820	42.340	90.431	53.790	50.230	93.382	69.610	63.520	91.251	76.820	72.260	94.064	80.790	72.190	89.355	86.610	80.360	92.784	93.000	88.160	94.796	93.000	Kepala Subbid Pengolahan Pendapatan Daerah
4	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	7.830	6.803	86.884	16.160	14.105	87.283	23.980	21.198	88.399	31.840	28.890	90.735	40.050	37.820	94.432	48.260	44.440	92.085	53.840	49.780	92.459	60.050	54.610	90.941	72.660	69.130	95.142	82.840	77.470	93.518	90.050	87.310	96.957	100.000	93.130	93.130	100.000	Kepala Subbid Hukum dan Peraturan Perundang Undanan
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN PENDAPATAN DAERAH BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2024 (dalam %)																											TARGET AKHIR TAHUN 2024	PENANGGUNGJAWAB									
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September					Oktober			November			Desember		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Potensi Sumber Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	6.520	5.340	81.902	12.560	11.180	89.013	18.610	16.650	89.468	24.260	21.560	88.871	20.430	27.830	136.221	35.250	31.240	88.624	46.233	42.633	92.213	53.644	48.756	90.888	61.911	54.336	87.765	72.944	67.507	92.546	75.624	70.104	92.701	81.630	78.152	95.739	81.630	Kepala Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah
2	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	6.320	5.850	92.563	12.580	11.730	93.243	19.210	18.100	94.222	28.420	24.520	86.277	32.620	29.150	89.362	36.280	33.180	91.455	46.253	42.562	92.020	57.824	53.699	92.866	64.577	59.632	92.342	75.604	70.702	93.516	80.256	76.639	95.493	83.480	73.132	87.604	83.480	Kepala Subbid Pengembangan Statistik
3	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama	7.120	6.430	90.309	13.640	12.540	91.935	20.130	19.190	95.330	28.720	24.130	84.018	38.510	35.140	91.249	42.580	38.520	90.465	56.301	50.264	89.277	69.273	64.536	93.162	76.306	72.562	95.093	81.026	75.164	92.765	86.903	80.502	92.634	93.280	85.611	91.779	93.280	Kepala Subbid Pengolahan Pendapatan Daerah
4	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	6.530	5.540	84.839	15.440	14.090	91.138	22.330	21.020	94.133	27.830	23.620	84.872	38.910	34.520	88.718	44.520	42.120	94.609	56.311	52.154	92.618	64.514	60.609	93.947	76.162	70.712	92.844	84.506	80.263	94.979	92.923	86.601	93.197	100.000	91.204	91.204	100.000	Kepala Subbid Hukum dan Peraturan Perundang Undanan
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	HASIL ANALISA PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 TERHADAP TAHUN 2023 (dalam %)																											TARGET AKHIR TAHUN 2024	PENANGGUNGJAWAB									
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September					Oktober			November			Desember		
			(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %			(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %		
1	Meningkatnya Potensi Sumber Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah			102.515			100.903			103.096			91.862			93.546			87.311			103.353			105.033			94.105			110.995			102.014			103.185	81.630	Kepala Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah
2	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah			96.028			103.257			99.896			96.791			95.044			91.733			95.302			92.404			89.861			103.729			110.558			90.825	83.480	Kepala Subbid Pengembangan Statistik
3	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama			85.699			85.277			91.906			84.047			98.652			90.978			100.068			98.426			100.418			104.120			100.177			97.109	93.280	Kepala Subbid Pengolahan Pendapatan Daerah
4	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi			81.435			99.894			99.160			81.758			91.274			94.779			104.769			110.985			102.288			103.605			99.188			97.932	100.000	Kepala Subbid Hukum dan Peraturan Perundang Undanan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA SEKRETARIAT BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2021 (dalam %)																											TARGET AKHIR TAHUN 2021	PENANGGUNGJAWAB												
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September					Oktober			November			Desember					
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian						
1	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	8.252	7.846	95.075	15.125	13.263	87.691	23.214	20.254	87.250	26.333	22.451	85.257	37.811	34.564	91.412	42.889	38.881	92.987	57.775	54.218	93.843	67.922	64.123	94.407	72.886	68.991	94.656	79.633	74.821	93.957	87.882	84.556	96.215	91.912	87.456	95.152	91.912	Kepala Subbag Keuangan			
		Persentase Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran	6.727	6.136	91.215	6.727	6.136	91.215	6.727	6.136	91.215	6.727	6.136	91.215	6.727	6.136	91.215	6.727	6.136	91.215	6.727	6.136	91.215	6.727	6.136	91.215	6.727	6.136	91.215	6.727	6.136	91.215	6.727	6.136	91.215	6.727	6.136	91.215	6.727	6.136	91.215	6.727	Kepala Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
		Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	4.148	3.887	93.708	9.885	9.025	91.300	15.447	14.663	94.925	17.336	15.334	88.452	27.254	24.115	88.482	26.622	23.991	90.117	37.556	33.421	88.990	40.882	36.552	89.409	47.662	44.725	93.838	56.866	53.446	93.986	62.554	57.776	92.362	69.994	64.211	91.738	69.994	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian			

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA SEKRETARIAT BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2022 (dalam %)																											TARGET AKHIR TAHUN 2022	PENANGGUNGJAWAB									
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September					Oktober			November			Desember		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	9.120	8.012	87.851	17.450	16.045	91.948	25.780	23.708	91.963	30.000	28.190	93.967	40.000	38.120	95.300	45.000	41.249	91.664	60.000	48.190	80.317	70.000	58.120	83.029	75.000	61.249	81.665	83.830	79.090	94.346	91.390	87.420	95.656	98.000	91.740	93.612	98.000	Kepala Subbag Keuangan
		Persentase Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran	4.530	3.653	80.640	4.530	3.653	80.640	4.530	3.653	80.640	4.530	3.653	80.640	4.530	3.653	80.640	4.530	3.653	80.640	4.530	3.653	80.640	4.530	3.653	80.640	4.530	3.653	80.640	4.530	3.653	80.640	4.530	3.653	80.640	4.530	3.653	80.640	5.430	Kepala Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
		Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	6.120	5.312	86.797	12.030	10.303	85.644	18.610	16.261	87.378	20.000	19.703	98.515	30.000	25.185	83.950	30.000	28.721	95.737	40.000	34.800	87.000	45.000	41.280	91.733	50.000	45.510	91.020	60.000	54.180	90.300	70.000	67.120	95.886	78.000	73.730	94.526	78.000	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA SEKRETARIAT BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2023 (dalam %)																											TARGET AKHIR TAHUN 2023	PENANGGUNGJAWAB									
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September					Oktober			November			Desember		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	9.120	8.772	96.184	17.450	16.120	92.378	25.780	24.040	93.251	34.900	30.120	86.304	43.200	39.920	92.407	49.490	44.240	89.392	54.910	50.360	91.714	63.280	60.360	95.386	74.690	71.400	95.595	80.910	79.310	98.022	93.280	88.150	94.500	100.000	92.820	92.820	100.000	Kepala Subbag Keuangan
		Persentase Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran	4.530	4.530	100.000	4.530	4.530	100.000	4.530	4.530	100.000	4.530	4.530	100.000	4.530	4.530	100.000	4.530	4.530	100.000	4.530	4.530	100.000	4.530	4.530	100.000	4.530	4.530	100.000	4.530	4.530	100.000	4.530	4.530	100.000	4.530	4.530	100.000	4.530	Kepala Subbag Perencanaan dan Pelaporan
		Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	6.120	5.870	95.915	12.030	11.480	95.428	18.610	17.720	95.218	24.730	20.210	81.723	30.850	27.270	88.395	36.970	30.160	81.580	44.730	41.410	92.578	60.850	57.030	93.722	66.970	61.260	91.474	70.730	64.510	91.206	74.850	68.260	91.196	80.000	74.820	93.525	80.000	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA SEKRETARIAT BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2024 (dalam %)																														TARGET AKHIR TAHUN 2024	PENANGGUNGJAWAB						
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober					November			Desember		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	8.480	7.780	91.745	16.610	15.820	95.244	24.210	24.540	101.363	32.610	27.850	85.403	44.330	40.180	90.638	50.210	46.130	91.874	63.201	58.544	92.631	72.361	68.577	94.771	86.301	77.641	89.965	88.364	84.123	95.201	91.024	86.132	94.626	94.620	89.712	94.813	94.620	Kepala Subbag Keuangan
		Persentase Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran	5.130	5.130	100.000	5.130	5.130	100.000	5.130	5.130	100.000	5.130	5.130	100.000	5.130	5.130	100.000	5.130	5.130	100.000	5.130	5.130	100.000	5.130	5.130	100.000	5.130	5.130	100.000	5.130	5.130	100.000	5.130	5.130	100.000	5.130	4.723	92.066	5.130	Kepala Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
		Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	5.240	4.810	91.794	11.030	10.320	93.563	17.610	16.560	94.037	25.140	22.630	90.016	31.560	28.910	91.603	37.030	33.260	89.819	46.147	40.403	87.553	52.631	48.701	92.533	64.514	59.301	91.920	72.563	65.211	89.868	78.184	73.261	93.703	80.610	73.306	90.939	80.610	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	HASIL ANALISA PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 TERHADAP TAHUN 2023 (dalam %)												TARGET AKHIR TAHUN 2024	PENANGGUNGJAWAB
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
			(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %		
1	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	88.691	98.139	102.080	92.463	100.651	104.272	116.251	113.613	108.741	106.069	97.711	96.652	94.620	Kepala Subbag Keuangan
		Persentase Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran	113.245	113.245	113.245	113.245	113.245	113.245	113.245	113.245	113.245	113.245	113.245	104.260	5.130	Kepala Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
		Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	81.942	89.895	93.454	111.974	106.014	110.279	97.568	85.395	96.802	101.087	107.326	97.976	80.610	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN YANG LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR
UPTB PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA UPTB PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2021 (dalam %)																														TARGET AKHIR TAHUN 2021	PENANGGUNGJAWAB						
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober					November			Desember		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	3.124	2.877	92.093	7.544	7.015	92.988	13.263	11.506	86.753	17.767	14.526	81.759	27.833	25.599	91.974	41.826	38.218	91.374	37.776	34.511	91.357	57.733	54.992	95.252	71.205	68.244	95.842	82.166	78.514	95.555	88.506	84.532	95.510	91.203	89.645	98.292	91.203	Kepala UPTB PPD
2	Berkurangnya Tunggalan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggalan Pajak Daerah	0.648	0.582	89.856	1.412	1.306	92.493	2.306	2.147	93.105	2.782	2.502	89.935	3.125	2.875	92.000	3.623	3.336	92.078	4.255	3.924	92.221	5.788	5.366	92.706	6.412	6.082	94.857	7.677	7.026	91.520	8.876	8.026	90.424	9.627	8.963	93.103	9.627	Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan
3	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	0.822	0.786	95.620	1.633	1.502	91.978	2.415	2.338	96.812	3.162	3.000	94.877	3.426	3.366	98.252	3.643	3.572	98.051	3.822	3.617	94.629	5.126	4.870	95.010	6.203	5.867	94.583	7.316	7.025	96.022	8.703	8.270	95.025	11.213	10.588	94.426	11.213	Kepala Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA UPTB PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2022 (dalam %)																											TARGET AKHIR TAHUN 2022	PENANGGUNGJAWAB									
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September					Oktober			November			Desember		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	5.100	4.742	92.980	10.780	9.278	86.067	15.180	14.718	96.957	20.000	19.617	98.085	30.000	25.020	83.400	45.000	40.414	89.809	50.000	44.610	89.220	60.000	54.620	91.033	75.000	73.410	97.880	85.150	81.760	96.019	92.450	88.620	95.857	97.230	92.190	94.816	97.230	Kepala UPTB PPD
2	Berkurangnya Tunggalan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggalan Pajak Daerah	0.870	0.687	78.966	1.740	1.574	90.460	2.610	2.361	90.460	3.000	2.848	94.933	3.500	3.335	95.286	4.000	3.878	96.950	5.000	4.180	83.600	6.000	5.210	86.833	7.000	6.610	94.429	8.020	7.450	92.893	9.170	8.910	97.165	11.210	10.710	95.540	11.210	Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan
3	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	0.770	0.557	72.338	1.540	1.240	80.519	2.310	2.031	87.922	3.000	2.408	80.267	3.000	2.485	82.833	3.500	3.262	93.200	4.000	3.250	81.250	5.000	4.150	83.000	6.000	5.330	88.833	7.280	6.810	93.544	8.580	8.140	94.872	10.440	10.120	96.935	10.440	Kepala Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA UPTB PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2023 (dalam %)																											TARGET AKHIR TAHUN 2023	PENANGGUNGJAWAB									
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September					Oktober			November			Desember		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	5.420	5.010	92.435	10.780	9.992	92.690	15.180	14.883	98.043	20.600	21.330	103.544	26.020	27.880	107.148	38.140	42.140	110.488	50.620	47.410	93.659	66.100	63.320	95.794	73.140	69.710	95.310	82.620	81.940	99.177	90.100	88.910	98.679	100.000	93.630	93.630	100.000	Kepala UPTB PPD
2	Berkurangnya Tunggalan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggalan Pajak	0.870	0.775	89.080	1.740	1.669	95.920	2.610	2.580	98.851	3.480	3.170	91.092	4.350	4.130	94.943	5.220	4.320	82.759	6.480	6.170	95.216	7.350	7.020	95.510	8.220	7.820	95.134	8.520	7.400	86.854	9.350	8.720	93.262	10.530	10.020	95.157	10.530	Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan
3	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	0.770	0.669	86.883	1.540	1.443	93.701	2.310	2.180	94.372	3.080	2.738	88.896	3.850	3.170	82.338	4.620	4.090	88.528	4.900	4.120	83.740	5.180	4.850	93.629	5.620	5.130	91.281	7.170	6.620	92.329	8.180	8.040	98.289	9.330	9.030	96.785	9.330	Kepala Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA UPTB PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2024 (dalam %)																											TARGET AKHIR TAHUN 2024	PENANGGUNGJAWAB									
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September					Oktober			November			Desember		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	4.580	4.140	90.393	9.170	8.220	89.640	14.000	12.230	87.357	19.240	14.280	74.220	24.510	20.780	84.782	36.710	35.620	97.031	52.633	48.515	92.176	63.545	58.667	92.324	72.664	68.682	94.520	83.336	78.782	94.535	91.912	88.887	96.709	100.000	92.362	92.362	100.000	Kepala UPTB PPD
2	Berkurangnya Tunggalan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggalan Pajak Daerah	0.670	0.420	62.687	1.440	1.012	70.278	2.310	1.840	79.654	3.410	3.120	91.496	3.920	3.620	92.347	4.280	3.170	74.065	5.011	4.633	92.457	6.322	6.024	95.286	7.244	6.912	95.417	8.190	7.634	93.211	9.116	8.622	94.581	10.530	9.874	93.770	10.530	Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan
3	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	0.620	0.490	79.032	1.240	1.040	83.871	2.510	2.080	82.869	2.810	2.620	93.238	3.740	3.360	89.840	4.150	3.450	83.133	5.206	4.811	92.413	6.322	5.911	93.499	7.266	6.851	94.288	8.001	7.664	95.788	8.263	7.921	95.861	9.330	8.601	92.186	9.330	Kepala Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	HASIL ANALISA PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 TERHADAP TAHUN 2023 (dalam %)												TARGET AKHIR TAHUN 2024	PENANGGUNGJAWAB
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
			(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %	(Realisasi 2024/Realisasi 2023) x 100 %		
1	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	82.635	82.266	101.121	66.948	74.534	84.528	102.331	92.652	98.525	96.146	99.974	98.646	100.000	Kepala UPTB PPD
2	Berkurangnya Tunggalan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggalan Pajak Daerah	54.194	60.635	109.276	98.423	87.651	73.380	75.089	85.812	88.389	103.162	98.876	98.543	10.530	Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan
3	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	73.244	72.072	107.336	95.690	105.994	84.352	116.772	121.876	133.548	115.770	98.520	95.249	9.330	Kepala Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA ESELON II BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2023 (dalam %)																												TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH	PENANGGUNGJAWAB								
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember				
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	1.1 Persentase Pencapaian Penerimaan PAD	5.000	5.630	112.600	10.000	12.620	126.200	15.000	18.330	122.200	22.000	23.710	107.773	28.000	32.620	116.500	40.000	52.010	130.025	50.000	46.810	93.620	60.000	56.120	93.533	75.000	71.880	95.840	85.000	81.890	96.341	90.000	89.260	99.178	100.000	97.910	97.910	100.000	Kepala Badan
		1.2 Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Non DAU dan DAK	3.750	4.010	106.933	7.500	7.280	97.067	11.250	11.720	104.178	14.520	15.710	108.196	17.050	18.308	106.792	21.650	21.930	101.293	24.520	21.630	88.214	27.050	24.510	90.610	30.650	26.540	86.591	35.000	33.780	96.514	40.000	39.920	99.800	45.000	43.830	97.400	> 45	Kepala Badan
2	Meningkatnya Kemandirian Daerah Dalam Pembangunan Yang Bersumber Pada Pendanaan PAD	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi (Nilai absolut)	0.160	0.172	107.500	0.320	0.350	109.375	0.480	0.510	106.250	0.640	0.580	90.625	0.810	0.770	95.062	0.940	0.830	88.298	1.240	1.091	87.984	1.330	1.150	86.466	1.460	1.270	86.988	1.620	1.542	95.185	1.830	1.756	95.956	2.000	1.921	96.050	2.000	Kepala Badan
		3.1 Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0.070	0.061	87.143	0.140	0.132	94.286	0.210	0.187	89.048	0.280	0.203	72.500	0.360	0.291	80.833	0.420	0.373	88.810	0.580	0.520	89.655	0.660	0.590	89.394	0.720	0.684	95.000	0.780	0.703	90.128	0.860	0.812	94.419	0.920	0.913	99.239	0.920	Kepala Badan
3	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	3.2 Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	0.070	0.057	81.429	0.150	0.141	94.000	0.210	0.205	97.619	0.270	0.254	94.074	0.330	0.293	88.788	0.400	0.372	93.000	0.510	0.480	94.118	0.580	0.513	88.448	0.620	0.572	92.258	0.740	0.695	93.919	0.880	0.810	92.045	0.950	0.941	99.053	0.950	Kepala Badan
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendapatan Daerah	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	81.260	81.430	100.209	81.520	81.600	100.098	81.710	81.880	100.208	81.800	81.820	100.024	81.830	81.850	100.024	81.910	81.940	100.037	82.150	81.920	99.720	82.260	82.050	99.745	82.340	82.170	99.794	82.640	82.120	99.371	82.880	82.260	99.252	82.730	82.340	98.340	A (83,73)	Kepala Badan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA ESELON II BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2024 (dalam %)																														TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH	PENANGGUNGJAWAB						
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober					November			Desember		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah	5.120	4.430	86.523	9.180	8.720	94.989	14.560	13.730	94.299	23.720	21.430	90.346	27.380	25.440	92.915	38.560	34.630	89.808	47.530	43.620	91.774	56.030	52.880	94.378	75.000	75.030	100.040	82.820	80.190	96.824	86.340	84.150	97.464	91.970	95.990	104.371	92.210	Kepala Badan
2	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi (Nilai absolut)	0.180	0.163	90.556	0.270	0.210	77.778	0.430	0.380	88.372	0.780	0.510	65.385	1.210	1.020	84.298	1.570	1.230	78.344	1.741	1.688	95.807	1.923	1.817	94.488	2.030	1.912	94.187	2.463	2.312	93.869	3.150	2.946	93.524	4.000	3.770	94.250	6.000	Kepala Badan
		3.1 Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0.080	0.072	90.000	0.170	0.152	89.412	0.240	0.194	80.833	0.080	0.072	90.000	0.170	0.152	89.412	0.240	0.194	80.833	0.325	0.294	90.462	0.462	0.423	91.558	0.628	0.599	95.446	0.712	0.662	92.978	0.882	0.775	87.868	0.950	0.925	97.368	0.980	Kepala Badan
3	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	3.2 Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	0.070	0.062	88.571	0.140	0.128	91.429	0.230	0.215	93.478	0.210	0.170	80.952	0.410	0.320	78.046	0.630	0.470	74.603	0.516	0.502	97.306	0.645	0.621	96.279	0.762	0.698	91.601	0.824	0.795	96.481	0.942	0.881	93.524	1.000	0.945	94.500	1.180	Kepala Badan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	HASIL ANALISA PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 TERHADAP TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH (dalam %)												TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH	PENANGGUNGJAWAB
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
			(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %		
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah	4.804	9.457	14.890	23.240	27.589	37.556	47.305	57.347	81.369	86.965	91.259	104.099	92.210	Kepala Badan
2	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi (Nilai absolut)	2.717	3.500	6.333	8.500	17.000	20.500	27.800	30.283	31.867	38.533	49.100	62.833	6.000	Kepala Badan
3	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	3.1 Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	7.347	15.510	19.796	7.347	15.510	19.796	30.000	43.163	61.163	67.551	79.082	94.388	0.980	Kepala Badan
		3.2 Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	5.254	10.847	18.220	14.407	27.119	39.831	42.551	52.627	59.153	67.373	74.661	80.085	1.180	Kepala Badan

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH
 BIDANG PAJAK BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA BIDANG PAJAK BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2023 (dalam %)																												TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH	PENANGGUNGJAWAB								
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember				
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Target Terhadap GDP	0.120	0.104	86.667	0.210	0.181	86.190	0.330	0.312	94.545	0.450	0.421	93.556	0.570	0.415	72.807	0.630	0.576	91.429	0.780	0.665	85.256	0.850	0.792	93.176	0.880	0.802	91.136	0.930	0.884	95.054	1.120	1.020	91.071	1.200	1.130	94.167	1.200	Kepala Bidang Pajak
2	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase meningkatnya Pendaftaran Objek pajak Baru	1.090	0.982	90.092	2.180	2.090	95.872	3.270	3.180	97.248	4.360	3.923	89.977	5.450	4.811	88.275	6.550	5.180	79.084	7.360	7.110	96.603	8.450	8.090	95.740	9.550	9.130	95.602	10.360	9.480	91.506	11.750	11.110	94.553	13.110	12.430	94.813	13.110	Kepala Subbid Pajak
3	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	0.500	0.417	83.400	1.100	1.043	94.818	1.600	1.412	88.250	2.100	1.819	86.619	2.600	2.125	81.731	3.100	2.733	88.161	3.910	3.230	82.609	4.160	3.950	94.952	4.410	4.120	93.424	5.300	5.260	99.245	5.450	5.400	99.083	6.000	5.830	97.167	6.000	Kepala Subbid Sengketa Pajak dan Doleansi
4	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	8.270	8.190	99.033	16.600	16.478	99.265	24.900	24.772	99.486	33.170	32.870	99.096	41.440	40.130	96.839	49.710	47.710	95.977	63.170	61.210	96.897	71.440	68.820	96.333	76.710	71.440	93.130	80.170	79.280	98.890	91.440	87.180	95.341	100.000	93.640	93.640	100.000	Kepala Subbid Pembukuan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA BIDANG PAJAK BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2024 (dalam %)																												TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH	PENANGGUNGJAWAB								
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember				
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Target Terhadap GDP	0.110	0.090	81.818	0.240	0.212	88.333	0.380	0.294	77.368	0.480	0.370	77.083	0.630	0.580	92.063	0.740	0.610	82.432	0.925	0.871	94.162	1.023	0.926	90.518	1.225	1.000	81.633	1.346	1.288	95.684	1.450	1.389	95.793	1.500	1.398	93.200	1.730	Kepala Bidang Pajak
2	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase meningkatnya Pendaftaran Objek pajak Baru	1.120	1.082	96.607	2.120	2.070	97.642	3.180	3.080	96.855	4.520	4.120	91.150	5.820	5.230	89.863	6.840	6.140	89.766	7.522	7.016	93.273	8.250	7.911	95.891	9.623	8.547	88.818	10.233	9.261	90.501	12.250	11.118	90.759	14.260	13.260	92.987	14.810	Kepala Subbid Pajak
3	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	0.580	0.433	74.655	1.180	1.013	85.847	1.520	1.372	90.263	2.580	2.230	86.434	2.680	2.140	79.851	3.240	2.890	89.198	3.441	3.251	94.478	3.624	3.421	94.396	4.236	3.921	92.573	4.723	4.233	89.625	4.924	4.288	87.084	5.300	4.872	91.925	5.020	Kepala Subbid Sengketa Pajak dan Doleansi
4	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	8.070	7.790	96.530	15.400	14.440	93.766	22.900	20.200	88.210	30.070	27.130	90.223	43.140	39.360	91.006	50.280	47.170	93.815	59.984	54.727	91.236	65.362	61.610	94.260	72.554	69.325	95.550	83.621	79.621	95.217	88.792	82.366	92.763	100.000	93.360	93.360	100.000	Kepala Subbid Pembukuan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	HASIL ANALISA PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH (dalam %)												TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH	PENANGGUNGJAWAB
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
			(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %		
1	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Target Terhadap GDP	5.202	12.254	16.994	21.387	33.526	35.260	50.347	53.526	57.803	74.451	80.289	80.809	1.730	Kepala Bidang Pajak
2	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase meningkatnya Pendaftaran Objek Pajak Baru	7.306	13.977	20.797	27.819	35.314	41.458	47.373	53.417	57.711	62.532	75.071	89.534	14.810	Kepala Subbid Pajak
3	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	8.625	20.179	27.331	44.422	42.629	57.570	64.761	68.147	78.116	84.323	85.418	97.052	5.020	Kepala Subbid Sengketa Pajak dan Doleansi
4	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	7.790	14.440	20.200	27.130	39.260	47.170	54.727	61.610	69.325	79.621	82.366	93.360	100.000	Kepala Subbid Pembukuan

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH
 BIDANG PENDAPATAN LAIN - LAIN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA BIDANG PENDAPATAN LAIN - LAIN BULAN / TARGET / REALISASI (dalam %) TAHUN 2023																											TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH	PENANGGUNGJAWAB									
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September					Oktober			November			Desember		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	8.160	8.016	98.235	16.490	14.407	87.368	24.820	22.182	89.371	32.960	31.320	95.024	41.110	39.880	97.008	49.260	45.510	92.387	62.960	57.860	91.900	70.110	64.520	92.027	75.260	71.710	95.263	82.910	78.340	94.488	90.130	87.160	96.705	100.000	93.610	93.610	100.000	Kepala Bidang Pendapatan Lain - Lain
2	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	7.130	6.213	87.139	14.380	13.138	91.363	21.630	20.163	93.218	28.740	26.620	92.624	35.860	33.460	93.307	42.980	40.120	93.346	58.740	52.360	89.139	65.860	60.460	91.801	68.980	64.540	93.563	72.740	71.060	97.690	81.860	78.690	96.128	87.000	84.510	97.138	87.000	Kepala Subbid Retribusi
3	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	6.530	6.103	93.461	12.190	12.003	98.466	18.790	18.180	96.754	27.200	25.610	94.154	34.000	32.330	95.088	40.800	37.720	92.451	57.120	54.610	95.606	64.040	60.330	94.207	70.180	67.250	95.825	75.120	69.210	92.133	78.040	76.340	97.822	82.000	77.530	94.549	82.000	Kepala Subbid Penerimaan Pusat
4	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	6.420	6.309	98.271	12.130	12.091	99.678	18.090	17.929	99.110	25.700	22.180	86.304	32.580	30.120	92.449	38.860	35.630	91.688	45.170	41.280	91.388	52.580	48.560	92.355	58.860	53.360	90.656	62.170	58.140	93.518	69.580	67.930	97.629	79.000	73.160	92.608	79.000	Kepala Subbid Hibah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA BIDANG PENDAPATAN LAIN - LAIN BULAN / TARGET / REALISASI (dalam %) TAHUN 2024																											TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH	PENANGGUNGJAWAB									
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September					Oktober			November			Desember		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	7.460	7.220	96.783	15.140	14.030	92.668	23.120	21.100	91.263	32.460	29.220	90.018	42.740	38.920	91.062	50.120	46.510	92.797	58.584	54.721	93.406	64.231	60.921	94.847	77.321	72.135	93.293	86.132	80.921	93.950	91.114	87.772	96.332	94.970	89.724	94.476	95.430	Kepala Bidang Pendapatan Lain - Lain
2	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	6.890	6.020	87.373	14.780	13.230	89.513	21.100	19.530	92.559	26.890	26.020	96.765	34.580	33.230	96.096	42.600	39.530	92.793	57.778	53.611	92.788	68.664	61.774	89.966	69.225	64.552	93.250	73.642	68.911	93.576	80.810	76.633	94.831	89.140	86.334	96.852	89.780	Kepala Subbid Retribusi
3	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	6.720	6.130	91.220	12.680	12.140	95.741	17.410	16.780	96.381	6.720	6.130	91.220	12.680	12.140	95.741	17.410	16.780	96.381	32.254	28.622	88.739	41.366	38.774	93.734	64.611	58.936	91.217	78.781	71.263	90.457	80.180	74.551	92.980	83.480	79.633	95.392	83.930	Kepala Subbid Penerimaan Pusat
4	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	6.880	5.710	82.994	11.830	11.110	93.914	17.090	15.620	91.398	6.880	5.710	82.994	11.830	11.110	93.914	17.090	15.620	91.398	28.514	22.361	78.421	38.699	34.599	89.405	47.306	43.655	92.282	61.205	57.236	93.515	73.306	68.911	94.005	84.150	80.019	95.091	84.830	Kepala Subbid Hibah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	HASIL ANALISA PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH (dalam %)												TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH	PENANGGUNGJAWAB
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Jun	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
			(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %		
1	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	7.566	14.702	22.110	30.619	40.784	48.737	57.342	63.838	75.589	84.796	91.975	94.021	95.430	Kepala Bidang Pendapatan Lain - Lain
2	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	6.705	14.736	21.753	28.982	37.013	44.030	59.714	68.806	71.900	76.755	85.356	96.162	89.780	Kepala Subbid Retribusi
3	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	7.304	14.464	19.993	7.304	14.464	19.993	34.102	46.198	70.220	84.908	88.825	94.880	83.930	Kepala Subbid Penerimaan Pusat
4	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	6.731	13.097	18.413	6.731	13.097	18.413	26.360	40.786	51.462	67.471	81.234	94.329	84.830	Kepala Subbid Hibah

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH
BIDANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA BIDANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2023 (dalam %)																														TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH	PENANGGUNGJAWAB						
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober					November			Desember		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	Level 3	Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan			
2	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	8.080	7.080	87.624	16.430	15.413	93.810	24.760	23.175	93.599	32.840	30.770	93.697	40.930	38.810	94.820	49.020	47.070	96.022	62.840	57.890	92.123	68.930	62.130	90.135	75.020	70.070	93.402	81.840	78.280	95.650	90.130	86.160	95.595	100.000	93.270	93.270	100.000	Kepala Subbid Wilayah I
3	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	1.510	1.116	73.907	3.110	2.222	71.447	4.610	4.160	90.239	6.100	5.152	84.459	7.400	5.890	79.595	9.100	7.990	87.802	11.180	10.560	94.454	13.410	11.260	83.967	14.190	12.320	86.822	15.180	15.060	99.209	16.410	15.260	92.992	18.000	17.150	95.278	18.000	Kepala Subbid Wilayah II
4	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	1.180	1.104	93.559	2.390	2.273	95.105	3.580	3.120	87.151	5.190	4.110	79.191	6.210	5.020	80.837	7.230	6.190	85.615	8.190	7.850	95.849	8.420	8.020	95.249	9.230	8.870	96.100	10.290	9.830	95.530	11.480	11.220	97.735	13.240	12.480	94.260	13.240	Kepala Subbid Wilayah III

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA BIDANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2024 (dalam %)																												TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH	PENANGGUNGJAWAB								
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember				
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	3.000	3.000	100.000	Level 3	Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan			
2	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	7.810	6.680	85.531	15.730	14.320	91.036	23.160	21.480	92.746	33.140	31.230	94.237	41.410	39.620	95.677	49.560	45.260	91.324	58.712	53.601	91.295	64.712	60.301	93.184	77.105	70.164	90.998	86.201	81.603	94.666	89.102	82.306	92.373	92.460	84.511	91.403	92.910	Kepala Subbid Wilayah I
3	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	1.740	1.130	64.943	3.450	2.820	81.739	4.230	3.550	83.924	5.610	4.490	80.036	6.480	5.210	80.401	7.230	6.120	84.647	8.625	8.147	94.458	9.630	8.603	89.334	11.241	9.633	85.695	13.254	11.844	89.362	15.056	13.624	90.489	17.280	15.203	87.980	16.850	Kepala Subbid Wilayah II
4	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	1.320	1.020	77.273	2.540	2.140	84.252	3.320	3.030	91.265	4.890	3.750	76.687	5.260	4.510	85.741	5.170	4.220	81.625	6.302	5.824	92.415	7.855	7.236	92.120	8.632	8.102	93.860	9.206	8.723	94.753	11.255	10.014	88.971	13.020	11.988	92.074	12.740	Kepala Subbid Wilayah III

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	HASIL ANALISA PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH (dalam %)												TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH	PENANGGUNGJAWAB
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Jun	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
			(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %		
1	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Level 3	Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan
2	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	7.190	15.413	23.119	33.613	42.643	48.714	57.691	64.903	75.518	87.830	88.587	90.960	92.910	Kepala Subbid Wilayah I
3	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	6.706	16.736	21.068	26.647	30.920	36.320	48.350	51.056	57.169	70.291	80.855	90.226	16.850	Kepala Subbid Wilayah II
4	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	8.006	16.797	23.783	29.435	35.400	33.124	45.714	56.797	63.595	68.469	78.603	94.097	12.740	Kepala Subbid Wilayah III

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH
 BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN PENDAPATAN DAERAH BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2023 (dalam %)																												TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH	PENANGGUNGJAWAB								
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember				
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Potensi Sumber Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	6.210	5.209	83.881	12.810	11.080	86.495	19.410	16.150	83.205	25.600	23.470	91.680	31.800	29.750	93.553	37.730	35.780	94.832	45.160	41.250	91.342	55.380	51.210	92.637	62.730	57.740	92.045	66.120	60.820	91.984	72.280	68.720	95.075	80.000	75.740	94.675	80.000	Kepala Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah
2	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	6.920	6.092	88.035	13.370	11.360	84.966	20.280	18.128	89.389	27.180	25.333	93.205	33.380	30.670	91.881	39.580	36.170	91.385	47.180	44.660	94.659	53.380	49.620	92.956	69.580	66.360	95.372	73.180	68.160	93.140	77.380	69.320	89.584	83.000	80.520	97.012	83.000	Kepala Subbid Pengembangan Statistik
3	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama	7.620	7.503	98.465	14.940	14.705	98.427	21.180	20.880	98.584	31.790	28.710	90.311	39.610	35.620	89.927	46.820	42.340	90.431	53.790	50.230	93.382	69.610	63.520	91.251	76.820	72.260	94.064	80.790	72.190	89.355	86.610	80.360	92.784	93.000	88.160	94.796	93.000	Kepala Subbid Pengolahan Pendapatan Daerah
4	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	7.830	6.803	86.884	16.160	14.105	87.283	23.980	21.198	88.399	31.840	28.890	90.735	40.050	37.820	94.432	48.260	44.440	92.085	53.840	49.780	92.459	60.050	54.610	90.941	72.660	69.130	95.142	82.840	77.470	93.518	90.050	87.310	96.957	100.000	93.130	93.130	100.000	Kepala Subbid Hukum dan Peraturan Perundang Undangan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN PENDAPATAN DAERAH BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2024 (dalam %)																												TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH	PENANGGUNGJAWAB								
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember				
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Potensi Sumber Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	6.520	5.340	81.902	12.560	11.180	89.013	18.610	16.650	89.468	24.260	21.560	88.871	20.430	27.830	136.221	35.250	31.240	88.624	46.233	42.633	92.213	53.644	48.756	90.888	61.911	54.336	87.765	72.944	67.507	92.546	75.624	70.104	92.701	81.630	78.152	95.739	82.190	Kepala Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah
2	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	6.320	5.850	92.563	12.580	11.730	93.243	19.210	18.100	94.222	28.420	24.520	86.277	32.620	29.150	89.362	36.280	33.180	91.455	46.253	42.562	92.020	57.824	53.699	92.866	64.577	59.632	92.343	75.604	70.702	93.516	80.256	76.639	95.493	83.480	73.132	87.604	83.610	Kepala Subbid Pengembangan Statistik
3	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama	7.120	6.430	90.309	13.640	12.540	91.935	20.130	19.190	95.330	28.720	24.130	84.018	38.510	35.140	91.249	42.580	38.520	90.465	56.301	50.264	89.277	69.273	64.536	93.162	76.306	72.562	95.093	81.026	75.164	92.765	86.903	80.502	92.634	93.280	85.611	91.779	93.620	Kepala Subbid Pengolahan Pendapatan Daerah
4	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	6.530	5.540	84.839	15.460	14.090	91.138	22.330	21.020	94.133	27.830	23.620	84.872	38.910	34.520	88.718	44.520	42.120	94.609	56.311	52.154	92.618	64.514	60.609	93.947	76.162	70.712	92.844	84.506	80.263	94.979	92.923	86.601	93.197	100.000	91.204	91.204	100.000	Kepala Subbid Hukum dan Peraturan Perundang Undanan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	HASIL ANALISA PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH (dalam %)												TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH	PENANGGUNGJAWAB
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
			(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %		
1	Meningkatnya Potensi Sumber Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	6.497	13.603	20.258	26.232	33.861	38.009	51.871	59.321	66.110	82.135	85.295	95.087	82.190	Kepala Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah
2	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	6.997	14.029	21.648	29.327	34.864	39.684	50.905	64.226	71.322	84.562	91.662	87.468	83.610	Kepala Subbid Pengembangan Statistik
3	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama	6.868	13.395	20.498	25.774	37.535	41.145	53.689	68.934	77.507	80.286	85.988	91.445	93.620	Kepala Subbid Pengolahan Pendapatan Daerah
4	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	5.540	14.090	21.020	23.620	34.520	42.120	52.154	60.609	70.712	80.263	86.601	91.204	100.000	Kepala Subbid Hukum dan Peraturan Perundang Undangan

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH
SEKRETARIAT BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA SEKRETARIAT BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2023 (dalam %)																												TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH	PENANGGUNGJAWAB											
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember							
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian						
1	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	9.120	8.772	96.184	17.450	16.120	92.378	25.780	24.040	93.251	34.900	30.120	86.304	43.200	39.920	92.407	49.490	44.240	89.392	54.910	50.360	91.714	63.280	60.360	95.386	74.690	71.400	95.595	80.910	79.310	98.022	93.280	88.150	94.500	100.000	92.820	92.820	100.000	Kepala Subbag Keuangan			
		Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	4.530	4.530	100.000	4.530	4.530	100.000	4.530	4.530	100.000	4.530	4.530	100.000	4.530	4.530	100.000	4.530	4.530	100.000	4.530	4.530	100.000	4.530	4.530	100.000	4.530	4.530	100.000	4.530	4.530	100.000	4.530	4.530	100.000	4.530	4.530	100.000	4.530	4.530	100.000	4.530	Kepala Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
		Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	6.120	5.870	95.915	12.030	11.480	95.428	18.610	17.720	95.218	24.730	20.210	81.723	30.850	27.270	88.395	36.970	30.160	81.580	44.730	41.410	92.578	60.850	57.030	93.722	66.970	61.260	91.474	70.730	64.510	91.206	74.850	68.260	91.196	80.000	74.820	93.525	80.000	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian			

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA SEKRETARIAT BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2024 (dalam %)																												TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH	PENANGGUNGJAWAB											
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember							
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	8.480	7.780	91.745	16.610	15.820	95.244	24.210	24.540	101.363	32.610	27.850	85.403	44.330	40.180	90.638	50.210	46.130	91.874	63.201	58.544	92.631	72.361	68.577	94.771	86.301	77.641	89.965	88.364	84.123	95.301	91.024	86.132	94.626	94.620	89.712	94.813	94.960	Kepala Subbag Keuangan			
		Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	5.130	5.130	100.000	5.130	5.130	100.000	5.130	5.130	100.000	5.130	5.130	100.000	5.130	5.130	100.000	5.130	5.130	100.000	5.130	5.130	100.000	5.130	5.130	100.000	5.130	5.130	100.000	5.130	5.130	100.000	5.130	5.130	100.000	5.130	5.130	100.000	5.130	5.130	100.000	4.920	Kepala Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
		Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	5.240	4.810	91.794	11.030	10.320	93.563	17.610	16.560	94.037	25.140	22.630	90.016	31.560	28.910	91.603	37.030	33.260	89.819	46.147	40.403	87.552	52.631	48.701	92.532	64.514	59.301	91.920	72.563	65.211	89.868	78.184	73.261	93.703	80.610	73.306	90.939	80.920	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian			

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	HASIL ANALISA PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH (dalam %)																								TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH	PENANGGUNGJAWAB			
			Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember						
			(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %		(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %		(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %		(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %		(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %		(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %		(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %		(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %		(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %		(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %		(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %		(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %						
1	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	8.193		16.660		25.842		29.328		42.313		48.578		61.651		72.217		81.762		88.588		90.703		94.473				94.960	Kepala Subbag Keuangan	
		Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	104.268		104.268		104.268		104.268		104.268		104.268		104.268		104.268		104.268		104.268		104.268		104.268				104.268	4.920	Kepala Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
		Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	5.944		12.753		20.465		27.966		35.727		41.102		49.929		60.184		73.283		80.587		90.535		90.591				80.591	80.920	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH
UPTB PUSAT INFORMASI DAN APLIKASI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA UPTB PUSAT INFORMASI DAN APLIKASI BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2023 (dalam %)																														TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH	PENANGGUNGJAWAB									
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober					November			Desember					
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian						
1	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	6.430	5.043	78.429	12.790	11.179	87.404	18.190	16.188	88.994	23.310	18.810	80.695	28.440	24.430	85.900	33.570	29.930	89.157	39.310	34.520	87.815	43.460	41.280	94.984	47.150	44.280	93.913	52.310	50.120	95.813	57.460	52.380	91.159	61.600	58.150	94.399	61.600	Kepala UPTB Puslia			
2	Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	Persentase Meningkatnya Kerjasama	8.150	7.761	95.227	16.123	15.138	93.891	24.540	23.791	96.948	19.310	14.880	77.059	28.530	25.170	88.223	37.760	32.900	87.129	49.310	45.630	92.537	58.530	53.690	91.731	67.760	62.620	92.414	77.310	76.730	99.250	89.530	87.290	97.498	100.000	93.720	93.720	100.000	Kepala Subbag Tata Usaha			
3	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	6.430	5.818	90.482	12.710	11.559	90.944	18.920	17.803	94.096	16.520	13.510	81.780	20.660	17.330	83.882	24.800	21.860	88.145	36.520	31.290	85.679	40.660	36.610	90.039	49.180	46.580	94.713	56.520	49.390	87.385	61.660	58.310	94.567	78.000	72.380	92.795	78.000	Kepala Seksi Pengelolaan Pengembangan Sistem dan Aplikasi Pendapatan Serta Infrastruktur Jaringan			
4	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	3.140	2.414	76.879	6.530	5.022	76.907	8.773	7.219	82.287	21.290	18.820	88.398	26.420	23.430	88.683	31.550	27.870	88.336	32.390	30.300	93.547	33.470	31.260	93.397	34.510	32.320	93.654	36.390	34.510	94.834	38.470	35.350	91.890	40.530	36.880	90.994	40.530	Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi			
5	Meningkatnya Kecepatan Internet	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	Kepala Seksi Pengelolaan Pengembangan Sistem dan Aplikasi Pendapatan Serta Infrastruktur Jaringan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA UPTB PUSAT INFORMASI DAN APLIKASI BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2024 (dalam %)																														TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH	PENANGGUNGJAWAB									
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober					November			Desember					
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian						
1	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	5.630	4.870	86.501	11.790	10.120	85.835	17.210	15.260	88.669	21.230	18.190	85.681	27.070	24.460	90.358	33.740	26.760	79.312	38.711	36.601	94.549	40.401	36.601	90.594	45.126	43.316	95.989	51.502	47.778	92.769	53.601	49.901	93.097	62.040	57.261	92.297	62.670	Kepala UPTB Puslia			
2	Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	Persentase Meningkatnya Kerjasama	8.320	7.910	95.072	15.460	15.210	98.383	23.040	21.510	93.359	18.530	15.250	82.299	27.280	24.630	90.286	35.610	30.060	84.414	46.601	40.402	86.698	53.301	48.201	90.432	62.201	53.633	86.225	78.112	64.551	82.639	83.334	76.601	91.920	91.120	82.362	90.388	92.540	Kepala Subbag Tata Usaha			
3	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	5.430	4.160	76.611	11.710	10.840	92.570	17.920	15.450	86.217	15.680	12.480	79.592	19.850	17.150	86.398	23.360	19.420	83.134	34.111	30.306	88.845	41.416	36.601	88.374	52.601	48.023	91.297	63.314	53.532	84.550	71.712	62.254	86.811	78.820	71.203	90.336	79.210	Kepala Seksi Pengelolaan Pengembangan Sistem dan Aplikasi Pendapatan Serta Infrastruktur Jaringan			
4	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	3.620	2.810	77.624	5.710	4.120	72.154	7.270	6.010	82.669	20.130	17.510	86.985	27.730	24.020	86.621	30.180	27.510	91.153	32.601	29.601	90.798	34.611	31.314	90.474	36.255	32.162	88.711	38.162	35.260	92.396	40.102	37.555	93.649	41.230	38.205	92.663	41.780	Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi			
5	Meningkatnya Kecepatan Internet	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	100 MBPs	100.000	100 MBPs	Kepala Seksi Pengelolaan Pengembangan Sistem dan Aplikasi Pendapatan Serta Infrastruktur Jaringan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	HASIL ANALISA PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH (dalam %)																TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH	PENANGGUNGJAWAB
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember						
			(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %	(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %						
1	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	7.771	16.148	24.350	29.025	39.030	42.700	58.403	58.403	69.118	76.237	79.625	91.369	62.670	Kepala UPTB Puslia				
2	Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	Persentase Meningkatnya Kerjasama	8.548	16.436	23.244	16.479	26.616	32.483	43.659	52.087	57.957	69.755	82.776	89.002	92.540	Kepala Subbag Tata Usaha				
3	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	5.252	13.685	19.505	15.756	21.651	24.517	38.260	46.208	60.627	67.582	78.594	89.891	79.210	Kepala Seksi Pengelolaan Pengembangan Sistem dan Aplikasi Pendapatan Serta Infrastruktur Jaringan				
4	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	6.726	9.861	14.385	41.910	57.492	65.845	70.850	74.950	76.979	84.394	89.888	91.443	41.780	Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi				
5	Meningkatnya Kecepatan Internet	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100 MBPs	Kepala Seksi Pengelolaan Pengembangan Sistem dan Aplikasi Pendapatan Serta Infrastruktur Jaringan				

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH
UPTB PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA UPTB PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2023 (dalam %)																												TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH	PENANGGUNGJAWAB								
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember				
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	5.420	5.010	92.435	10.780	9.992	92.690	15.180	14.883	98.043	20.600	21.330	103.544	26.020	27.880	107.148	38.140	42.140	110.488	50.620	47.410	93.659	66.100	63.320	95.794	73.140	69.710	95.310	82.620	81.940	99.177	90.100	88.910	98.679	100.000	93.630	93.630	100.000	Kepala UPTB PPD
2	Berkurangnya Tunggalan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggalan Pajak Daerah	0.870	0.775	89.080	1.740	1.669	95.920	2.610	2.580	98.851	3.480	3.170	91.092	4.350	4.130	94.943	5.220	4.320	82.759	6.480	6.170	95.216	7.350	7.020	95.510	8.220	7.820	95.134	8.520	7.400	86.854	9.350	8.720	93.262	10.530	10.020	95.157	10.530	Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan
3	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	0.770	0.669	86.883	1.540	1.443	93.701	2.310	2.180	94.372	3.080	2.738	88.896	3.850	3.170	82.338	4.620	4.090	88.528	4.920	4.120	83.740	5.180	4.850	93.629	5.620	5.130	91.281	7.170	6.620	92.329	8.180	8.040	98.289	9.330	9.030	96.785	9.330	Kepala Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA UPTB PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BULAN / TARGET / REALISASI TAHUN 2024 (dalam %)																												TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH	PENANGGUNGJAWAB										
			Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember						
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian					
1	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	4.580	4.140	90.393	9.170	8.220	89.640	14.000	12.230	87.357	19.240	14.280	74.220	24.510	20.780	84.782	36.710	35.620	97.031	52.633	48.515	92.175	63.545	58.667	92.324	72.664	68.682	94.520	83.336	78.782	94.535	91.912	88.887	96.709	100.000	92.362	92.362	100.000	Kepala UPTB PPD		
2	Berkurangnya Tunggalan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggalan Pajak Daerah	0.670	0.420	62.687	1.440	1.012	70.278	2.310	1.840	79.654	3.410	3.120	91.496	3.920	3.620	92.347	4.280	3.170	74.065	5.011	4.633	92.451	6.322	6.024	95.285	7.244	6.912	95.417	8.190	7.634	93.211	9.116	8.622	94.581	10.530	9.874	93.770	8.620	Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan		
3	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	0.620	0.490	79.032	1.240	1.040	83.871	2.510	2.080	82.869	2.810	2.620	93.238	3.740	3.360	89.840	4.150	3.450	83.133	5.206	4.811	92.420	6.322	5.911	93.499	7.266	6.851	94.294	8.001	7.664	95.788	8.263	7.921	95.858	9.330	8.601	92.186	9.600	Kepala Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan		

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	HASIL ANALISA PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 TERHADAP TARGET JANGKA MENENGAH (dalam %)																						TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH	PENANGGUNGJAWAB			
			Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember				
			(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %		(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %		(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %		(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %		(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %		(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %		(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %		(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %		(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %		(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %		(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %		(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %		(Realisasi 2024/Target Jangka Menengah) x 100 %		
1	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target		4.140		8.220		12.230		14.280		20.780		35.620		48.515		58.667		68.682		78.782		88.887		92.362		100.000	Kepala UPTB PPD
2	Berkurangnya Tunggalan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggalan Pajak Daerah		4.872		11.740		21.346		36.195		41.995		36.775		53.748		69.884		80.186		88.561		100.023		114.548		8.620	Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan
3	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah		5.104		10.833		21.667		27.292		35.000		35.938		50.119		61.573		71.369		79.833		82.510		89.594		9.600	Kepala Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan

A. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Pengukuran Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		KINERJA TAHUN 2024			DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2024			FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT KEBERHASILAN KINERJA	PENANGGUNGJAWAB
				Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	1.1	Persentase Pencapaian Penerimaan PAD	91,970	95,990	104,371	500.000.000	454.936.040	90,98	Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90% 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Upaya <i>cross-cutting</i> bersama stakeholder Kepolisian dan Jasaraharja dalam penerimaan pajak PKB dan BBN-KB sudah optimal dengan penggunaan anggaran yang efisien 3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan (OPAD) telah memberikan kontribusi nyata dalam mencapai kinerja pencapaian penerimaan PAD diatas 90%, e kinerja pegawai dengan SKP memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja 2. Pelaksanaan door to door service cukup efektif sebagai aktivitas nyata dalam rencana aksi AKIP 3. Kolaboratif baik internal dan eksternal bagi upaya peningkatan kinerja organisasi 4. Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah seperti, pembayaran secara non tunai menggunakan mesin EDC, QRIS serta pengembangan pembayaran pajak melalui modern kanal 5. Sosialisasi secara massif terhadap pembayaran pajak daerah cukup signifikan 6. Pelaksanaan operasi gabungan dengan pihak Kepolisian, Dishub dan Sat Pol PP berjalan cukup efektif	Kepala Badan
2.	Meningkatnya Kemandirian Daerah Dalam Pembangunan Yang Bersumber Pada Pendanaan PAD	2.1	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi (Nilai absolut)	4,00	3,770	94,25	312.400.000	289.937.838	92,81	Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90% 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Tagging pendanaan pembangunan melalui PAD pada APBD telah tepat sasaran	Kepala Badan

										<u>Faktor Pendukung :</u> 1. Memberikan program penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan bunga Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2. Pembentukan Satgas PBB-KB pada perairan/laut di Provinsi Sumatera Selatan 3. Integrasi data wajib pajak pusat dengan data wajib pajak daerah pada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan 4. Perpanjangan kerjasama dengan BP Batam dalam rangka back up database server utama yang ada main/recovery data	
3.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	3.1	Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,950	0,925	97,36	980.000.000	826.114.390	84,29	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Koordinasi dan konsultasi secara intensif dengan Kementerian ESDM terkait dengan dana bagi hasil Migas <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Terus melakukan rapat koordinasi dengan OPD pemungut retribusi dan BUMD/BUMS yang menerima penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara rutin 2. Memperkuat sistem informasi teknologi secara bertahap terus membenahi sistem IT melalui kerjasama dengan pihak ketiga 3. Meningkatkan pengawasan internal badan dan melakukan koordinasi dengan institusi pengawasan lainnya	Kepala Badan
		3.2	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	1,000	0,945	94,500	840.000.000	728.735.374	86,75	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Belanja produktif dengan tematik tertentu dapat meningkatkan PDRB per kapita 3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja	Kepala Badan

										<u>Faktor Pendukung :</u> 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah 2. Kerjasama dengan pemerintah Kab/Kota untuk berkontribusi dalam Optimalisasi Pajak Daerah 3. Memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan titik pelayanan baru seperti samsat desa dan samsat drive thru	
4.	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	1.1	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap GDP	1,500	1,389	93,920	840.000.000	728.735.374	86,75	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Belanja dalam rangka penguatan pajak daerah 3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Penguatan local taxing power dengan relaksasi kebijakan pajak daerah 2. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan penguatan indeks kemandirian fiskal daerah 3. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah 4. Diseminasi informasi pajak melalui sosial media dan media elektronik lainnya	Bidang Pajak
5.	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	14,260	13,260	92,987	1.140.000.000	1.091.578.054	95,75	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Program keringan pajak daerah dan insentif pajak daerah menstimulus PAD 3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Kerjasama kolaboratif bersama Agen Pemegang Merk Tunggal (ATPM) kendaraan bermotor 2. Kerjasama dengan Camat, Lurah dan Ketua RT setempat dalam rangka penagihan pajak daerah 3. Kerjasama dengan Dirlantas melalui kegiatan razia kendaraan bermotor 4. Program kredit murah bagi masyarakat ekonomi	Bidang Pajak

										menengah ke bawah dalam keringanan berusaha	
6.	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	1.1	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	5,30	4,872	91,925	310.000.000	235.169.965	75,86	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Program keringan pajak daerah dan insentif pajak daerah menstimulus PAD 3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui pendidikan formal dan informal secara bertahap 2. Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor telah di update dalam system informasi pembayaran pajak daerah 3. Mengendalikan tindak pengendalian atas perhitungan beban tariff pajak, denda pajak dan bunga pajak 4. Kolaboratif bersama dengan pihak Kepolisian dalam penertiban kendaraan bermotor	Bidang Pajak
7.	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	1.1	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	100,00	93,360	93,360	50.000.000	44.311.538	88,62	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Program keringan pajak daerah dan insentif pajak daerah menstimulus PAD 3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 4. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui pendidikan formal dan informal secara bertahap 2. Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor telah di update dalam system informasi pembayaran pajak daerah 3. Mengendalikan tindak pengendalian atas	Bidang Pajak

										perhitungan beban tariff pajak, denda pajak dan bunga pajak 4. Kolaboratif bersama dengan pihak Kepolisian dalam penertiban kendaraan bermotor	
8.	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	1.1	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	94,97	89,724	94,476	135.000.000	106.199.144	78,66	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 4. Perubahan rencana kerja memastikan ketercapaian kinerja dengan dukungan anggaran <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Terus melakukan rapat koordinasi dengan OPD pemungut retribusi dan BUMD/BUMS yang menerima penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara rutin 2. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing- masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing-masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan 3. Mengadakan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna mencari upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dari bagi hasil laba BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Bidang PDLL
9.	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	89,14	86,334	96,852	45.000.000	40.149.260	89,22	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 4. Evaluasi terhadap penggunaan program,	Bidang PDLL

										kegiatan serta sub kegiatan pendanaan <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Kolaboratif bersama 17 OPD Pengampu Retribusi 2. Sosialisasi secara massif terhadap objek retribusi daerah 3. Memberikan akses kemudahan bagi masyarakat yang akan memanfaatkan objek retribusi antara lain dukungan penyediaan sarana dan prasarana transportasi menuju objek retribusi 4. Memperbaiki sarana dan prasarana objek retribusi	
10.	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	1.1	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	83,48	79,633	95,392	190.000.000	177.345.430	93,33	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 4. Evaluasi terhadap penggunaan program, kegiatan serta sub kegiatan pendanaan <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Realisasi dari semua kegiatan tersebut akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk selanjutnya akan dijadikan pedoman dan patokan terhadap besarnya pembagian Pendapatan Transfer yang akan diterima oleh masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan selanjutnya akan didistribusikan ke masing-masing Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan jatah/porsinya masing-masing 2. Melakukan rapat koordinasi dan rekonsiliasi bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan RI di Jakarta dalam rangka membahas pelaksanaan penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Bagi Hasil Bidang Pertambangan Umum dan Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan 3. Melakukan rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas pada Kementerian	Bidang PDLL

										Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta dalam rangka membahas Lifting Minyak dan Gas, Bidang Pertambangan Umum, serta Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan	
11.	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	1.1	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	84,15	80,019	95,091	35.000.000	30.000.000	85,71	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 4. Evaluasi terhadap penggunaan program, kegiatan serta sub kegiatan pendanaan <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Mengupayakan peningkatan pendapatan di sektor Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dengan mengoptimalkan dan mengintensifkan jenis-jenis pendapatan dari komponen penerimaan Lain-lain PAD yang Sah antara lain penerimaan jasa giro dari Bank Sumsel Babel dan penerimaan-penerimaan lainnya 2. Melakukan evaluasi terhadap potensi yang dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kontribusi BUMD, salah satunya dengan membuat rencana bisnis perusahaan 3. Meningkatkan koordinasi dengan BUMN maupun BUMS agar berperan aktif dan berpartisipasi dalam mendukung program pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan dilakukannya pendekatan yang intensif kepada masing-masing BUMN maupun BUMS tersebut maka diharapkan kepada masing-masing BUMN dan BUMS dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Bidang PDLL
12.	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	1.1	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	3	3	100,00	260.000.000	235.522.288	90,58	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja	Bidang Wasbin

										3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 4. Evaluasi terhadap penggunaan program, kegiatan serta sub kegiatan pendanaan <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Pengendalian intern pemerintah dalam pengawasan pajak daerah terus ditingkatkan 2. Memantau dan mengevaluasi rencana tindak pengendalian atas pengelolaan risiko	
13.	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	92,46	84,511	91,403	100.000.000	96.120.000	96,12	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 4. Evaluasi terhadap penggunaan program, kegiatan serta sub kegiatan pendanaan <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Pengendalian intern pemerintah dalam pengawasan pajak daerah terus ditingkatkan 2. Memantau dan mengevaluasi rencana tindak pengendalian atas pengelolaan risiko	Bidang Wasbin
14.	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	1.1	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	17,280	15,203	87,980	100.000.000	88.500.000	88,50	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 4. Evaluasi terhadap penggunaan program, kegiatan serta sub kegiatan pendanaan <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Pengendalian intern pemerintah dalam pengawasan pajak daerah terus ditingkatkan	Bidang Wasbin

										2. Memantau dan mengevaluasi rencana tindak pengendalian atas pengelolaan risiko	
15.	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan dalam Pelaksanaan Pendapatan Daerah	1.1	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	13,020	11,988	92,074	100.000.000	92.135.000	92,13	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 4. Evaluasi terhadap penggunaan program, kegiatan serta sub kegiatan pendanaan <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Pengendalian intern pemerintah dalam pengawasan pajak daerah terus ditingkatkan 2. Memantau dan mengevaluasi rencana tindak pengendalian atas pengelolaan risiko	Bidang Wasbin
16.	Meningkatnya Penggalan Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	81,63	78,152	95,739	500.000.000	454.936.040	90,98	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 4. Evaluasi terhadap penggunaan program, kegiatan serta sub kegiatan pendanaan <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Kerjasama dengan beberapa perusahaan wajib pajak PBB-KB terkait rencana investasi 2. Kolaboratif dengan DPMPTSP terkait market sounding rencana Kerjasama Pemerintah Badan Usaha 3. Kerjasama dengan Universitas terkait kajian teoritis potensi sumber pendapatan asli daerah	Bidang P2PATDA
17.	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	83,48	73,132	87,604	200.000.000	190.096.214	95,04	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja;	Bidang P2PATDA

										2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 4. Evaluasi terhadap penggunaan program, kegiatan serta sub kegiatan pendanaan Faktor Pendukung : 1. Kerjasama dengan beberapa perusahaan wajib pajak PBB-KB terkait rencana investasi 2. Kolaboratif dengan DPMPTSP terkait market sounding rencana Kerjasama Pemerintah Badan Usaha 3. Kerjasama dengan Universitas terkait kajian teoritis potensi sumber pendapatan asli daerah	
18.	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	1.1	Persentase Meningkatnya Kerjasama	93,28	85,611	91,779	500.000.000	454.936.040	90,98	Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90% 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 4. Evaluasi terhadap penggunaan program, kegiatan serta sub kegiatan pendanaan Faktor Pendukung : 1. Kerjasama dengan beberapa perusahaan wajib pajak PBB-KB terkait rencana investasi 2. Kolaboratif dengan DPMPTSP terkait market sounding rencana Kerjasama Pemerintah Badan Usaha 3. Kerjasama dengan Universitas terkait kajian teoritis potensi sumber pendapatan asli daerah 4. Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah seperti, pembayaran secara non tunai menggunakan mesin EDC, QRIS serta pengembangan pembayaran pajak melalui modern kanal	Bidang P2PATDA
19.	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan	1.1	Persentase Meningkatnya Peraturan yang	100,00	91,204	91,204	312.400.000	309.937.838	99,21	Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90% 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan	Bidang P2PATDA

	Sumber Potensi		Diharmonisasi							analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 4. Evaluasi terhadap penggunaan program, kegiatan serta sub kegiatan pendanaan <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Kerjasama dengan beberapa perusahaan wajib pajak PBB-KB terkait rencana investasi 2. Kolaboratif dengan DPMPTSP terkait market sounding rencana Kerjasama Pemerintah Badan Usaha 3. Pendampingan tim korsupgah KPK dalam optimalisasi pendapatan daerah 4. Koordinasi dan konsultasi intensif bersama Kemenkumham dan Biro Hukum 5. Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah	
20.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	100,00	92,820	92,820	175.000.000	142.532.052	81,45	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 4. Evaluasi terhadap penggunaan program, kegiatan serta sub kegiatan pendanaan <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Kolaboratif Tim verifikator dengan BPKAD 2. Penelitian dan verifikasi semakin meningkat 3. Evaluasi dan pemantauan realisasi fisik dan keuangan melalui kurva "S" 4. Laporan keuangan yang akuntabel	Sekretariat
		1.2	Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	5,13	4,723	92,066	250.000.000	227.712.300	91,08	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran)	Sekretariat

										berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 4. Evaluasi terhadap penggunaan program, kegiatan serta sub kegiatan pendanaan <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Perhitungan efisiensi anggaran 2. Efektivitas penggunaan anggaran telah tepat sasaran 3. Evaluasi dan pemantauan program, kegiatan sub kegiatan dilakukan secara berkala 4. Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran secara berkala waktu	
		1.3	Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	80,610	73,306	90,939	300.000.000	278.630.000	92,88	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 4. Evaluasi terhadap penggunaan program, kegiatan serta sub kegiatan pendanaan <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui pendidikan formal dan informal secara bertahap	Sekretariat
21.	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	1.1	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	62,040	57,261	92,297	6.756.287.243	6.668.506.340	98,70	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran)	UPTB Puslia

										dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 4. Evaluasi terhadap penggunaan program, kegiatan serta sub kegiatan pendanaan <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah seperti, pembayaran secara non tunai menggunakan mesin EDC, QRIS serta pengembangan pembayaran pajak melalui modern kanal 2. Kolaboratif dengan Dinas Kominfo terkait dengan internet desa 3. Berkurangnya blank spot area 4. Memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan titik pelayanan baru seperti samsat desa dan samsat drive thru	
22.	Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	1.1	Persentase Meningkatnya Kerjasama	91,120	82,362	90,388	6.756.287.243	6.668.506.340	98,70	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah seperti, pembayaran secara non tunai menggunakan mesin EDC, QRIS serta pengembangan pembayaran pajak melalui modern kanal (indomaret, alfa mart, tokopedia dan bli bli.com)	UPTB Puslia
23.	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	78,82	71,203	90,336	6.756.287.243	6.668.506.340	98,70	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran)	UPTB Puslia

										dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Pembangunan dan pengembangan aplikasi samsat bapenda, perbaikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terkait pengolahan, pengamanan dan up grading data serta peralatan pengolahan data yang lebih canggih dan modern 2. Pengembangan Aplikasi E-Samsat berupa Layanan Samsat Online Nasional dan Layanan Samsat Online Sumsel 3. Secara berkala melaksanakan rapat koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Sumatera Selatan untuk membahas kendala dan permasalahan yang timbul di lapangan	
24.	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	1.1	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	41,230	38,205	92,663	6.756.287.243	6.668.506.340	98,70	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) <u>Faktor Pendukung :</u> 1. Pembangunan dan pengembangan aplikasi samsat bapenda, perbaikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terkait pengolahan, pengamanan dan up grading data serta peralatan pengolahan data yang lebih canggih dan modern 2. Pengembangan Aplikasi E-Samsat berupa Layanan Samsat Online Nasional dan Layanan Samsat Online Sumsel 3. Secara berkala melaksanakan rapat koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Sumatera Selatan untuk membahas kendala dan permasalahan yang timbul di lapangan 4. Kerjasama dengan Disdukcapil terkait pemanfaatan data KTP dan keamanan informasi	UPTB Puslia
25.	Meningkatnya Kecepatan Internet	1.1	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs	100,00	100,00	100,00	6.756.287.243	6.668.506.340	98,70	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan	UPTB Puslia

										analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Faktor Pendukung : 1. Pembangunan dan pengembangan aplikasi samsat bapenda, perbaikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terkait pengolahan, pengamanan dan up grading data serta peralatan pengolahan data yang lebih canggih dan modern 2. Pengembangan Aplikasi E-Samsat berupa Layanan Samsat Online Nasional dan Layanan Samsat Online Sumsel 3. Secara berkala melaksanakan rapat koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Sumatera Selatan untuk membahas kendala dan permasalahan yang timbul di lapangan	
26.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	100,00	92,362	92,362	1.400.000.000	1.296.714.390	92,62	Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90% 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Faktor Pendukung : 1. Pelaksanaan door to door service 2. Pelaksanaan razia pajak daerah 3. Pelaksanaan optimalisasi pendapatan daerah	UPTB PPD Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan
27.	Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	1.1	Persentase Berkurangnya Tunggakan Pajak	10,530	9,874	93,770	310.000.000	235.169.965	75,86	Kriteria kinerja > 90% realisasi angggaran < 90% 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya	UPTB PPD Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan

										(anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) <u>Faktor Pendukung</u> : 1. Pelaksanaan door to door service 2. Pelaksanaan razia pajak daerah 3. Pelaksanaan optimalisasi pendapatan daerah	
28.	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	1.1	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	9,330	8,601	92,186	980.000.000	826.114.937	84,29	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) <u>Faktor Pendukung</u> : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui pendidikan formal dan informal secara bertahap 2. Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor telah di update dalam system informasi pembayaran pajak daerah 3. Mengendalikan tindak pengendalian atas perhitungan beban tariff pajak, denda pajak dan bunga pajak 4. Kolaboratif bersama dengan pihak Kepolisian dalam penertiban kendaraan bermotor	UPTB PPD Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	MONITORING DAN EVALUASI KINERJA												CATATAN REKOMENDASI	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGARAN			RINCIAN AKTIVITAS	RISIKO PENGAHAN	REALISASI ANGGARAN								ANALISA FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA		PENANGGUNGJAWAB KINERJA	PELAKSANA	KETERANGAN		
 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|--|---------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------------------|-----------------------------------|---------|-----------|---|-------------------|---|--------------------|---|-----------|---|---|---|-------------|---|--|---|-------------------------|---|------------|---|--
---	---	---	-------	---	-------	---	--------	---	--------	---	--	---	--------------	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	
			Trensur I			Trensur II			Trensur III			Trensur IV					Tahunan
 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | % Capaian | | | Target | Realisasi | | | | | | % Capaian | Rupiah | % | Rupiah | % | Rupiah | % | Rupiah | | | | % | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | |
| | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | | | (13) | (14) | | | | | | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | | | | (23) | (24) | (25)
 | (26) | (27) | (28) | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Pendaptan Daerah | 1.1 Persentase Pendaptan Penemuan Pendaptan Adl Daerah (PAD) | 14.50 | 13.70 | 94.29 | 36.50 | 34.80 | 89.88 | 75.00 | 75.00 | 100.00 | 91.90 | 95.90 | 104.31 | 91.90 | 95.90 | 104.31 | 1 | Periode Trensur I 1 tahun 2024 mengawali trend kenaikan dalam pencapaian kinerja apabila dibandingkan pada Trensur II tahun 2023, hal ini selubuhan dengan telah dilakukan akreditasi dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada Trensur II tahun 2024 agar dapat meningkatkan kinerja sasaran strategis yang ingin di capai pada akhir periode tahun 2024 | 1 | Penetapan Pajak Daerah | 800,000,000.00 | 799,190,000.00 | 99.89 | 1 | Optimalisasi Pendaptan Adl Daerah (PAD) | 40,251,000.00 | 6.241 | 157,240,000.00 | 19.50 | 70,990,000.00 | 9.99 | 100,000,000.00 | 19.80 | 1 | Upaya cross-cutting bersama stakeholder Kabupaten dan Kecamatan dalam pemetaan pajak PAD dan BBN-KB sesuai optimal dengan pengumuman anggaran yang efisien | 1
 | Minimnya sarana prasarana sebagai akibat bus angkutan wilayah | 124,560,000.00 | 6.228 | 326,600,000.00 | 16.33 | 346,514,980.00 | 17.326 | 300,000,000.00 | 15.000 | 1 | Dalam hal ini khalayak bersama, Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Satuan Organisasi, Urutan Tugas dan Fungsi Badan Pendaptan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Urutan Tugas dan Fungsi UPTD Badan Pendaptan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan, Dengan adanya dua peraturan ini akan meningkatkan organisasi, struktur, dan tata laksana pemerintahan. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kinerja UPTD dan Kabupaten. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kinerja UPTD dan Kabupaten. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kinerja UPTD dan Kabupaten. | Kepala Badan | Bidang Pajak | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja
pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut
Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk
pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan
terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir
seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa Roberga dan Bank Sumatera dalam pengolahan SAMSA. Untuk pengolahan Non SAMSA dilakukan bersama Institut Sati POU PP. Perangut Daerah Pengoptimalan Rebutan dan BUKO. Pengembangan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendaptan daerah sudah harus dilakukan untuk dapat mengkomodir seluruh kebutuhan rebutan mitra pengolahan pendaptan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pengolahan daerah. Dengan adanya akreditasi yang mempunyai dampak kemudahan maka akan terwujud pengolahan pendaptan daerah yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mampu mendukung pengolahan pendaptan daerah. Saat ini Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan masih tertinggal pada pengolahan Non-Samsat, Untuk pengolahan Non-Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengolahan Pendaptan Daerah yang dikembangkan | 2 | Pemenuhan dana bagi hasil pemenuhan pusat pusat dengan sistem kemitraan dengan mitra kerja pengolahan pendaptan daerah yakni Institut Puri, Jasa R |

3.1.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan standar nasional melalui beberapa pendekatan yaitu :

a. Pendapatan Nasional dengan Pendapatan Daerah

Pendapatan Nasional	Pendapatan Daerah	Keterangan
Menurut pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan dari masing-masing faktor produksi pada tahun tertentu. Masing-masing faktor produksi yang dimiliki akan memberikan pendapatan bagi pemilik faktor produksi tersebut. Pemilik faktor produksi tenaga kerja akan memperoleh pendapatan dalam bentuk gaji, pemilik modal akan mendapatkan bunga dari modal yang dimilikinya, pemilik tanah akan memperoleh sewa, dan pemilik keahlian (<i>skill</i>) akan memperoleh laba. Perhitungan pendapatan nasional dirumuskan dengan : $Y_n = \sum_{i=1}^i (W + R + i + P)$ Penerimaan pendapatan nasional tahun 2024 tercatat (<i>unaudited</i>) sebesar Rp. 2.492,70 Triliun terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bea dan cukai, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah	Pendapatan daerah dengan pendekatan formulasi kebijakan desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan pendapatan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Rumus perhitungan pendapatan daerah merupakan fungsi dari : $Y_d = \sum_{i=1}^i f (PAD + TKD)$ Penerimaan pendapatan daerah tahun 2024 tercatat (<i>unaudited</i>) sebesar Rp. 10.965.285.405.909,40 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Pusat	Pendekatan pendapatan nasional berbanding dengan pendapatan daerah menghasilkan rasio $Rasio = \frac{2.492.700.000.000.000}{10.965.285.909,40}$ Rasio = 1 : 0,0044

b. Pendekatan Penerimaan Pajak Negara dengan Penerimaan Pajak Daerah

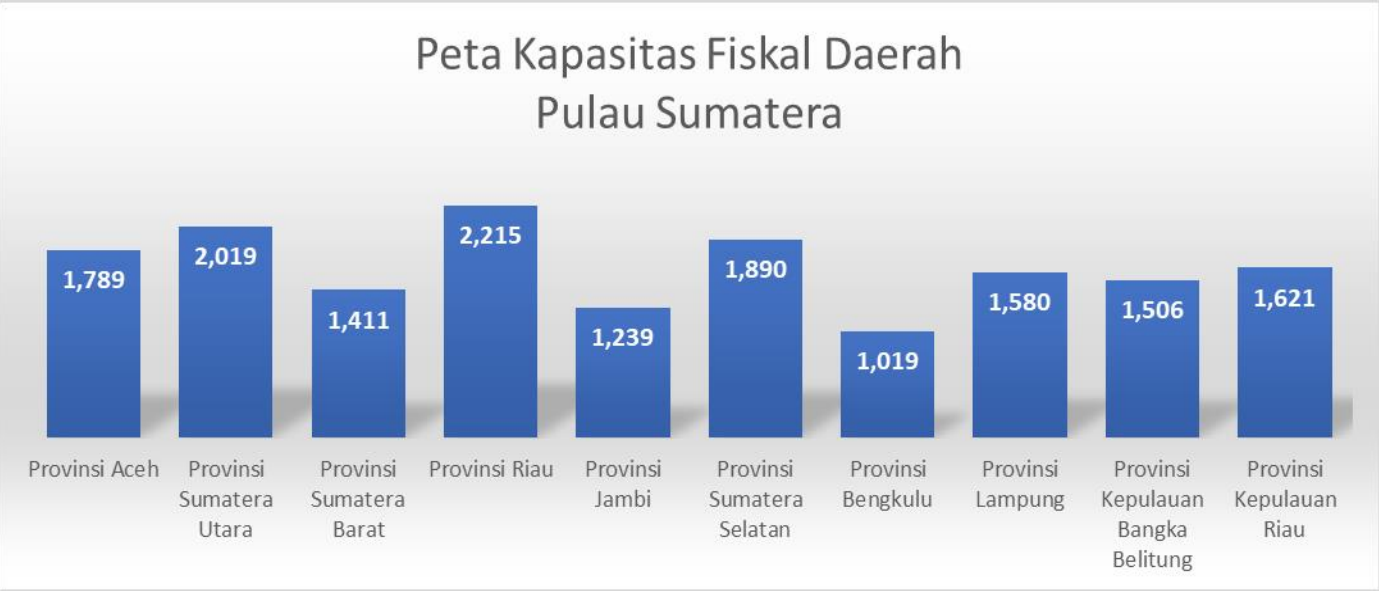
Penerimaan Pajak Negara	Penerimaan Pajak Daerah	Keterangan
Penerimaan pajak negara memberikan kontribusi positif terhadap pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional, dimana : <i>Pajak Nasional = Rp. 1.688,93 Triliun</i> <i>PDB Nasional = Rp. 5.638,9 Triliun</i> $Rasio\ Nasional = \frac{1.688,93\ Triliun}{5.638,9\ Triliun}$ <i>Rasio Nasional = 0,30</i>	Penerimaan pajak daerah memberikan kontribusi positif terhadap pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Selatan, dimana : <i>Pajak Daerah = Rp. 4.744.822.584.532,87</i> <i>PDRB = Rp. 171,65 Triliun</i> $Rasio\ Daerah = \frac{Rp. 4.744.822.584.532,87}{Rp. 171.650.000.000.000}$ <i>Rasio Daerah = 0,03</i>	Rasio penerimaan pajak negara terhadap PDB Nasional sebesar 0,30 sementara rasio pajak daerah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,03 yang mengisyaratkan bahwa kontribusi pajak daerah masih sangat kecil terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan

c. Pendekatan Kemandirian Fiskal Daerah Dari Sisi Pendapatan

Penerimaan Transfer Pusat	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Keterangan
Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 mendapatkan alokasi penerimaan dari Pemerintah Pusat sebesar : <i>TKD = Rp. 5.648.721.133.679,00</i> Transfer ke Daerah terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA, Dana Transfer Khusus, Dana Insentif Fiskal	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 sebesar : <i>PAD = Rp. 5.312.545.304.230,45</i> Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi, Pendapatan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Kemandirian Fiskal Daerah dengan formulasi : $Rasio = \frac{PAD}{TKD + PAD}$ $Rasio = \frac{Rp. 5.312.545.304.230,45}{Rp. 10.965.285.405.909,40}$ <i>Rasio = 0,48</i>

d. Pendekatan Kapasitas Ruang Fiskal Daerah

NO	NAMA DAERAH	RASIO RFD	KATEGORI RFD
1.	Provinsi Aceh	1,789	Sedang
2.	Provinsi Sumatera Utara	2,019	Sedang
3.	Provinsi Sumatera Barat	1,411	Sangat Rendah
4.	Provinsi Riau	2,215	Tinggi
5.	Provinsi Jambi	1,239	Sangat Rendah
6.	Provinsi Sumatera Selatan	1,890	Sedang
7.	Provinsi Bengkulu	1,019	Sangat Rendah
8.	Provinsi Lampung	1,580	Rendah
9.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1,506	Rendah
10.	Provinsi Kepulauan Riau	1,621	Rendah



3.1.2 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Daerah		91,97	95,99	104,37	Memberikan program keringanan tarif Pajak Kendaraan Bermotor Progresif	
2.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	2.1	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,95	0,925	97,36	Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah seperti, pembayaran secara non tunai menggunakan mesin EDC, QRIS serta pengembangan pembayaran pajak melalui modern kanal	
		2.2	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	1,00	0,945	94,50	Penempelan stiker tanda lunas di kendaran bermotor sebagai inovasi pengawasan terhadap kendaraan bermotor yang belum melakukan pembayaran pajak	
3.	Meningkatnya Kemandirian Daerah Dalam Pembangunan Yang Bersumber Pada Pendanaan PAD	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi		4,00	3,77	94,25	Pembentukan Satgas PBB-KB pada perairan/laut di Provinsi Sumatera Selatan	
							Kerjasama dengan Dirlantas melalui kegiatan razia kendaraan bermotor	
							Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Laut, TNI AL, Pol Airud terkait pengawasan peredaran penjualan bahan bakar kendaraan bermotor di perairan	
							Pendampingan tim korsupgah KPK dalam optimalisasi pendapatan daerah	
							Integrasi data wajib pajak pusat dengan data wajib pajak daerah pada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan	
							Perpanjangan kerjasama dengan BP Batam dalam rangka back up	

						database server utama yang ada main/recovery data	
						Perpanjangan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penambahan kuota akses data kependudukan	
						Terus melakukan rapat koordinasi dengan OPD pemungut retribusi dan BUMD/BUMS yang menerima penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara rutin	
						Memperkuat sistem informasi teknologi secara bertahap terus membenahi sistem IT melalui kerjasama dengan pihak ketiga	
						Meningkatkan pengawasan internal badan dan melakukan koordinasi dengan institusi pengawasan lainnya	
						Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah	
						Kerjasama dengan pemerintah Kab/Kota untuk berkontribusi dalam Optimalisasi Pajak Daerah	
						Memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan titik pelayanan baru seperti samsat desa dan samsat drive thru	
						Pembangunan dan pengembangan aplikasi samsat bapenda, perbaikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terkait pengolahan, pengamanan dan up grading data serta peralatan pengolahan data yang lebih canggih dan modern	
						Pengembangan Aplikasi E-Samsat	

						berupa Layanan Samsat Online Nasional dan Layanan Samsat Online Sumsel	
						Secara berkala melaksanakan rapat koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Sumatera Selatan untuk membahas kendala dan permasalahan yang timbul di lapangan	
						Melakukan penagihan langsung kepada objek-objek pajak daerah di lapangan, seperti objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Alat Berat dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang berada di semua Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan	
						Mengintensifkan pendataan objek Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar provinsi (Nopol non-BG) yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan melalui razia kendaraan bermotor bersama-sama dengan instansi terkait	
						Melakukan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor secara persuasif	
						Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan showroom penjual kendaraan bermotor bekas dalam upaya meningkatkan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua (BBN-KB II)	
						Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kewajiban membayar pajak melalui penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-Sumatera	

						Selatan	
						Kegiatan sosialisasi baik media sosial dan terjun langsung kelapangan serta pemberian reward kepada wajib pajak	
						Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan sarana prasarana, peningkatan kualitas layanan sumber daya manusia, mempercepat proses layanan	
						Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan OPD pemungut retribusi	
						Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan retribusi daerah	
						Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah	
						Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar retribusi daerah	
						Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing- masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing- masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan	
						Mengadakan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna mencari upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dari bagi hasil laba BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	

						Melakukan evaluasi terhadap potensi yang dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kontribusi BUMD, salah satunya dengan membuat rencana bisnis perusahaan	
						Mengupayakan peningkatan pendapatan di sektor Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dengan mengoptimalkan dan mengintensifkan jenis-jenis pendapatan dari komponen penerimaan Lain-lain PAD yang Sah antara lain penerimaan jasa giro dari Bank Sumsel Babel dan penerimaan-penerimaan lainnya	
						Melakukan rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta dalam rangka membahas Lifting Minyak dan Gas, Bidang Pertambangan Umum, serta Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan	
						Melakukan rapat koordinasi dan rekonsiliasi bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan RI di Jakarta dalam rangka membahas pelaksanaan penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Bagi Hasil Bidang Pertambangan Umum dan Dana Bagi Hasil Bidang Kehutanan	
						Realisasi dari semua kegiatan tersebut akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk selanjutnya akan dijadikan pedoman dan patokan terhadap besarnya pembagian Pendapatan Transfer yang akan diterima oleh masing-masing	

						Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan selanjutnya akan didistribusikan ke masing-masing Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan jatah/porsinya masing-masing	
						Meningkatkan koordinasi dengan BUMN maupun BUMS agar berperan aktif dan berpartisipasi dalam mendukung program pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan dilakukannya pendekatan yang intensif kepada masing-masing BUMN maupun BUMS tersebut maka diharapkan kepada masing-masing BUMN dan BUMS dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	
						Terus mengadakan pendekatan kepada beberapa BUMN maupun BUMS yang belum memberikan kontribusi pada Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	

3.1.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program Kegiatan Sub Kegiatan

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA		% CAPAIAN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Daerah		104,37	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	90,44	Menunjang
2.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	2.1	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	97,36	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan keuangan	91,24	Menunjang
		2.2	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	94,50	Administrasi Pendapatan Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	79,35	Menunjang
3.	Meningkatnya Kemandirian Daerah Dalam Pembangunan Yang Bersumber Pada Pendanaan PAD	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi		94,25	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan kepegawaian	40,14	Menunjang
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerimaan Dana Transfer	95,15	Menunjang
					Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	95,15	Menunjang
					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	67,16	Menunjang
					Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	67,16	Menunjang
					Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	64,29	Menunjang
					Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	65,96	Menunjang
					Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	52,27	Menunjang
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	98,01	Menunjang

				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	61,40	Menunjang
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	74,37	Menunjang
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	70,24	Menunjang
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	88,68	Menunjang
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	89,17	Menunjang
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang memiliki Piutang Pajak	58,42	Menunjang
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang telah ditindaklanjuti	56,09	Menunjang
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	92,92	Menunjang
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	67,43	Menunjang

3.1.4 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		234.582.598.450,00	212.147.108.237,00	90,44
	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	550.000.000,00	313.594.657,00	57,02
	1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	200.000.000,00	127.016.795,00	63,51
	1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	150.000.000,00	75.051.244,00	50,03
	1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000.000,00	111.526.618,00	55,76
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	165.313.566.382,00	150.826.263.498,00	91,24
	2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	164.770.066.382,00	150.399.582.070,00	91,28
	2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	243.500.000,00	187.372.500,00	76,95
	2.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	300.000.000,00	239.308.928,00	79,77
	3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28.000.000,00	15.000.000,00	53,57
	3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28.000.000,00	15.000.000,00	53,57
	4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	333.000.000,00	264.238.050,00	79,35
	4.1	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
	4.2	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	80.000.000,00	65.449.600,00	81,81
	4.3	Pengolahan Data Retribusi Daerah	210.000.000,00	162.878.450,00	77,56
	4.4	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	43.000.000,00	35.910.000,00	83,51
	5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.771.247.500,00	710.991.584,00	40,14
	5.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	52.000.000,00	23.218.320,00	44,65
	5.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	681.247.500,00	602.270.706,00	88,41
	5.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	888.000.000,00	85.502.558,00	9,63
	5.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000,00	0,00	0,00
	6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.137.150.320,00	24.754.866.809,00	91,22
	6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	833.172.720,00	671.645.984,00	80,61
	6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.299.750.000,00	1.261.505.000,00	97,06
	6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	550.000.000,00	544.827.240,00	99,06
	6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.584.374.600,00	2.188.260.000,00	84,67
	6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.400.000.000,00	4.397.960.465,00	99,95
	6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,00	45.360.000,00	90,72
	6.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	202.000.000,00	117.622.325,00	58,23
	6.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.202.000.000,00	1.094.831.307,00	91,08
	6.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	16.015.853.000,00	14.432.854.488,00	90,12
	7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.677.151.963,00	9.458.251.845,00	97,74
	7.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.700.000.000,00	1.643.400.000,00	96,67
	7.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.150.000.000,00	1.056.400.000,00	91,86
	7.3	Pengadaan Mebel	1.350.000.000,00	1.299.976.382,00	96,29

		7.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.611.500.000,00	1.610.500.000,00	99,94
		7.5	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.865.651.963,00	3.847.975.463,00	99,54
	8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		22.350.200.000,00	20.488.340.139,00	91,67
		8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	92.000.000,00	45.694.500,00	49,67
		8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.755.000.000,00	2.466.749.489,00	89,54
		8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	182.000.000,00	175.544.000,00	96,45
		8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.321.200.000,00	17.800.352.150,00	92,13
	9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.422.282.285,00	5.315.561.655,00	71,62
		9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.150.000.000,00	1.488.204.176,00	69,22
		9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.939.635.180,00	1.698.237.403,00	57,77
		9.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	683.304.945,00	683.248.745,00	99,99
		9.4	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	200.000.000,00	0,00	0,00
		9.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.449.342.160,00	1.445.871.331,00	99,76
II.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah			220.000.000,00	209.331.072,00	95,15
	1.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		220.000.000,00	209.331.072,00	95,15
		1.1	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	220.000.000,00	209.331.072,00	95,15
III.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			6.933.438.300,00	6.933.438.300,00	67,16
	1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		6.933.438.300,00	6.933.438.300,00	67,16
		1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	751.400.000,00	483.038.730,00	64,29
		1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	487.572.000,00	321.611.746,00	65,96
		1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2.100.000.000,00	1.097.724.980,00	52,27
		1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	160.802.000,00	157.600.000,00	98,01
		1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	550.000.000,00	337.708.793,00	61,40
		1.6	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	584.392.000,00	434.588.650,00	74,37
		1.7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	100.000.000,00	70.236.115,00	70,24
		1.8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.074.821.800,00	953.101.660,00	88,68
		1.9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	100.000.000,00	89.169.858,00	89,17
		1.10	Penagihan Pajak Daerah	549.450.500,00	320.963.720,00	58,42
		1.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	50.000.000,00	28.044.661,00	56,09
		1.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	300.000.000,00	278.760.583,00	92,92
		1.13	Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
		1.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	125.000.000,00	84.288.250,00	67,43
	JUMLAH			241.736.036.750,00	217.013.277.055,00	89,77

3.1.5 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

NO.	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
1.	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Daerah	91,97	95,99	104,37	234.582.598.450,00	212.147.108.237,00	90,44	
					550.000.000,00	313.594.657,00	57,02	
					200.000.000,00	127.016.795,00	63,51	
					150.000.000,00	75.051.244,00	50,03	
					200.000.000,00	111.526.618,00	55,76	
					165.313.566.382,00	150.826.263.498,00	91,24	
					164.770.066.382,00	150.399.582.070,00	91,28	
					243.500.000,00	187.372.500,00	76,95	
					300.000.000,00	239.308.928,00	79,77	
					28.000.000,00	15.000.000,00	53,57	
					28.000.000,00	15.000.000,00	53,57	
2.	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi (Nilai absolut)	4,00	3,77	94,25	333.000.000,00	264.238.050,00	79,35	
					80.000.000,00	65.449.600,00	81,81	
					210.000.000,00	162.878.450,00	77,56	
					43.000.000,00	35.910.000,00	83,51	
					1.771.247.500,00	710.991.584,00	40,14	
					52.000.000,00	23.218.320,00	44,65	
					681.247.500,00	602.270.706,00	88,41	
					888.000.000,00	85.502.558,00	9,63	
					150.000.000,00	0,00	0,00	
3.	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,95	0,925	97,36	27.137.150.320,00	24.754.866.809,00	91,22	
					833.172.720,00	671.645.984,00	80,61	
					1.299.750.000,00	1.261.505.000,00	97,06	
					550.000.000,00	544.827.240,00	99,06	
					2.584.374.600,00	2.188.260.000,00	84,67	
					4.400.000.000,00	4.397.960.465,00	99,95	
					50.000.000,00	45.360.000,00	90,72	
					202.000.000,00	117.622.325,00	58,23	

					1.202.000.000,00	1.094.831.307,00	91,08	
					16.015.853.000,00	14.432.854.488,00	90,12	
4.	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	4,00	3,77	94,25	9.677.151.963,00	9.458.251.845,00	97,74	
					1.700.000.000,00	1.643.400.000,00	96,67	
					1.150.000.000,00	1.056.400.000,00	91,86	
					1.350.000.000,00	1.299.976.382,00	96,29	
					1.611.500.000,00	1.610.500.000,00	99,94	
					3.865.651.963,00	3.847.975.463,00	99,54	
					22.350.200.000,00	20.488.340.139,00	91,67	
					92.000.000,00	45.694.500,00	49,67	
					2.755.000.000,00	2.466.749.489,00	89,54	
					182.000.000,00	175.544.000,00	96,45	
					19.321.200.000,00	17.800.352.150,00	92,13	
					7.422.282.285,00	5.315.561.655,00	71,62	
					2.150.000.000,00	1.488.204.176,000	69,22	
					2.939.635.180,00	1.698.237.403,00	57,77	
					683.304.945,00	683.248.745,00	99,99	
					200.000.000,00	0,00	0,00	
					1.449.342.160,00	1.445.871.331,00	99,76	
					220.000.000,00	209.331.072,00	95,15	
					220.000.000,00	209.331.072,00	95,15	
					6.933.438.300,00	4.656.837.746,00	67,16	
					751.400.000,00	483.038.730,00	64,29	
					487.572.000,00	321.611.746,00	65,96	
					2.100.000.000,00	1.097.724.980,00	52,27	
					160.802.000,00	157.600.000,00	98,01	
					550.000.000,00	337.708.793,00	61,40	
					584.392.000,00	434.588.650,00	74,37	
					100.000.000,00	89.169.858,00	89,17	
					549.450.500,00	320.963.720,00	58,42	
					50.000.000,00	28.044.661,00	56,09	
					300.000.000,00	278.760.583,00	92,92	
					125.000.000,00	84.288.250,00	67,43	
					241.736.036.750,00	217.013.277.055,00	89,77	

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Program Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		94,54	92,08	97,39	234.582.598.450,00	212.147.108.237,00	90,44	
	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96,16	73,47	76,40	550.000.000,00	313.594.657,00	57,02	
	1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				200.000.000,00	127.016.795,00	63,51	
	1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD				150.000.000,00	75.051.244,00	50,03	
	1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.000.000,00	111.526.618,00	55,76	
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	97,17	96,23	99,03	165.313.566.382,00	150.826.263.498,00	91,24	
	2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				164.770.066.382,00	150.399.582.070,00	91,28	
	2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				243.500.000,00	187.372.500,00	76,95	
	2.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD				300.000.000,00	239.308.928,00	79,77	
	3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	94,25	89,71	95,18	28.000.000,00	15.000.000,00	53,57	
	3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				28.000.000,00	15.000.000,00	53,57	
	4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	93,85	88,72	94,53	333.000.000,00	264.238.050,00	79,35	
	4.1	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah				80.000.000,00	65.449.600,00	81,81	
	4.2	Pengolahan Data Retribusi Daerah				210.000.000,00	162.878.450,00	77,56	
	4.3	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				43.000.000,00	35.910.000,00	83,51	
	5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	94,14	87,19	92,61	1.771.247.500,00	710.991.584,00	40,14	
	5.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				52.000.000,00	23.218.320,00	44,65	
	5.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				681.247.500,00	602.270.706,00	88,41	
	5.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				888.000.000,00	85.502.558,00	9,63	
	6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	92,08	85,62	92,98	27.137.150.320,00	24.754.866.809,00	91,22	
	6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				833.172.720,00	671.645.984,00	80,61	
	6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.299.750.000,00	1.261.505.000,00	97,06	
	6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				550.000.000,00	544.827.240,00	99,06	
	6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				2.584.374.600,00	2.188.260.000,00	84,67	

		6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.400.000.000,00	4.397.960.465,00	99,95	
		6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				50.000.000,00	45.360.000,00	90,72	
		6.7	Facilitasi Kunjungan Tamu				202.000.000,00	117.622.325,00	58,23	
		6.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.202.000.000,00	1.094.831.307,00	91,08	
		6.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				16.015.853.000,00	14.432.854.488,00	90,12	
	7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		93,61	82,83	88,48	9.677.151.963,00	9.458.251.845,00	97,74	
		7.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.700.000.000,00	1.643.400.000,00	96,67	
		7.2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan				1.150.000.000,00	1.056.400.000,00	91,86	
		7.3	Pengadaan Mebel				1.350.000.000,00	1.299.976.382,00	96,29	
		7.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.611.500.000,00	1.610.500.000,00	99,94	
		7.5	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.865.651.963,00	3.847.975.463,00	99,54	
	8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		93,65	85,52	91,31	20.498.080.000,00	19.586.152.554,40	95,55	
		8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				92.000.000,00	45.694.500,00	49,67	
		8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.755.000.000,00	2.466.749.489,00	89,54	
		8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				182.000.000,00	175.544.000,00	96,45	
		8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				19.321.200.000,00	17.800.352.150,00	92,13	
	9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		91,22	82,76	90,72	7.422.282.285,00	5.315.561.655,00	71,62	
		9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				2.150.000.000,00	1.488.204.176,00	69,22	
		9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.939.635.180,00	1.698.237.403,00	57,77	
		9.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				683.304.945,00	683.248.745,00	99,99	
		9.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.449.342.160,00	1.445.871.331,00	99,76	
II.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah			94,46	86,71	91,79	220.000.000,00	209.331.072,00	95,15	
	1.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		94,46	86,71	91,79	220.000.000,00	209.331.072,00	95,15	
		1.1	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				220.000.000,00	209.331.072,00	95,15	
III.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			93,64	91,92	98,16	6.933.438.300,00	4.656.837.746,00	67,16	

	1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	94,62	89,70	94,80	6.933.438.300,00	4.656.837.746,00	67,16	
	1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				751.400.000,00	483.038.730,00	64,29	
	1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				487.572.000,00	321.611.746,00	65,96	
	1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2.100.000.000,00	1.097.724.980,00	52,27	
	1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				160.802.000,00	157.600.000,00	98,01	
	1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				1.140.000.000,00	391.578.054,00	34,35	
	1.6	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				550.000.000,00	337.708.793,00	61,40	
	1.7	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				584.392.000,00	434.588.650,00	74,37	
	1.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah				100.000.000,00	70.236.115,00	70,24	
	1.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1.074.821.800,00	953.101.660,00	88,68	
	1.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				100.000.000,00	89.169.858,00	89,17	
	1.11	Penagihan Pajak Daerah				549.450.500,00	320.963.720,00	58,42	
	1.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				50.000.000,00	28.044.661,00	56,09	
	1.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				300.000.000,00	278.760.583,00	92,92	
	1.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				125.000.000,00	84.288.250,00	67,43	
	JUMLAH					241.736.036.750,00	217.013.277.055,00	89,77	

A. Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi :

- 1. Pengukuran Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi
 - a. Capaian Keluaran

1) Pengukuran Capaian Keluaran (Output) Program dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik (Π) berdasarkan rata-rata ukur secara geometrik Π) perbandingan antara realisasi indikator dan target indikator. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$CKP = \prod_{i=1}^m \left(\left(\prod_{n=1}^n \frac{Realisasi\ Indikator\ i}{Target\ Indikator\ i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \times 100\%$$

Keterangan :

- CKP : Capaian Keluaran (*Output*) Program
- m : Jumlah Keluaran (*Output*) Program
- n : Jumlah Indikator Keluaran (*Output*) Program

Capaian Keluaran (Output) Program (CKP)	Indikator Keluaran (Output) Program (IKP)		
	IKP	Target (TIKP)	Realisasi (RIKP)
CKP 1	IKP 1	93,48	90,44
CKP 2	IKP 2	97,03	95,15
CKP 3	IKP 3	88,12	67,16

$$CKP = \left(\left(\left(\frac{90,44}{93,48} \right) \times \left(\frac{95,15}{97,03} \right) \times \left(\frac{67,16}{88,12} \right) \right)^{\frac{1}{3}} \right) \times 100\%$$

$$CKP = \left((0,96 \times 0,98 \times 0,76)^{\frac{1}{3}} \right) \times 100\%$$

$$CKP = 89,00\%$$

2) Pengukuran Capaian Keluaran (*Output*) Kegiatan dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometric (Π) dari perkalian antara perbandingan realisasi dan target volume keluaran dengan rata-rata ukur secara geometric (Π) perbandingan antara capaian dan target indikator. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$CKK = \prod_{i=1}^m \left(\left(\frac{RVK\ ke\ i}{TVK\ ke\ i} \times \left(\prod_{j=1}^n \frac{Realisasi\ Indikator\ i}{Target\ Indikator\ i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right)$$

Keterangan :

- CKK : Capaian Keluaran (*Output*) Kegiatan
- RVK : Realisasi Volume Keluaran (*Output*) Kegiatan
- TVK : Target Volume Keluaran (*Output*) Kegiatan
- m : Jumlah Keluaran (*Output*) Kegiatan
- n : Jumlah Indikator Keluaran (*Output*) Kegiatan

Capaian Keluaran (Output) Kegiatan (CKK)	Volume		Indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan (IKK)		
	Target (TVK)	Realisasi (RVK)	IKK	Target (TIKK)	Realisasi (RIKK)
Keluaran 1 (SDM)	468	445	IKK ke 1	92,16	82,13
			IKK ke 2	30,00	27,03
Keluaran 2 (Laporan)	64	58	IKK ke 1	3,00	2,00
			IKK ke 2	4,00	2,00
			IKK ke 3	1,00	1,00
			IKK ke 4	1,00	1,00
			IKK ke 5	1,00	1,00
			IKK ke 6	1,00	1,00
			IKK ke 7	1,00	1,00
			IKK ke 8	1,00	1,00
			IKK ke 9	13,00	13,00
			IKK ke 10	3,00	1,00
			IKK ke 11	3,00	3,00
			IKK ke 12	2,00	1,00
			IKK ke 13	29,00	29,00
			IKK ke 14	1,00	1,00
Keluaran 3 (Dokumen)	58	42	IKK ke 1	2,00	1,00
			IKK ke 2	1,00	1,00
			IKK ke 3	1,00	1,00
			IKK ke 4	1,00	1,00
			IKK ke 5	1,00	1,00
			IKK ke 6	1,00	1,00
			IKK ke 7	1,00	1,00
			IKK ke 8	1,00	1,00
			IKK ke 9	2,00	2,00
			IKK ke 10	2,00	2,00
			IKK ke 11	1,00	1,00
			IKK ke 12	12,00	8,00
			IKK ke 13	29,00	18,00
			IKK ke 14	1,00	1,00
			IKK ke 15	2,00	2,00

$$CKK = \left(\left(\frac{445}{468} \times \left(\frac{82,13}{92,16} \times \frac{27,03}{30} \right)^{\frac{1}{2}} \right) \times \left(\frac{58}{64} \times \left(\frac{2}{3} \times \frac{2}{4} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{13}{13} \times \frac{1}{3} \times \frac{3}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{29}{29} \times \frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{14}} \right) \times \left(\frac{42}{58} \times \left(\frac{1}{2} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{2}{2} \times \frac{2}{2} \times \frac{1}{1} \times \frac{8}{12} \times \frac{18}{29} \times \frac{1}{1} \times \frac{2}{2} \right)^{\frac{1}{15}} \right) \right) \times 100 \%$$
$$CKK = 30,00$$

b. Penyerapan Anggaran

Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$P = \frac{RA}{PA} \times 100 \%$$

Keterangan :

P : Penyerapan Anggaran

RA : Akumulasi Realisasi Anggaran

PA : Akumulasi Pagu Anggaran

NO.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		234.582.598.450,00	212.147.108.237,00	90,44
	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	550.000.000,00	313.594.657,00	57,02
	1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	200.000.000,00	127.016.795,00	63,51
	1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	150.000.000,00	75.051.244,00	50,03
	1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000.000,00	111.526.618,00	55,76
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	165.313.566.382,00	150.826.263.498,00	91,24
	2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	164.770.066.382,00	150.399.582.070,00	91,28
	2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	243.500.000,00	187.372.500,00	76,95
	2.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	300.000.000,00	239.308.928,00	79,77
	3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28.000.000,00	15.000.000,00	53,57
	3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28.000.000,00	15.000.000,00	53,57
	4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	333.000.000,00	264.238.050,00	79,35
	4.1	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
	4.2	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	80.000.000,00	65.449.600,00	81,81
	4.3	Pengolahan Data Retribusi Daerah	210.000.000,00	162.878.450,00	77,56
	4.4	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	43.000.000,00	35.910.000,00	83,51
	5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.771.247.500,00	710.991.584,00	40,14
	5.1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	52.000.000,00	23.218.320,00	44,65
	5.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	681.247.500,00	602.270.706,00	88,41
	5.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	888.000.000,00	85.502.558,00	9,63
	5.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000,00	0,00	0,00
	6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.137.150.320,00	24.754.866.809,00	91,22
	6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	833.172.720,00	671.645.984,00	80,61
	6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.299.750.000,00	1.261.505.000,00	97,06
	6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	550.000.000,00	544.827.240,00	99,06
	6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.584.374.600,00	2.188.260.000,00	84,67
	6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.400.000.000,00	4.397.960.465,00	99,95
	6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,00	45.360.000,00	90,72
	6.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	202.000.000,00	117.622.325,00	58,23
	6.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.202.000.000,00	1.094.831.307,00	91,08
	6.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	16.015.853.000,00	14.432.854.488,00	90,12
	7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.677.151.963,00	9.458.251.845,00	97,74
	7.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.700.000.000,00	1.643.400.000,00	96,67
	7.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.150.000.000,00	1.056.400.000,00	91,86
	7.3	Pengadaan Mebel	1.350.000.000,00	1.299.976.382,00	96,29
	7.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.611.500.000,00	1.610.500.000,00	99,94
	7.5	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.865.651.963,00	3.847.975.463,00	99,54

	8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		22.350.200.000,00	20.488.340.139,00	91,67
	8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		92.000.000,00	45.694.500,00	49,67
	8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		2.755.000.000,00	2.466.749.489,00	89,54
	8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		182.000.000,00	175.544.000,00	96,45
	8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		19.321.200.000,00	17.800.352.150,00	92,13
	9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.422.282.285,00	5.315.561.655,00	71,62
	9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		2.150.000.000,00	1.488.204.176,00	69,22
	9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		2.939.635.180,00	1.698.237.403,00	57,77
	9.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		683.304.945,00	683.248.745,00	99,99
	9.4	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		200.000.000,00	0,00	0,00
	9.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1.449.342.160,00	1.445.871.331,00	99,76
II.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah			220.000.000,00	209.331.072,00	95,15
	1.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		220.000.000,00	209.331.072,00	95,15
	1.1	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi		220.000.000,00	209.331.072,00	95,15
III.	Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah			6.933.438.300,00	6.933.438.300,00	67,16
	1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		6.933.438.300,00	6.933.438.300,00	67,16
	1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		751.400.000,00	483.038.730,00	64,29
	1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		487.572.000,00	321.611.746,00	65,96
	1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		2.100.000.000,00	1.097.724.980,00	52,27
	1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		160.802.000,00	157.600.000,00	98,01
	1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		550.000.000,00	337.708.793,00	61,40
	1.6	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		584.392.000,00	434.588.650,00	74,37
	1.7	Penetapan Wajib Pajak Daerah		100.000.000,00	70.236.115,00	70,24
	1.8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		1.074.821.800,00	953.101.660,00	88,68
	1.9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		100.000.000,00	89.169.858,00	89,17
	1.10	Penagihan Pajak Daerah		549.450.500,00	320.963.720,00	58,42
	1.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		50.000.000,00	28.044.661,00	56,09
	1.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		300.000.000,00	278.760.583,00	92,92
	1.13	Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		0,00	0,00	0,00
	1.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		125.000.000,00	84.288.250,00	67,43
	JUMLAH			241.736.036.750,00	217.013.277.055,00	89,77

c. Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100 \%$$

- Keterangan :
- E : Efisiensi
 - PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i
 - RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i
 - CKi : Capaian Keluaran i

Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan	Capaian Keluaran (Output) Kegiatan	Anggaran	
		Pagu (PAK)	Realsasi (RAK)
Keluaran 1 (dokumen)	0,7347	550.000.000,00	313.594.657,00
Keluaran 2 (SDM)	0,9623	165.313.566.382,00	150.826.263.498,00
Keluaran 3 (dokumen)	0,8336	28.000.000,00	15.000.000,00
Keluaran 4 (dokumen)	0,8872	333.000.000,00	264.238.050,00
Keluaran 5 (SDM)	0,8719	1.771.247.500,00	710.991.584,00
Keluaran 6 (laporan)	0,8562	27.137.150.320,00	24.754.866.809,00
Keluaran 7 (unit)	0,8283	9.677.151.963,00	9.458.251.845,00
Keluaran 8 (laporan)	0,8552	22.350.200.000,00	20.488.340.139,00
Keluaran 9 (unit)	0,8276	7.422.282.285,00	5.315.561.655,00
Keluaran 10 (laporan)	0,8671	220.000.000,00	209.331.072,00
Keluaran 11 (dokumen)	0,8970	6.933.438.300,00	4.656.837.746,00

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{11} ((550.000.000,00 \times 73,47) - 313.594.657,00) + ((165.313.566.382,00 \times 96,23) - 150.826.263.498,00) + \dots + Un\ 11}{\sum_{i=1}^{11} ((550.000.000,00 \times 73,47) + (165.313.566.382,00 \times 96,23) + \dots + Un11)} \times 100 \%$$

E = 3,23

- Keterangan :
- Batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah (20%) .

d. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan

Pengukuran konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dilakukan dengan menghitung rata-rata dari perbandingan antara hasil pengurangan akumulasi rencana penarikan dana dengan deviasi realisasi anggaran dan rencana penarikan dana kumulatif. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n (\frac{RPDKn - |RPDKn - RAKn|}{RPDKn} \times 100 \%) }{n}$$

- Keterangan :
- K : Konsistensi penyerapan anggaran terhadap Perencanaan
 - RAK : Realisasi anggaran kumulatif sampai dengan bulan ke i
 - RPDK : Rencana penarikan dana kumulatif sampai dengan bulan ke n
 - n : Jumlah bulan

Bulan	RPD	RPD Kumulatif	Realisasi Anggaran (RA)	RA Kumulatif
Januari	88.386.055.195,00	88.386.055.195,00	4.268.453.514,00	4.268.453.514,00
Februari	29.427.141.405,00	117.813.196.600,00	2.417.381.990,00	6.685.835.504,00
Maret	26.855.684.300,00	144.668.880.900,00	7.501.930.422,00	14.187.765.926,00
April	46.091.064.447,00	190.759.945.347,00	38.741.665.872,00	52.929.431.798,00
Mei	15.257.456.250,00	206.017.401.597,00	9.652.554.472,00	62.581.986.270,00
Juni	19.982.118.500,00	225.999.520.097,00	13.940.167.273,00	76.522.153.543,00
Juli	7.194.521.378,00	233.194.041.475,00	29.712.484.989,00	106.234.638.532,00
Agustus	2.622.303.614,00	235.816.345.089,00	11.210.486.504,00	117.445.125.036,00
September	1,00	235.816.345.090,00	8.668.553.252,00	126.113.678.288,00
Oktober	5.642.291.660,00	241.458.636.750,00	28.903.234.548,00	155.016.912.836,00
November	277.400.000,00	241.736.036.750,00	19.436.467.256,00	174.453.380.092,00
Desember	0,00	241.736.036.750,00	42.559.896.963,00	217.013.277.055,00

Dari tabel diatas, dapat dihitung nilai konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebagai berikut :

RPDK bulan Januari (1)

= 88.386.055.195,00

RAK bulan Januari

= 4.268.453.514,00

$$K = \left(\frac{ \frac{88.386.055.195,00 - |88.386.055.195,00 - 4.268.453.514,00|}{88.386.055.195,00} }{1} \right) \times 100 \%$$

$$K = 4,83$$

Dengan metode analisis perhitungan yang sama, maka didapat nilai konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan per bulan sebagai berikut :

Bulan	Tingkat Konsistensi per Bulan (%)
Januari	4,83
Februari	5,67
Maret	9,81
April	27,75
Mei	30,38
Juni	33,86
Juli	45,56
Agustus	49,80
September	53,48
Oktober	64,20
November	72,17
Desember	89,77

Dari tabel di atas, pengukuran konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan adalah sebagai berikut :

$$K = \frac{4,83 + 5,67 + 9,81 + 27,75 + 30,38 + 33,86 + 45,56 + 49,80 + 53,48 + 64,20 + 72,17 + 89,77}{12}$$

$K = 40,61$

2. Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi Untuk mendapatkan nilai Kinerja, maka seluruh indikator (penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, pencapaian keluaran, dan efisiensi) harus memiliki skala yang sama, yaitu dari 0%-100%. Dari keempat variabel pengukuran tersebut variabel efisiensi tidak memiliki skala 0%- 100%. Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai dalam rumus efisiensi sebesar (20%) dan nilai paling tinggi sebesar 20% . Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antar 0% sampai dengan 100%, dengan rumus sebagai berikut :

$$NE = 50 \% + (\frac{E}{20} \times 50)$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah nilai skala maksimal (100%) dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah skala minimal (0%).

Dari hasil analisa, bahwa efisiensi yang diperoleh (E) = 3,23 %, maka nilai efisiensi :

$$NE = 50\% + \left(\frac{3,23}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 58,075$$

Selanjutnya, nilai Kinerja atas Aspek Implementasi dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara hasil pengukuran setiap variabel Aspek Implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat program atau satuan kerja. Rumus dari perhitungan tersebut sebagai berikut :

$$NKI = (P \times Wp) + (K \times Wk) + (CKP \text{ atau } CKK \times Wck) + (NE \times We)$$

Keterangan :

- NKI : Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi
- P : Penyerapan Anggaran
- K : Konsistensi penyerapan anggaran terhadap Perencanaan
- CKP : Capaian Keluaran (*Output*) Program
- CKK : Capaian Keluaran (*Output*) Kegiatan
- NE : Nilai efisiensi
- Wp : Bobot penyerapan anggaran
- Wk : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
- Wck : Bobot capaian keluaran
- We : Bobot efisiensi

Dimana, bobot masing – masing variabel aspek implementasi sebagai berikut :

- Wp : 9,7 %
- Wk : 18,2 %
- Wck : 43,5 %
- We : 28,6 %

$$\text{Maka nilai (NKI) : } (P \times Wp) + (K \times Wk) + (CKP \times Wck) + (NE \times We)$$

$$NKI : (89,77 \% \times 9,7 \%) + (40,61 \% \times 18,2 \%) + (89,00 \% \times 43,5 \%) + (30,00 \% \times 28,6 \%)$$

$$NKI : 63,39 \%$$

Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan dari Perangkat Daerah tersebut sebesar 63,39 %, maka nilai Kinerja atas Aspek Implementasi Perangkat Daerah tersebut termasuk kategori Baik.

B. Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran Strategis

Capaian sasaran strategis dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik (Π) berdasarkan rata-rata ukur secara geometrik (Π) perbandingan antara capaian indikator Sasaran Strategis dan target indikator Sasaran Strategis. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$CSS = \prod_{i=1}^m (((\prod_{j=1}^n \frac{Capaian\ Indikator\ Sasaran\ Strategis\ i}{Target\ Indikator\ Sasaran\ Strategis\ i})^{\frac{1}{n}})^{\frac{1}{m}}) \times 100 \%$$

- Keterangan :
- CSS

: Capaian Sasaran Strategis
- m

: Jumlah Sasaran Strategis
- n

: Jumlah Indikator Sasaran Strategis

Sasaran Strategis / Outcomes	Indikator Sasaran Strategis (IKSS)		
	IKSS	Target (TIKSS)	Realisasi (RIKSS)
Sasaran Strategis 1 (SS.1)	IKSS ke 1	91,97	95,99
Sasaran Strategis 2 (SS.2)	IKSS ke 1	0,95	0,925
	IKSS ke 2	1,00	0,945
Sasaran Strategis 3 (SS.3)	IKSS ke 1	4,00	3,77

$$CSS = \left(\left(\left(\left(\left(\frac{95,99}{91,97} \right)^x \right) \times \left(\frac{0,925}{0,95} \times \frac{0,945}{1,00} \right)^{\frac{1}{2}} \right)^x \right) \left(\frac{3,77}{4,00} \right) \right) \times 100 \%$$

$$CSS = 94,00$$

2. Capaian Sasaran Program

Capaian Sasaran Program dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik (Π) berdasarkan rata-rata ukur secara geometrik

(II) perbandingan antara capaian indikator Sasaran Program dan target indikator Sasaran Program. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$CSP = \prod_{i=1}^m (((\prod_{j=1}^n \frac{Capaian\ Indikator\ Sasaran\ Program\ i}{Target\ Indikator\ Sasaran\ Program\ i})^{\frac{1}{n}})^{\frac{1}{m}}) \times 100\%$$

Keterangan :

- CSP : Capaian Sasaran Program
- m : Jumlah Sasaran Program
- n : Jumlah Indikator Sasaran Program

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (ISP)		
	ISP	Target (ISP)	Realisasi (RISP)
Outcomes Program 1	ISP	94,54	90,44
Outcomes Program 2	ISP	94,46	95,15
Outcomes Program 3	ISP	93,64	67,16

$$CSP = \left(\left(\left(\frac{90,44}{94,54} \right) \times \left(\frac{95,15}{94,46} \right) \times \left(\frac{67,16}{93,64} \right) \right) \right) \times 100\%$$

$$CSP = 69,00$$

C. Penilaian Kinerja Anggaran Perangkat Daerah

1. Penilaian Kinerja Tingkat Perangkat Daerah

Penilaian Kinerja tingkat Perangkat Daerah dilakukan dengan menghitung rata-rata dari nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat tingkat Perangkat Daerah dan rata-rata nilai Kinerja Anggaran tingkat eselon III / program lingkup kewenangan Perangkat Daerah. Rumus pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$NKK = \frac{CSS + rata - rata\ nilai\ kinerja\ anggaran\ tingkat\ eselon\ III / Program}{2}$$

Keterangan :

- NKK : Nilai Kinerja tingkat Perangkat Daerah
- CSS : Capaian Sasaran Strategis/Nilai Kinerja Perangkat Daerah atas Aspek Manfaat

$$NKK = \frac{94,00\% + 69,00\%}{2}$$

$$NKK = 81,50 \%$$

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Perangkat Daerah tersebut sebesar 81,50 %, maka nilai Kinerja Perangkat Daerah tersebut termasuk kategori Baik.

2. Penilaian Kinerja Tingkat Program

Penilaian Kinerja tingkat eselon III/program dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat dan Aspek Implementasi tingkat eselon III/program dan rata-rata nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja lingkup kewenangan eselon III/program terkait.

Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat dan Aspek Implementasi tingkat eselon III/program dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat eselon III/program dan nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat tingkat eselon III/program dengan bobot masing-masing aspek evaluasi Kinerja Anggaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{Nilai Kinerja atas Aspek Manfaat dan Implementasi} = (NKI \times Wi) + (CSP \times Wm)$$

Keterangan :

NKI : Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi

Wi : Bobot Aspek Implementasi

Wm : Bobot Aspek Manfaat

Bobot masing – masing aspek sebagai berikut :

Aspek Implementasi (Wi) = 33,3 %, terdiri dari :

Wp : 9,7 %

Wk : 18,2 %

Wck : 43,5 %

We : 28,6 %

Aspek Manfaat (Wm) = 66,7 %

$$(NKI \times Wi) + (CSP \times Wm) = (63,39 \% \times 33,3 \%) + (69,00 \% \times 66,7 \%) = 67,13 \%$$

Nilai Kinerja Anggaran tingkat eselon III/program tersebut sebesar 67,13%, maka nilai Kinerja eselon III/program tersebut termasuk kategori Baik.



Kesimpulan dan Saran Rekomendasi

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisa indikator kinerja dengan menggunakan teknik analisa data evIEWS versi 13, capaian kinerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1. Kinerja unit eselon III (IKSSO Level 1) memberikan kontribusi terhadap kinerja unit eselon II (IKSS) sebesar (%) :

	$\Delta (lnIKSS1)$	$\Delta (lnIKSS2)$	$\Delta (lnIKSS3)$	$\Delta (lnIKSS4)$	$\Delta (lnIKSS5)$	$\Delta (lnIKSS6)$
$\Delta (lnIKSS01)$	84.17	89.33	81.01	88.76	80.52	86.42
$\Delta (lnIKSS02)$	89.37	87.48	83.51	86.18	83.15	82.26
$\Delta (lnIKSS03)$	87.45	82.53	80.14	86.24	89.83	84.63
$\Delta (lnIKSS04)$	87.46	88.22	81.27	82.16	81.64	83.16
$\Delta (lnIKSS05)$	86.19	81.08	84.26	88.28	83.58	84.35
$\Delta (lnIKSS06)$	82.45	83.19	88.65	81.12	89.76	82.36
$\Delta (lnIKSS07)$	86.00	82.82	88.62	85.18	82.45	89.41

2. Kinerja unit eselon IV (IKSSO Level 2) memberikan kontribusi terhadap kinerja unit eselon III (IKSSO Level 1) sebesar (%) :

	$\Delta (lnIKSS01)$	$\Delta (lnIKSS02)$	$\Delta (lnIKSS03)$	$\Delta (lnIKSS04)$	$\Delta (lnIKSS05)$	$\Delta (lnIKSS06)$	$\Delta (lnIKSS07)$
$\Delta (lnIKSS08)$	86.69	85.71	83.73	87.12	88.58	85.33	81.05
$\Delta (lnIKSS09)$	81.32	87.74	89.10	84.28	84.25	84.51	82.65
$\Delta (lnIKSS010)$	87.37	84.64	86.10	86.63	85.71	83.62	89.34
$\Delta (lnIKSS011)$	82.13	85.20	80.24	87.18	84.15	86.26	83.34
$\Delta (lnIKSS012)$	86.18	85.18	87.13	84.15	82.31	88.21	84.81
$\Delta (lnIKSS013)$	85.73	88.92	86.84	85.75	86.72	89.60	86.51
$\Delta (lnIKSS014)$	85.61	82.82	88.28	87.46	87.71	83.32	84.45
$\Delta (lnIKSS015)$	88.36	84.36	81.83	82.63	87.21	86.65	87.38
$\Delta (lnIKSS016)$	83.34	82.27	82.24	87.20	87.67	84.38	81.34
$\Delta (lnIKSS017)$	80.17	83.66	86.71	81.32	80.63	89.63	84.48

Δ (lnIKSS018)	82.41	81.52	85.18	88.32	80.11	83.13	85.54
Δ (lnIKSS019)	89.52	88.43	86.19	82.32	87.77	85.51	86.69
Δ (lnIKSS020)	88.65	88.12	85.23	81.42	81.52	88.53	87.72
Δ (lnIKSS021)	84.82	82.32	89.14	83.61	88.76	81.25	85.23
Δ (lnIKSS022)	86.16	89.26	80.41	87.65	85.31	86.92	87.72
Δ (lnIKSS023)	87.23	82.00	82.13	84.48	85.16	83.26	84.23
Δ (lnIKSS024)	84.62	81.63	84.62	85.56	84.41	84.19	89.65
Δ (lnIKSS025)	84.16	87.16	85.67	85.62	83.36	84.77	88.78
Δ (lnIKSS026)	88.28	86.57	84.47	87.32	81.73	85.95	81.29
Δ (lnIKSS027)	81.29	84.14	85.56	86.68	84.49	89.64	82.66

- 3. Nilai kinerja Perangkat Daerah atas Aspek Implementasi diperoleh nilai sebesar (NKI = 63,39 %) dengan kategori tinggi.
- 4. Nilai kinerja Perangkat Daerah atas Aspek Manfaat (Capaian Sasaran Strategis (CSS = 94,00 %, dengan kategori sangat tinggi)) sementara (Capaian Sasaran Program (CSP = 69,00 %, dengan kategori tinggi));
- 5. Nilai kinerja anggaran tingkat Perangkat Daerah atas Aspek Manfaat (NKK = 81,05 %, dengan kategori baik) sementara nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan program bernilai 67,13 % dengan kategori tinggi.

B. Saran Rekomendasi

Berdasarkan capaian kinerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah yang telah dicapai pada tahun 2024, berikut saran dan rekomendasi dalam rangka menjaga kesinambungan kinerja yang perlu ditingkatkan pada tahun 2025 sebagai berikut :

- 1. Terhadap nilai kinerja Perangkat Daerah atas Aspek Implementasi dan Aspek Manfaat :
 - a. meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan;
 - b. menentukan target Kinerja tahun anggaran selanjutnya sehubungan dengan ketersediaan anggaran;
 - c. mengantisipasi kendala dan faktor pendukung yang dapat mempengaruhi ketercapaian target Kinerja;
 - d. menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target Kinerja;
- 2. Meningkatkan kinerja dengan pola kerja kolaboratif (internal dan eksternal) untuk meningkatkan kinerja (tujuan dan sasaran strategis) dengan kinerja *cross cutting* sebagai berikut :

a. Kinerja *cross cutting* (%) Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO Level 1) terhadap Indikator Kinerja Sasaran Strategis Eselon II :

	$\Delta (lnIKSS1)$	$\Delta (lnIKSS2)$	$\Delta (lnIKSS3)$	$\Delta (lnIKSS4)$	$\Delta (lnIKSS5)$	$\Delta (lnIKSS6)$
$\Delta (lnIKSS01)$	11.63	19.27	21.73	12.44	18.25	18.27
$\Delta (lnIKSS02)$	14.28	14.17	16.37	14.74	13.25	15.43
$\Delta (lnIKSS03)$	16.18	16.18	13.34	14.74	17.27	16.82
$\Delta (lnIKSS04)$	13.24	12.27	14.21	14.13	15.14	14.16
$\Delta (lnIKSS05)$	15.62	14.29	17.16	17.32	15.12	13.14
$\Delta (lnIKSS06)$	13.26	14.38	14.72	13.42	12.38	16.51
$\Delta (lnIKSS07)$	12.32	13.18	15.62	14.41	18.25	16.38

b. Kinerja *cross cutting* (%) Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO Level 2) terhadap Indikator Kinerja Sasaran Strategis Eselon III :

	$\Delta (lnIKSS01)$	$\Delta (lnIKSS02)$	$\Delta (lnIKSS03)$	$\Delta (lnIKSS04)$	$\Delta (lnIKSS05)$	$\Delta (lnIKSS06)$	$\Delta (lnIKSS07)$
$\Delta (lnIKSS08)$	13.71	10.18	12.15	12.52	11.26	17.18	18.35
$\Delta (lnIKSS09)$	18.26	12.13	13.24	15.87	12.62	13.48	17.81
$\Delta (lnIKSS010)$	12.34	11.72	12.42	13.24	10.32	15.26	19.16
$\Delta (lnIKSS011)$	13.24	14.71	12.32	13.29	16.38	15.16	12.31
$\Delta (lnIKSS012)$	14.26	14.26	12.18	12.62	18.45	17.40	16.40
$\Delta (lnIKSS013)$	14.51	15.42	16.14	14.12	12.47	16.13	15.23
$\Delta (lnIKSS014)$	14.14	17.28	16.14	10.14	12.62	14.66	15.42
$\Delta (lnIKSS015)$	19.24	15.54	13.72	11.38	12.61	13.25	12.62
$\Delta (lnIKSS016)$	16.17	13.15	17.67	12.21	17.23	14.32	18.26
$\Delta (lnIKSS017)$	10.87	16.64	15.25	14.24	12.23	19.23	14.51
$\Delta (lnIKSS018)$	10.52	11.43	14.65	12.74	14.32	12.45	13.15
$\Delta (lnIKSS019)$	11.24	12.87	13.32	16.61	13.28	16.82	15.65
$\Delta (lnIKSS020)$	12.65	11.28	14.64	18.54	18.58	11.41	10.27
$\Delta (lnIKSS021)$	15.18	16.94	10.82	16.14	11.28	18.45	14.74
$\Delta (lnIKSS022)$	13.35	19.67	11.35	12.42	14.65	11.01	18.62
$\Delta (lnIKSS023)$	12.17	12.16	12.23	18.26	14.53	16.74	15.80
$\Delta (lnIKSS024)$	14.65	13.37	15.36	16.15	16.65	14.21	10.34

$\Delta (lnIKSS025)$	15.15	14.45	14.20	16.24	12.21	15.28	11.22
$\Delta (lnIKSS026)$	11.78	11.42	17.24	11.18	13.59	12.72	18.61
$\Delta (lnIKSS027)$	18.72	16.64	16.62	13.13	14.55	16.33	17.41

3. Melaksanakan pengendalian intern dimulai pada level paling bawah di tingkat operasional staf sampai ke jenjang level pimpinan agar permasalahan dan solusi yang tepat dapat diketahui sedini mungkin (*early warning*);

Palembang, **21** Januari 2025



**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M. M
 PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
 NIP. 19810923 200012 1 001